

LAPORAN EVALUASI RKPD TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KUNINGAN



BAPPEDA
KABUPATEN KUNINGAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya penyusunan dokumen Triwulan I (Satu) Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi rencana kerja pemerintah daerah diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa mendatang. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah. Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Triwulan I (Satu) Tahun 2025 ini kami susun, kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen ini, Kami sampaikan terima kasih.

Kuningan, April 2025



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|--------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum | I-2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.4 Sistematika Penyajian Laporan | I-3 |
| BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA | II-1 |
| 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah..... | II-1 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota | II-3 |
| 2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 | II-5 |
| 2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 | II-6 |
| BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023..... | III-1 |
| 3.1 Capaian Kinerja Sasaran | III-1 |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-8 |
| 3.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan | III-9 |
| 3.4 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional | III-16 |
| BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPIAAN KINERJA | IV-1 |
| 4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja | IV-1 |
| 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya | IV-1 |
| BAB V PENUTUP | V-1 |
| 5.1 Kesimpulan | V-1 |
| 5.2 Rekomendasi | V-1 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, pelaksanaan pembangunan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan pemerintah daerah, badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa mendatang. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Diamanatkan bahwa Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi: (1) penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan (2) menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025. Dengan demikian seluruh pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan evaluasi RKPD Tahun 2025.

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, sekaligus untuk mengetahui seberapa jauh capaian target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, dan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 368 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

1.2. Maksud

Maksud kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target

rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan gambaran realisasi capaian kinerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan dalam RKPD Tahun 2025;
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan dana kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025;
3. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Bab II Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

- 2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota
- 2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
- 2.4. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025

Bab III Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

- 3.1. Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dilengkapi dengan tabel Evaluasi Hasil RKPD)
- 3.3. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Bab IV Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

- 4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

Bab V Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan cara atau pendekatan yang dipilih untuk mencapai sasaran pembangunan oleh daerah. Pilihan strategi tidak dapat dilepaskan dari nilai dan prinsip dasar pembangunan yang menjadi komitmen daerah, antara lain:

1. Pembangunan berkelanjutan sebagai konsekuensi dari komitmen daerah konservasi yang mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, memperkuat kohesi sosial dan pengembangan ekonomi inklusif;
2. Pengembangan ekonomi berbasis potensi dan aset lokal, dengan mendorong pengelolaan sumberdaya alam untuk pengembangan penghidupan masyarakat, khususnya di perdesaan;
3. Kesetaraan gender dan inklusi sosial yang mendorong pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang ramah terhadap perempuan, laki-laki dan kelompok marginal.
4. Penguatan demokrasi melalui peningkatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tatakelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan nilai dan prinsip tersebut, maka strategi pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, yaitu pengelolaan dan pengembangan sumberdaya daerah secara inklusif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pengelolaan Sumberdaya yang menjadi pilihan dalam strategi pembangunan daerah, adalah:

1. Sumberdaya Manusia (SDM). Kualitas SDM sangat mempengaruhi kualitas pembangunan suatu daerah, sehingga pilihan strategi pembangunan daerah harus mampu mengarah pada upaya pemanfaatan dan peningkatan SDM lokal guna peningkatan produktifitas dan melahirkan inovasi-inovasi baru. SDM meliputi SDM di tingkat birokrasi maupun masyarakat yang dapat saling berkolaborasi dalam pembangunan daerah. SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa serta berintegritas tinggi, menjadi modal penting bagi Kabupaten Kuningan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
2. Sumberdaya Alam (SDA). Kabupaten Kuningan dikenal dengan potensi SDA yang luar biasa sehingga penting memanfaatkan kakayaan alam yang ada sebagai strategi untuk menjawab tantangan pembangunan yang saat ini masih dihadapi, khususnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Pertanian dan keasrian alam dengan dukungan hutan dan air terjun menjadi potensi penting yang dapat dikelola sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah maupun desa.

3. Modal Sosial dan Budaya. Karakteristik sosial dan budaya masyarakat masih sangat kuat di Kabupaten Kuningan. Solidaritas dan harmoni dalam balutan budaya masyarakat Sunda terbukti mampu menjadi modal sosial yang juga berkontribusi kuat dalam menggerakkan perekonomian. Salah satu contoh penting adalah urbanisasi yang digerakkan oleh modal sosial dan mampu menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Begitu juga dengan potensi budaya yang begitu beragam juga menjadi bagian penting yang belum optimal dimanfaatkan untuk pengembangan sektor wisata.
4. Jaringan/kemitraan. Pengalaman dalam membangun kemitraan Pentahelix yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata, antara pemerintah kabupaten, Swasta, Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Media penting untuk terus dikembangkan karena membawa pengaruh positif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan. Kemitraan ini dapat menjadi strategi dalam pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

Strategi pembangunan daerah harus mampu menggerakkan seluruh kekuatan atau potensi lokal yang ada guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 akan melakukan dua pilihan strategi atau pendekatan pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan berbasis sektoral. Pembangunan akan berfokus pada sektor-sektor strategis berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan untuk menjawab kebutuhan atau tantangan pembangunan. Berdasarkan data yang tersaji pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa pertanian dan pariwisata masih menjadi sektor penting yang banyak menggerakkan perekonomian daerah.
2. Pembangunan berbasis kewilayahan. Pembangunan akan berfokus pada pengembangan potensi yang ada di tiap desa atau kawasan dengan karakteristik yang beragam berdasarkan peta potensi yang ada. Pembangunan berbasis kewilayahan sangat penting dalam rangka mengatasi ketimpangan antar zona atau kawasan serta membangun karakteristik wilayah yang ada di Kabupaten Kuningan.

Pilihan strategi dan pendekatan yang tepat harus dilakukan untuk membangun Kabupaten Kuningan karena tantangan atau permasalahan yang dihadapi cukup rumit, terutama kemiskinan dan ketimpangan, serta ditambah dengan ruang fiskal yang terbatas. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal dalam skala industri penting untuk menjadi fokus guna percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan. Berikut adalah kerangka kerja pembangunan daerah yang akan dilakukan di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024-2026.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kuningan

Tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran

| No. | Tujuan | Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran |
|-----|---|---------|---|---|
| T1 | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah | | | Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten |
| | | | | Indeks Gini |
| | | S1 | Menurunnya Tingkat kemiskinan | Persentase penduduk miskin; |
| | | | | Jumlah Desa Rawan Pangan |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan |
| | | S2 | Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan | Jumlah Desa berstatus Mandiri |
| | | | | Jumlah Desa berstatus Maju |
| | | | | Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dan difasilitasi |
| | | | | |
| T2 | Membangun SDM Unggul dan Kompetitif | | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| | | | | S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | | S4 | Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga | Indeks Pendidikan |
| | | | | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan |
| | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan |
| | | | | Peningkatan Prestasi Olahraga |
| | | S5 | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
| | | | | Laju Pertumbuhan Penduduk |
| | | S6 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern: Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW)) |
| | | | | TFR (Angka Kelahiran Total) |
| | | | | i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga) |
| | | | | Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi) |
| | | | | ASFR (Angka Kelahiran Remaja) |
| | | | | MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) |
| | | | | |
| T3 | Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | | | Indeks Daya Saing Daerah |
| | | | | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) |
| | | S7 | Meningkatnya investasi daerah | Jumlah Nilai Investasi |
| | | | | Jumlah produk izin |
| | | S8 | Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |
| | | | | Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
| | | | | Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat |
| | | S9 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana | Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik |
| | | | | Akses Pelayanan Air minum |
| | | | | Akses Sanitasi Layak |

| | | | |
|----|---|-----|---|
| | | | Persentase Kemantapan jalan |
| | | | Persentase keselamatan konstruksi |
| | | | Persentase ketersediaan dokumen tata ruang |
| | | | Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan |
| | | | Persentase orang yang menggunakan angkutan umum |
| | | | Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani |
| | | | Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati) |
| | | | Persentase rumah layak huni |
| | | | Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani |
| | | | Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi |
| | | | Penanganan Sampah |
| | | | Pengurangan Sampah |
| | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
| | | | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) |
| | | | |
| T4 | Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | S10 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) |
| | | | PDRB sektor Pertanian |
| T5 | Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | S10 | Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan |
| | | | Kunjungan wisata |
| | | | Pembinaan Fasilitasi HAKI Ekonomi Kreatif |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifika |
| | | | |
| | | S11 | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | | Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | Indeks Profesionalitas ASN |
| | | | Indeks Sistem Merit |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| | | | Meningkatnya produk yang dihasilkan |
| | | | Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0 -18 |
| | | | Nilai LPPD Kabupaten di tingkat Provinsi/Nasional |
| | | | Opini Laporan Keuangan Daerah |
| | | S12 | Level SPIP |
| | | | Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) |
| | | | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan |
| | | | Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada |
| | | | Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu |
| | | S12 | Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama) |
| | | | Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan |

Kebijakan umum pembangunan daerah menggambarkan tujuan sasaran pembangunan berdasarkan sasaran yang dipilih dengan target capaian indikator

kinerja sasaran. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2024-2026, menetapkan rangkaian program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 202, disajikan pada tabel

Tabel 2.2. Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan

| Prioritas Nasional RKP 2025 | | Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025 | | Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025 Kab. Kuningan | | Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait |
|------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| PN1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | PPP1 | Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguanan Sistem Ketahanan Pangan Berkelaanjutan serta Pengembangan Pariwisata | PPD1 | Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Prioritas Nasional : PN3, PN4 ; Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3 |
| PN2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan | PPP2 | Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama | PPD2 | Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Prioritas Nasional : PN7; Prioritas Provinsi : PPP6 |
| PN3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | PPP3 | Penguatan Sistem Kesehatan Daerah | PPD3 | Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Prioritas Nasional : PN5, PN6 ; Prioritas Provinsi : PPP4, PPP5 |
| PN4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | PPP4 | Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | PPD4 | Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | Prioritas Nasional : PN 1 ; Prioritas Provinsi : PPP1 |
| PN 5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | PPP5 | Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | PPD5 | Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah | Prioritas Nasional : PN 2 ; Prioritas Provinsi : PPP4 |
| PN6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | PPP6 | Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | | | |
| PN7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | | | |

2.4 Prioritas Pembangunan Daerah 1 (PPD1) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

| Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2024 | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah/ Stakeholder |
|--|---|----------------------------|-------------|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------------------------|
| PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul kesehatan masyarakat dan Kompetitif | 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | a Indeks Kesehatan (Poin) | 83,78-84,24 | 1 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan | 1 Membangun desa sehat berbasis Masyarakat | 1 Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) | 244 | 1,738,374,855 | DINKES |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2024 | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah/ Stakeholder |
|------------------------------|---|--|-------------|---|--|---|---|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | 4 | Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Sertifikat) | 100 | 150,000,000 | DINKES |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga | a Indeks Pendidikan (Poin) | 61,68-61,96 | 1 Membangun sistem pendidikan masyarakat berbasis komunitas dan atau desa | 1 Pemenuhan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas | 1 Program pengelolaan pendidikan | APK SD/Paket A (Persen) | 100,02 | 61,620,000,000 | DISDIKBUD |
| | | b Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Persen) | 0,5 | 2 Pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan | 2 Membangun dan mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat | | APM SD/Paket A (Persen) | 99,91 | 61,620,000,000 | |
| | | c Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan (Orang) | 200 | 3 Peningkatan prestasi atlet secara terencana dan berkesinambungan | 3 Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan | | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Persen) | 1,9 | 80,210,000,000 | |
| | | d Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali) | 6 | | 4 Meningkatkan potensi pemuda dalam berwirausaha dan kepeloporan | | Percentase SD berakreditasi minimal B (Persen) | 97,60 | 124,800,000,000 | |
| | | | | | 5 Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga | | Percentase SD yang memenuhi SPM (Persen) | 100 | 124,800,000,000 | |
| | | | | | 6 Meningkatkan pembinaan dan pembibitan olahragawan | | Guru profesional di SD (Persen) | 59,30 | 552,500,000 | |
| | | | | | | | Jumlah SD Memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM (Rasio) | 1:06 | 552,500,000 | |
| | | | | | | | APK SMP/Paket B (Persen) | 99,52 | 83,135,000,000 | |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2024 | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah/ Stakeholder | |
|------------------------------|---------|----------------------------|-------------|----------|----------------|---|--|--|----------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | APM SMP/Paket B (Persen) | 93,65 | 83,135,000,000 | | |
| | | | | | | | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Persen) | 1,9 | 19,552,426,400 | | |
| | | | | | | | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Persen) | 1,8 | 19,552,426,400 | | |
| | | | | | | | Persentase SMP berakreditasi minimal B (Persen) | 85,10 | 150,000,000 | | |
| | | | | | | | Persentase SMP yang memenuhi SPM (Persen) | 100 | 44,418,720,000 | | |
| | | | | | | | Guru profesional di SMP (Persen) | 59,25 | 578,500,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah SMP mempunyai rasio guru terhadap siswa sesuai SPM (Rasio) | 1:06 | 1,690,000,000 | | |
| | | | | | | | APK PAUD usia 5-6 tahun (Persen) | 93,98 | 92,852,500,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah PAUD Holistik integratif (Unit) | 150 | 750,000,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga PAUD (Unit) | 920 | 32,500,000,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI | 55 | 14,657,500,000 | | |
| | | | | | | | Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga masyarakat rujukan (PKBM.Kursus.dan Pelatihan) (Lembaga) | 58 | 2,550,000,000 | | |
| | | | | | | | Rasio Penilik PAUD (Rasio) | 1:10 | 2,990,000,000 | | |
| | | | | | | 2 | Program pembinaan perpustakaan | Meningkatnya budaya baca dan pengelolaan perpustakaan (Persen) | 32,5 | 1,161,000,000 | DISARPUS |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2024 | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah/ Stakeholder | |
|------------------------------|---|----------------------------|--|----------|----------------|---|---|--|---------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | 3 | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (Persen) | 0,5 | 1,000,000,000 | DISPORAPAR |
| | | | | | | 4 | Program pengembangan kapasitas kepramukaan | Meningkatnya pengembangan Kapasitas Kepramukaan (orang) | 200 | 600,000,000 | DISPORAPAR |
| | | | | | | 5 | Program pengembangan daya saing keolahragaan | Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Medali) | 6 | 14,825,000,000 | DISPORAPAR |
| 3 | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | a | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin) | 87,02 | 1 | Pengarusutamaan gender melalui pendekatan berbasis sektoral dan kewilayahan | 1 Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender | Jumlah dokumen profil Gender (Dokumen) | 1 | 100,000,000 | DPPKBP3A |
| | | | | | | 2 | Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi | Jumlah Perempuan dalam Jabatan Struktural/Eksekutif yang dibina (Orang) | 50 | 600,000,000 | DPPKBP3A |
| | | | | | | | | Jumlah Perempuan dalam Politik yang dibina (Orang) | 200 | | |
| | | | | | | | | Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (OPD) | 28 | | |
| | | | | | | | | Jumlah anggota Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina (Orang (31 Kelp)) | 300 | | |
| | | | | | | | | Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina (Organisasi) | 39 | | |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2024 | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah/ Stakeholder | |
|------------------------------|------------------------------------|---|-------------|---|---|---|--|---|---------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | 3 | Program perlindungan perempuan | Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang) | 30 | 300,000,000 | DPPKBP3A |
| | | | | | | 4 | Program peningkatan kualitas keluarga | Jumlah Desa responsif perempuan dan anak (Desa) | 3 | 500,000,000 | DPPKBP3A |
| | | | | | | 5 | Program pemenuhan hak anak (PHA) | Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina (Forum Anak) | 22 | 250,000,000 | DPPKBP3A |
| | | | | | | 6 | Program perlindungan khusus anak | Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang) | 34 | 450,000,000 | DPPKBP3A |
| 4 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | a Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) | 1,28 | 1 Pengendalian fertilitas | 1 Meningkatkan pelayanan keluargaberencana dan kesehatan reproduksi | 1 | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun) | 20 | 1,473,200,000 | DINSOS |
| | | b MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW)) (Persen) | 67,24 | 2 Peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan | 2 Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan keluarga | | | Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor (Kelompok) | 125 | | DPPKBP3A |
| | | c TFR (Angka Kelahiran Total) (Anak) | 2,30 | | | | | Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD (Institusi) | 250 | | DPPKBP3A |
| | | d i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga) (Poin) | 52,73 | | | 2 | Program pembinaan keluarga berencana (KB) | Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB (Fasilitas) | 119 | 150,000,000 | DPPKBP3A |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Satuan) | Target 2024 | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah/ Stakeholder |
|------------------------------|---------|--|-------------|----------|----------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | e Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi) (Persen) | 20,76 | | | | Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevelence Rate (CPR) (Persen) | 67,24 | 150,000,000 | |
| | | f ASFR (Angka Kelahiran Remaja) (Orang (Kehadiran)) | 17 | | | | Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) | 20,76 | 150,000,000 | |
| | | g MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun) | 20 | | | | Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 32,03 | 2,202,500,000 | |
| | | | | | | 3 Program pengendalian penduduk | GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan (Dokumen) | 1 | 1,150,000,000 | DPPKBP3A |
| | | | | | | | Jumlah sekolah formal/non formal yang melakukan pendidikan kependudukan (Sekolah) | 5 | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Data Paripurna (Rumah Data) | 10 | | |
| | | | | | | | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Desa) | 376 | | |
| | | | | | | | Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Keluarga (Petugas KB ASN) | 75 | | |
| | | | | | | | TOTAL ANGGARAN | | 1,451,435,275,439 | |

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka penentuan Tujuan dan Sasaran harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, beserta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 memuat 5 (lima) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Kuningan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD dengan mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan pertama dari RPD Kabupaten Kuningan 2024-2026, dengan arah kebijakan pembangunan di Tahun 2025 yaitu **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan tema “**Mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah**”. Arah kebijakan kewilayah di Kabupaten Kuningan berfokus pada pengembangan potensi yang ada di setiap desa atau kawasan dengan karakteristik yang beragam berdasarkan peta potensi yang ada. Pembangunan berbasis kewilayah sangat penting dalam rangka mengatasi ketimpangan antar zona atau kawasan serta membangun karakteristik wilayah yang ada di Kabupaten Kuningan juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan regional Jawa Barat dan kebijakan nasional serta memperkuat program strategis berskala kewilayah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di Kabupaten Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi pada tahun 2025 yang perlu dipecahkan bersama, antara lain:

a) Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan masih berada di atas rata-rata Jawa Barat. Angka kemiskinan untuk tahun 2024 sebesar 11,88%. Hal ini perlu upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh dari semua *stakeholder* yang ada.

Kemiskinan bukan hanya persoalan pemerintah daerah, kemiskinan bisa dientaskan jika semua pihak peduli. Segenap instansi terkait bersama segenap stakeholder harus dapat saling bergerak bersama menekan jumlah kemiskinan di kuningan. Rumah tangga dikatakan miskin apabila:

- 1) luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
- 2) lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- 3) dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
- 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
- 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
- 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan;
- 13) pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
- 14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Secara teknokratis, dalam penanggulangan kemiskinan ini dipandang perlu dilakukan penguatan pendapatan individu yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi usaha kecil dan mikro (UKM) yang relatif sesuai dengan tipikal penduduk lapisan bawah.

b) Pembangunan Manusia

Apabila memperhatikan disparitas capaian IPM beserta komponen-komponennya antar kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi Kabupaten Kuningan secara umum masih mengungguli kabupaten di Wilayah III Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan – Ciayumajakuning), IPM Kabupaten Kuningan tahun 2024 sebesar 71,56.

Dari sekian komponen indikator pendukung IPM yang perlu mendapat perhatian khusus adalah rata-rata lama sekolah yang masih berkisar pada 7,90 tahun.

c) Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 570.023 orang. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 50.365 orang. Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Kuningan, mencapai 618.129 orang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 43.960 orang.

Tabel Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Menurut Status Kentenagakerjaan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2023

| Tahun | Bekerja | Pengangguran | Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | TPAK |
|-------|---------|--------------|----------------|----------------------|---------|-------|
| 2021 | 479.405 | 63.377 | 542.782 | 307.770 | 830.552 | 68,62 |
| 2022 | 478.750 | 52.075 | 530.825 | 328.136 | 858.961 | 61,80 |
| 2023 | 519.658 | 54.511 | 574.169 | 352.617 | 926.786 | 61,95 |
| 2024 | 570.023 | 48.511 | 618.129 | 320.717 | 926.786 | 65,84 |

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

d) Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Angka ini berguna untuk mengetahui tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah

di suatu wilayah tentunya akan semakin tinggi kualitas manusia secara makro ditinjau dari dimensi pengetahuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) diterjemahkan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Angka ini dapat digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, Tahun 2021 - 2024 Kabupaten Kuningan

| URAIAN | TAHUN | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Harapan Lama Sekolah | 12,23 | 12,24 | 12,26 | 12,27 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | 7,80 | 7,88 | 7,89 | 7,90 |

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

e) Kesehatan

Upaya meningkatkan dimensi umur panjang dan sehat dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia, dapat dimulai dari faktor kualitas khususnya kualitas kesehatan manusia yang dilahirkan (keturunan), keadaan lingkungan, serta pelayanan kesehatan. Faktor kualitas kesehatan manusia yang dilahirkan dapat dilihat dari indikator ratarata umur kawin pertama. Pernikahan usia muda akan meningkatkan risiko perempuan mengalami gangguan reproduksi, gangguan kehamilan, serta gangguan persalinan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas kesehatan manusia yang dilahirkan. Faktor lingkungan dapat digambarkan melalui ketersediaan sarana sanitasi yang memadai, yang dapat dilihat melalui indikator kepemilikan jamban serta penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta indikator sumber air minum yang digunakan. Apabila lingkungan tempat tinggal dalam kondisi sehat maka diharapkan dapat menjadi salah satu modal untuk meningkatkan dimensi umur panjang dan sehat.

Pelayanan kesehatan dalam hal ini ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilihat dari seberapa besar desa yang memiliki sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Sarana kesehatan yang digunakan masyarakat sebagai tempat untuk mengobati keluhan kesehatan serta tersedianya tenaga kesehatan yang

memadai akan menunjang derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik yang pada akhirnya akan meningkatkan dimensi umur panjang dan sehat.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2024

| INDIKATOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Usia Harapan Hidup | 73,78 | 74,03 | 74,91 | 75,22 |

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui intervensi dengan sederetan program untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya tampak telah membawa hasil yang cukup menggembirakan walaupun kenaikannya tidak begitu besar. Ini terlihat dari kecenderungan meningkatnya besaran Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) selama kurun waktu 2021-2024, dari tahun 2021 sebesar 73,78 ke tahun 2022 sebesar 74,03 meningkat 0,25 tahun dalam kurun waktu 2023 sebesar 74,91 sampai dengan 2024 sebesar 75,22, mengalami peningkatan sebesar 0,31.

f) Perekonomian

Berbagai kebijakan makro ekonomi yang diarahkan pada upaya untuk mendorong secara simultan, peningkatan kinerja kategori riil maupun moneter harus tetap dikembangkan. Indikator yang kerap digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan bidang ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik yang dihitung dari sisi produksi dan penggunaan serta disajikan atas dasar harga berlaku (*current price*) dan harga konstan (*constan price*).

Dengan diketahuinya nilai PDRB diharapkan dapat dijadikan dasar oleh pengambil keputusan untuk :

1. Penyediaan data ekonomi makro bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Menggambarkan derajat kesenjangan masyarakat.
3. Memperlihatkan pergeseran aktivitas perekonomian masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan dua faktor di atas menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah.

Secara makro besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,61%, atau dari semula sebesar Rp 32.544,89 miliar menjadi Rp 35.535,77 miliar. Perkembangan PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku belum dapat dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Kuningan (kinerja perekonomian), karena pada besaran PDRB tersebut masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa atau pertumbuhan ekonomi secara makro umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan.

Dari hasil perhitungan, BPS mencatat PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 mencapai Rp 19.418,73 miliar dan menjadi Rp 20.507,27 miliar pada tahun 2024. Kondisi tersebut merupakan indikasi *quantum* (volume) produk barang/jasa secara umum perekonomian Kabupaten Kuningan secara makro mengalami percepatan dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 5,61%. Besaran peningkatan PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan tersebut yang kerap dipakai sebagai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021–2024

| Lapangan Usaha | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---|----------|----------|----------|----------|
| A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6.435,08 | 7.026,81 | 7.723,37 | 8.253,92 |
| B Pertambangan dan Penggalian | 369,59 | 375,77 | 407,76 | 419,64 |
| C Industri Pengolahan | 610,72 | 663,71 | 719,05 | 805,34 |
| D Pengadaan Listrik & Gas | 25,49 | 27,32 | 28,79 | 27,63 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 28,56 | 30,01 | 31,11 | 36,69 |
| F Konstruksi | 2.342,69 | 2.533,80 | 2.750,90 | 2.868,04 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.785,58 | 4.106,71 | 4.424,73 | 4.773,35 |
| H Transportasi dan Pergudangan | 3.673,81 | 4.353,13 | 5.194,09 | 6.276,13 |
| I Penyediaan akomodasi dan Makan Minum | 484,72 | 568,47 | 641,89 | 692,77 |
| J Informasi dan Komunikasi | 1.154,70 | 1.211,23 | 1.306,64 | 1.483,02 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.557,61 | 1.667,16 | 1.789,77 | 1.913,27 |
| L Real Estate | 732,08 | 798,74 | 865,88 | 913,01 |
| M.N Jasa Perusahaan | 123,82 | 145,33 | 161,89 | 156,32 |
| O Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 932,41 | 919,34 | 958,83 | 1.045,15 |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| P | Jasa Pendidikan | 3.374,44 | 3.638,16 | 3.924,13 | 4.127,25 |
| Q | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 440,21 | 473,30 | 514,21 | 521,23 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 847,6 | 980,84 | 1.101,86 | 1.223,00 |
| | PDRB | 26.919,10 | 29.519,83 | 32.544,89 | 35.535,77 |

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Tabel
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021–2024**

| | Lapangan Usaha | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.675,49 | 3.812,90 | 3.894,39 | 3.644,68 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 245,14 | 243,51 | 245,97 | 262,35 |
| C | Industri Pengolahan | 430,15 | 453,98 | 475,00 | 502,71 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 16,77 | 17,36 | 17,90 | 19,20 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 17,36 | 17,85 | 18,36 | 20,81 |
| F | Konstruksi | 1.534,20 | 1.579,41 | 1.659,77 | 1.709,76 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2751,05 | 2.862,89 | 2.982,16 | 2.991,73 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2.293,42 | 2.580,10 | 2.837,97 | 3.403,93 |
| I | Penyediaan akomodasi dan Makan Minum | 310,70 | 349,94 | 374,25 | 395,07 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.223,60 | 1.304,80 | 1.402,17 | 1.655,75 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 903,64 | 894,50 | 936,16 | 974,68 |
| L | Real Estate | 618,42 | 653,07 | 695,21 | 770,49 |
| M.N | Jasa Perusahaan | 82,81 | 92,48 | 98,86 | 91,96 |
| O | Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 531,67 | 525,34 | 538,67 | 566,57 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.896,95 | 2.020,36 | 2.130,30 | 2.280,56 |
| Q | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 314,78 | 333,66 | 350,25 | 372,65 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 636,86 | 708,17 | 761,35 | 844,38 |
| | PDRB | 17.483,02 | 18.450,34 | 19.418,73 | 20.507,27 |

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Apabila disimak tabel di atas, seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori andalan atau kategori yang memberi sumbangan terbesar adalah pertanian, dimana pada tahun 2024 kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 8.253,92 miliar, Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Kuningan

masih tampak didominasi oleh kategori pertanian. Hal ini terlihat dari sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Kuningan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian (hampir mencapai 3/4 dari total luas wilayah Kabupaten Kuningan).

PDRB Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan.

Nilai PDRB Kabupaten Kuningan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 26.919 ribu rupiah. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 29.519 ribu rupiah, pada tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 32.544 ribu rupiah dan ditahun 2024 mencapai 35.535 ribu rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran bisa dilihat pada tabel dibawah.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2024 (ribu rupiah)

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| PDRB Perkapita ADHB | 26.919,10 | 29.519,83 | 32.544,89 | 35.535,77 |

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*): Angka Pebaikan, **): Angka Sementara

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahaan dan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset

daerah pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dalam Lampiran 1)

3.4. Capai Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 dan Tujuan, Sasaran Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 - 2026

Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan tahun 2022 menggunakan data dari data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk tahun 2023 capaianya baru beberapa yang sudah ada data namun data tersebut baru sangat sementara, bisa dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.2.2 Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target/Capaian | | | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|--|--|--------------------------------------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Target 2024 | Capaian 2024 | Target RKP2025 | Capaian 2025 | Target 2026 | |
| T1 | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah | | Indeks Gini | Poin | 0,336 | 0,379 | 0,340 - 0,347 | | 0,328 | 0,328 |
| | | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan | Indeks Desa Membangun | Poin | 0,764 | 0,7936 | 0,783 | | 0,793 | 0,793 |
| | | Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat | Percentase Penduduk Miskin (%) | Per센 | 11,12-12,72 | 11,88 | 10,42 - 11,50 | | 10,68-12,98 | 10,68-12,98 |
| | | | Pengeluaran per kapita | Ribu | 9.933 | 10.418 | 10.071 | | 10.210 | 10.210 |
| | | Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman | Percentase rumah tangga hunian layak | Per센 | 97,54 | 96,42 | 97,54 | | 97,94 | 97,94 |
| T2 | Membangun SDM Unggul dan Kompetitif | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 71,28 | 71,56 | 71,79 | | 72,31 | 72,31 |
| | | Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,68 | 7,90 | 12,37 | | 12,89 | 12,89 |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8 | 7,9 | 7,91 | | 8,18 | 8,18 |
| | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup | Tahun | 74,6 | 75,22 | 75,27 | | 75,08 | 75,08 |
| | | | Prevalensi Stunting | Per센 | 16 | 7,9 | 7,9 | | 14 | 14 |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 87,49 | 88,00 | 88 | | 88,01 | 88,01 |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target/Capaian | | | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|---|--|---|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Target 2024 | Capaian 2024 | Target RKP2025 | Capaian 2025 | Target 2026 | |
| | | Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,28 | 1,04 | 1,04 | | 1,24 | 1,24 |
| T3 | Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) | Poin | 3,46 | 3,82 | 3,82 | | 3,56 | 3,56 |
| | | | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | Poin | 130 | 141,55 | 129 | | 128 | 128 |
| | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 65,98 | 72,05 | 68,16 | | 66,58 | 66,58 |
| | | Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon dan Menurunnya Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana | Poin | 129 | 141,55 | 129 | | 128 | 128 |
| | | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Pelayanan Infrastruktur | Tingkat Konektivitas | Persen | 86 | 82,352 | 82,352 | | 87,79 | 87,79 |
| | | | Tingkat kemantapan jalan | | | | | | | |
| T4 | Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 5,16-5,66 | 5,61 | 5,61 | | 5,66-5,76 | 5,66-5,76 |
| | | Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang Disertai dengan Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 8,51-9,21 | 7,78 | 7,78 | | 8,13-8,89 | 8,13-8,89 |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum PDRB /Pariwisata | Persen | 1,75-1,92 | 1,95 | 1,95 | | 1,75-1,96 | 1,75-1,96 |

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target/Capaian | | | | | Kondisi Akhir RPD |
|-----|---|---|-------------------------------------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Target 2024 | Capaian 2024 | Target RKP2025 | Capaian 2025 | Target 2026 | |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Laju pertumbuhan Sektor Industri | Persen | 2,31 | 5,83 | 5,83 | | 2,34 | 2,34 |
| | | | Laju Pertumbuhan sektor perdagangan | persen | 4,83 | 0,32 | 0,32 | | 4,85 | 4,85 |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan | Nilai Tukar Petani (NTP) | Poin | 104,91 | 113,86 | 113,86 | | 105,52 | 105,52 |
| | | | Kontribusi Sektor Pertanian | Persen | 7,93 | 23,56 | 23,56 | | 8,36 | 8,36 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan | Poin | 87,01 | 93,8 | 93,8 | | 89,03 | 89,03 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| T5 | Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor | CC | BB | B | | B | B |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | 85,7 | 84,5 | 86,4 | | 87,1 | 87,1 |
| | | Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Skor | CC | BB | B | | B | B |
| | | Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan | Indeks Inovasi Daerah | Poin | 45,03 | 29,82 | 53,76 | | 62,49 | 62,49 |

3.5. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana sesuai tabel di bawah:

Tabel 3.2.3 Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2025

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|---|---|--|---|--|--|
| PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia | | | | | | | |
| 1 | Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia | 1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi negara serta menguatnya karakter kebangsaan masyarakat (Persen) |
| | | 2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Tersampaikannya Informasi Pembangunan Daerah (Persen) |
| PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | | | | | | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| 1 | Keamanan siber, sandi, dan sinyal | Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (OPD) | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (OPD) |
| | | Fasilitasi business matchmaking startup digital | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Aplikasi Informatika | Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen) |
| | | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program Pengembangan UMKM | PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Peningkatan jumlah UKM Binaan (Unit Usaha) | |
| | | Fasilitasi digital <i>technopreneur</i> | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Aplikasi Informatika | Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program Pengembangan UMKM | PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Peningkatan jumlah UKM Binaan (Unit Usaha) |
| | | | Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen) |
| | | | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Tersedianya prasarana pertanian (Unit) |
| 2 | Peningkatan kualitas lingkungan | Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya | PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | Program Pengelolaan Persampahan | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Pengelolaan Sampah | Penanganan Sampah (Persen) dan Pengurangan Sampah (Persen) |
| 3 | Swasembada pangan, energi, dan air | Peningkatan produktivitas | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis | Program Penyediaan dan | PPD4 : Peningkatan | | Tersedianya sarana pertanian (Unit) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|----------------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan | Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Pengembangan Sarana Pertanian | Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Meningkatnya populasi ternak besar dan ternak kecil (Ekor) |
| | | Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun dari Waduk Kuningan (Daerah Irigasi Cileuweung) | PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Tersedianya prasarana pertanian (Unit) |
| | | Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Waduk Kuningan | PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA (Persen) |
| | | Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Tersedianya sarana pertanian (Unit) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | | | | |
| PN. 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | | | | | | | |
| 1 | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur | Pengembangan Kertajati Aerocity | PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase ketersediaan dokumen tata ruang (Persen) |
| | | Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk) |
| | | Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|----------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang) |
| | | Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan game | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Aplikasi Informatika | Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Orang) |
| | | Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Aplikasi Informatika | Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|----------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan (Kab. Kuningan) | PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | Program Penyelenggaraan Jalan | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Kemantapan jalan (Persen) |
| | | Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA (Persen) |

PN 04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi | Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah | PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama | Program Pengelolaan Pendidikan | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Persen) |
| | | | | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Persen) |
| | | | | | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Persen) |
| | | | | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Persen) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|----------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | kejuruan/madrasah aliyah/sederajat | | | | | |
| | | Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan | PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (Persen) |
| | | Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran | PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Jumlah Perempuan dalam Jabatan Struktural/Eksekutif yang dibina (Orang) |
| | | | | | | | Jumlah Perempuan dalam Politik yang dibina (Orang) |
| | | | | | | | Jumlah anggota Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina (Orang (31 Kelp)) |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina (Organisasi) |
| | | | | Program Perlindungan Perempuan | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Perlindungan Perempuan | Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Jumlah Desa responsif perempuan dan anak (Desa) |
| | | | | Program pemenuhan hak anak (PHA) | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program pemenuhan hak anak (PHA) | Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina (Forum Anak) |
| | | | | Program perlindungan khusus anak | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program perlindungan khusus anak | Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang) |
| | Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di kabupaten/kota | PPP3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Percentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen) | Percentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen) |
| | | | | | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|--|---------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Fasilitasi literasi digital | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Aplikasi Informatika | Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen) |
| 2 | Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Penurunan kematian ibu dan bayi | PPP3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terpenuhi (Persen) |
| | | | | | | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) |
| | | Pembangunan kualitas keluarga | PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama | Program Pengendalian Penduduk | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Pengendalian Penduduk | GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan (Dokumen) |
| | | | | | | | Jumlah sekolah formal/non formal yang melakukan pendidikan kependudukan (Sekolah) |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Data Paripurna (Rumah Data) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Desa) |
| | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Keluarga (Petugas KB ASN) |
| | | | | | | | Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevelence Rate (CPR) (Persen) |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB (Fasilitas) |
| | | | | | | | Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) |
| | | | | | | | Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) |
| | | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan | PPD 3 : Peningkatan SDM | Program Pemberdayaan dan Peningkatan | MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | | | | Keluarga Sejahtera (KS) | Unggul dan Kompetitif | Keluarga Sejahtera (KS) | Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor (Kelompok) |
| | | | | | | | Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD (Institusi) |
| PN 05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru | Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program perencanaan dan pembangunan industri | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program perencanaan dan pembangunan industri | Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen) |
| | | Hilirisasi industri kelapa | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah | Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|--|---|--|--|---|--|---|---|
| 2 | Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional | Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program perencanaan dan pembangunan industri | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program perencanaan dan pembangunan industri | Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen) |
| | | Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program perencanaan dan pembangunan industri | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program perencanaan dan pembangunan industri | Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen) |
| | | Pengembangan industri elektronik dan digital | PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | Program perencanaan dan pembangunan industri | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program perencanaan dan pembangunan industri | Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen) |
| PN 06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | | | | | | | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|---|--|--|---|--|---|---|
| 1 | Pemerataan ekonomi | Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola | PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | Program Pengembangan Perumahan | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Pengembangan Perumahan | Terlaksananya Perbaikan rumah bagi korban bencana dan Pembangunan PSU yang terdampak bencana (Unit) |
| | | Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh | PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa | Program Kawasan Permukiman | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Kawasan Permukiman | Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh (Ha) |
| PN 07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan | | | | | | | |
| 1 | Membangun <i>Single Identity Number</i> dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base | Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis <i>online single submission</i> dan mal | PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Program Aplikasi Informatika | Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen) |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|---|---|---|--|---|--|
| | Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu | pelayanan publik digital | | | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Media informasi perizinan dan nonperizinan (Media) |
| PN 08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | | | | | | | |
| 1 | Masyarakat adil, makmur, dan harmonis | Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan | PPP4 : Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | Program Penanggulangan Bencana | PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul | Program Penanggulangan Bencana | Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dokumen) |
| | | | | | | Program Penanganan Bencana | Penyelenggaraan Penanganan Bencana (Dokumen) |

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan periode 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi.

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026. Guna mencapai sasaran tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari seluruh program perangkat daerah Tahun 2025 dipilih program-program yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan sekaligus dalam rangka mewujudkan program Jabar Juara. Program-program yang telah dipilih selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Konsep pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini menggunakan konsep Integrasi, Inovatif, Kolaboratif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, kemudian dikembangkan ke dalam konsep struktur ruang kawasan pengembangan polysentric smart region merupakan struktur ruang yang didalamnya terdapat kawasan perkotaan inti (Growth Pole) dan kawasan perkotaan sekitarnya (Growth Foundation). Growth Pole di Kawasan Rebana adalah Kertajati Aerocity, Kota Baru Patimban, dan Kota Cirebon yang saling meningkatkan kualitas dan daya saing dari masing-masing wilayah. Untuk Growth Foundation di Kawasan Rebana terdiri dari pengembangan 13 kawasan peruntukan industri (KPI) dan 20 sentra industri Kecil Menengah (SIKM) yang ada

di Kawasan Rebana.Dalam pengembangan industri di kawasan Rebana perlu adanya insentif dari pemerintah untuk perusahaan di kawasan rebana yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga proyek pembangunan yang ternaungi dalam perpres Rebana dapat bermanfaat bagi pengembangan wilayah di kawasan Rebana, terutama Kabupaten Kuningan.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja. Faktor pendorong pencapaian target-target kinerja tersebut, antara lain yaitu:

- a) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- b) Penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja, (Aplikasi pada perencanaan SIPD, Aplikasi satadaku dan lain-lain).
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d) Keadaan geografis Kabupaten Kuningan yang mendukung potensi pertanian dan pariwisata yang akan mendongkrak sektor perekonomian masyarakat dan menjadi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan antara lain:

- a) Lemahnya/ kekurang pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait.
- c) Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/ provinsi.
- d) Rendahnya kapasitas fiskal APBD Kabupaten Kuningan.

4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

- a) Dokumen Perencanaan (Renja, Renstra, RKPD, RPJMD/RPD) diharapkan menjadi acuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.
- b) Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara triwulanan terhadap capaian indikator kinerja yang ada pada dokumen perencanaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Semua Program yang tercantum dalam RPD, merupakan tahap pertama sehingga proses pelaksanaan Pembangunan Daerah diharapkan sesuai dengan Perencanaan;
2. Masih terdapat indikator kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke dua periode RPD 2024-2026 dan dilanjutkan pada tahun 2025.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antara APBD dengan RKPD maka penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD perlu memperhatikan Renja Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan terkait.
3. Perlu dilakukan pengendalian secara intensif dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD sehingga selaras dengan RKPD.

L A M P I R A N

EVALUASI terhadap HASIL RKPD
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------|--------|----------------|----------------|
| 1.01.02.2.28 | Pembinaan Kembangaman dan Manajemen Sekolah | | 100.000.000 | 1.075.000.000 | 210.000.000 | | | | | | 210.000.000 | 19.53 | 310.000.000 | |
| 1.01.02.2.29 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | 99.079.844.400 | 93.864.870.000 | | | | | | | | | 99.079.844.400 | |
| 1.01.02.2.31 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | 75.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.47 | Rehabilitasi Ruang Kelas Baru | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.48 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | - | 541.591.562 | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.50 | Penyelenggaran Proses Belajar Raudah Peserta Didik | | 75.000.000 | | 1.203.896.754 | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.51 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | 62.527.992.943 | | 1.300.000.000 | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.52 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Meningkat Pertama | 78.685.858.822 | 57.672.640.893 | 653.634.853 | | | | | | | 653.634.853 | 1,13 | 71.339.493.675 | |
| 1.01.02.2.57 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 19.943.819 | | | | | | | | | | | | 19.943.819 |
| 1.01.02.2.58 | Pembangunan Ruang Untuk Kesehatan Sekolah/TU | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.59 | Pembangunan Ruang Untuk Kesehatan Sekolah | | - | 200.000.000 | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.60 | Pembangunan Perustakan Sekolah | | 407.085.025 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.62 | Pembangunan Laboratorium | | 400.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.63 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.054.806.003 | 1.054.806.003 | | | | | | | | | | | 1.054.806.003 |
| 1.01.02.2.64 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 21.061.749.000 | 4.676.505.847 | 403.634.853 | | | | | | | 403.634.853 | 8,63 | 22.065.383.853 | |
| 1.01.02.2.65 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.66 | Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.67 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakan Sekolah | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.68 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.69 | Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah/Prajaran dan Utilitas Sekolah | | 250.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.70 | Pengadaan Mebel Sekolah | 100.000.000 | 349.759.030 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.71 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.72 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Tuisya | 2.100.000.000 | 175.000.000 | | | | | | | | | | | 2.100.000.000 |
| 1.01.02.2.73 | Penyelenggaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.74 | Pembinaan Mutu, Bakat dan Kreativitas Siswa | 100.000.000 | | 175.000.000 | 175.000.000 | | | | | | 175.000.000 | 100,00 | 275.000.000 | |
| 1.01.02.2.75 | Penyelenggaran Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah Meningkat Pertama | 250.000.000 | | 75.000.000 | 75.000.000 | | | | | | 75.000.000 | 100,00 | 325.000.000 | |
| 1.01.02.2.76 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.77 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meningkat pada Satuan Pendidikan Sekolah Meningkat Pertama | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.78 | Pembinaan Kembangaman dan Manajemen Sekolah | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.79 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Meningkat Pertama | 44.999.360.000 | 44.446.409.000 | | | | | | | | | | | 44.999.360.000 |
| 1.01.02.2.80 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Meningkat Pertama | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.81 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.82 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kapela Sekolah | | 250.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.83 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah | | 500.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.84 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | 500.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.85 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | 30.895.286.000 | 26.125.096.757 | | | | | | | | | | 30.895.286.000 |
| 1.01.02.2.86 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | 92.578.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.87 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | 100.000.000 | 704.590.757 | | | | | | | | | | 100.000.000 |
| 1.01.02.2.88 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Guru PAUD | | 0 | 591.586.937 | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.89 | Pembangunan Baan Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.90 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.91 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 19.644.777.000 | 20.275.088.000 | | | | | | | | | | 19.644.777.000 |
| 1.01.02.2.92 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | | 1.266.617.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.93 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendekar Nonformal/Kesetaraan | | 3.150.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.94 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal/Kesetaraan | | 200.000.000 | 1.500.000.000 | | | | | | | | | | 200.000.000 |
| 1.01.02.2.95 | Pengembangan Kain Pendekar dan Tenaga Kependidikan | | 3.150.000.000 | | | | | | | | | | | 3.150.000.000 |
| 1.01.02.2.96 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | 1.450.000.000 | 2.293.610.000 | | | | | | | | | | 700.000.000 |
| 1.01.02.2.97 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | 22.293.610.000 | 31.578.280.000 | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.98 | Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Dana BOP PAUD | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.2.99 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.00 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | 1.266.617.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | 1.450.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Guru PAUD | | 15.238.160.000 | 18.625.698.000 | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.04 | Pengembangan Kain Pendekar dan Tenaga Kependidikan | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.05 | Pengembangan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.06 | Pengembangan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.07 | Pengembangan Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal/Kesetaraan | | 200.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.08 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | 300.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.09 | Pembinaan Kembangaman dan Manajemen Sekolah | | 2.640.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | 1.450.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.11 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | 15.238.160.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.12 | Pengembangan Kain Pendekar dan Tenaga Kependidikan | | 300.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.13 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | 2.640.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.14 | Pengembangan Kain Pendekar dan Tenaga Kependidikan | | 3.150.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.15 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | 700.000.000 | 1.450.000.000 | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.16 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah | | 22.293.610.000 | 31.578.280.000 | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.17 | Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.18 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.19 | Pembangunan Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.20 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.21 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.22 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.23 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.24 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.25 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.26 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.27 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.28 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.29 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.30 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.31 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.32 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.33 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.34 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.35 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.36 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.37 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.38 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.39 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.40 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.41 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.42 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.43 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.44 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.45 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.46 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.47 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.48 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.49 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.50 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.51 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.52 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.3.53 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung/Kebudayaan | | 100.000. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|--|--|----------------|-------------|--|
| 1.02.02.2.0.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rantau Bahu Laut | 28.100.000 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.100.000 | |
| 1.02.02.2.0.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Baitta | 219.515.000 | 266.415.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219.515.000 | |
| 1.02.02.2.0.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendekatan Masa | 50.000.000 | 660.461.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | |
| 1.02.02.2.0.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Masa | 100.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 30.000.000 | 83.389.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada pendekatan Lansia | 28.100.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.100.000 | | |
| 1.02.02.2.0.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada pendekatan Diabetes Mellitus | 1.750.539.976 | 60.811.296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.750.539.976 | #DIV/0! | |
| 1.02.02.2.0.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Chang Dengan Ciri-ciri, Iives Rezvi | 40.000.000 | 219.045.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tertua Tidak Bisa Berdiri | 1.317.756.400 | 457.483.764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.317.756.400 | | |
| 1.02.02.2.0.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terbatas (LTC) | 324.159.100 | 174.537.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 324.159.100 | | |
| 1.02.02.2.0.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pendukung Kondisi Keadaan Luar Biasa (KLB) | 0 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pendukung Kondisi Keadaan Luar Biasa (KLB) - Aktivitas Bersemasa Berlangsung | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.2.0.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 635.456.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 635.456.000 | | |
| 1.02.02.2.0.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 35.000.000 | 435.560.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1.314.525.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.314.525.000 | | |
| 1.02.02.2.0.18 | Pembentukan Pemranti Kesehatan | 311.785.600 | 439.622.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 311.785.600 | | |
| 1.02.02.2.0.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Ajuhan Mardini dan Tadrisipati Lepraria | 50.000.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.20 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 87.180.000 | 990.851.407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.180.000 | | |
| 1.02.02.2.0.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Miskin Kesehatan Jawa (OPMK) | 0 | 289.243.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.2.0.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jawa dan NAPZA | 53.170.000 | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.170.000 | | |
| 1.02.02.2.0.23 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khawatir | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.2.0.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 0 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.2.0.25 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2.991.374.290 | 4.173.676.487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.991.374.290 | | |
| 1.02.02.2.0.26 | Penerapan Jamuan Kesehatan Masjidifat | 63.014.882.734 | 75.504.849.346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.014.882.734 | | |
| 1.02.02.2.0.27 | Diklat dan Pelatihan NAPZA di Puskesmas dan sekolah | 42.150.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.150.000 | | |
| 1.02.02.2.0.28 | Pengelolaan dan Pengurusan Spesimen Penyakit Penyebab KLB dan Jelaskan Biakan Neoskop | 63.452.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.452.000 | | |
| 1.02.02.2.0.29 | Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan | 35.000.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.30 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 2.440.031.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.2.0.31 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 535.470.750 | 105.801.734 | 5.131.673 | | | | | | | | | | | | | 5.131.673 | 1.01 | | | 540.702.423 | | |
| 1.02.02.2.0.32 | Operasional Antradesa Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.33 | Intervensi dan Pengawasan terhadap Kegiatan Tidak Dianugerahi Awas Kejadian Tidak Dianugerahi (Kejadian Kutan Pasca Invasi dan Pemerintah Chel Messai) | 14.990.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.990.000 | | |
| 1.02.02.2.0.34 | Pengelolaan Pelayanan Kehamilan Diri dan Respon Wabah | 28.400.000 | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.400.000 | | |
| 1.02.02.2.0.35 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang bergerak | 28.856.988 | 65.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.856.988 | | |
| 1.02.02.2.0.36 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV/AIDS | 13.450.000 | 65.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.450.000 | | |
| 1.02.02.2.0.37 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 15.708.000 | 65.880.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.708.000 | | |
| 1.02.02.2.0.38 | Pengelolaan Pelayanan Kreatif Kesehatan Reproduksi | 7.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.2.0.39 | Pengelolaan Pelayanan Kehamilan Diri | 1.004.806.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.004.806.000 | | |
| 1.02.02.2.0.40 | Pengelolaan Pelayanan Kehamilan Diri dan Respon Wabah | 435.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 435.200.000 | | |
| 1.02.02.2.0.41 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 165.000.000 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.42 | Pengelolaan dan Pengawasan serta Tindak Larang Pengawas Perizinan Rumah Sakit Kelas C, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.2.0.43 | Pengelolaan dan Pengawasan serta Tindak Larang Pengawas Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 204.269.900 | 117.414.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204.269.900 | | |
| 1.02.02.2.0.44 | Peningkatan Mutu dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.45 | Peningkatan Mutu dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 45.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.46 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESERDAMAN | 5.894.593.800 | 40.000.000 | 117.414.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.000.000 | | |
| 1.02.02.2.0.47 | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 5.894.593.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.3.0.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UPT dan UPTD di Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 117.414.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.000.000 | #DIV/0! | |
| 1.02.02.3.0.02 | Pembentukan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.000.000 | | |
| 1.02.02.3.0.03 | Pembentukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 204.269.900 | 117.414.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204.269.900 | | |
| 1.02.02.3.0.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.591.897.400 | 2.528.858.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.591.897.400 | | |
| 1.02.02.3.0.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.591.897.400 | 2.528.858.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.591.897.400 | | |
| 1.02.02.4 | PROGRAM SEDIARAN PERSAFASI ALAT NESEBUTAN DAN KACAKNAH MINUMAN | 600.000.000 | 462.101.000 | 682.070.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 427.101.000 | 71.1835 | |
| 1.02.02.4.01 | Meningkatkan Keterlibatan Alat Kesehatan dan Minuman | 600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.4.02 | Pengembangan dan Peningkatan Sanitasi Tempat Pengelolahan Makaroni | 35.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.000.000 | | |
| 1.02.02.4.03 | Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makaroni Minuman Terdaftar yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 427.101.000 | 353.578.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 427.101.000 | | |
| 1.02.02.4.04 | Penerbitan Sertifikat Lakt Higienik Sanitasi Tempat Pengolahan Makaroni (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makaroni/Resor dan Depot Air Minum (DAM) | 35.000.000 | 261.457.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.000.000 | | |
| 1.02.02.4.04 | Pengelolaan dan Pengembangan sertifikat Lakt Higienik Lembar Pengolahan Makaroni (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makaroni/Resor dan Depot Air Minum (DAM) | 35.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.000.000 | | |
| 1.02.02.4.05 | Penerbitan Sertifikat Produk Makaroni | 211.457.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.4.06 | Penerbitan Sertifikat Produk Makaroni | 35.000.000 | 429.632.690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.750.000 | #DIV/0! | |
| 1.02.02.4.06 | Penerbitan dan Pengembangan sertifikat Lakt Higienik Lembar Pengolahan Makaroni (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makaroni/Resor dan Depot Air Minum (DAM) | 35.000.000 | 5.315.124.565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1.02.02.5.0.01 | Advokasi, Pengembangan, Konsiliasi, Pengelolaan dan Pengembangan sertifikat Lakt Higienik Lembar Pengolahan Makaroni (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makaroni/Resor dan Depot Air Minum (DAM) | 18.750.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.750.000 | | |
| 1.02.02.5.0.01 | Pengelolaan Uppaya Promosi Kesehatan, Adekasi, Kembang dan Pembangunan Masajukah | 18.750.000 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.750.000 | | |
| 1.02.02.5.0.02 | Pelaksanaan dalam rangka Promoff Preventif Tingkat Daerah Kecamatan | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.02.05.2.0.01 | Penerapanan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat | | 50.000.000 | 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | |
| 1.02.05.2.0.03 | Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (UKBM) Tingkat Desa/Kabupaten/Kota | | 209.647.000 | 304.632.690 | | | | | | | | | | | | | | 209.647.000 | |
| 1.02.05.2.0.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Penerapan Program Kesehatan Berorientasi Daya Masyarakat (Kesday) | | 209.647.000 | 304.632.690 | | | | | | | | | | | | | | 209.647.000 | |
| 1.02.02 | PROGRAM PENUNJANG UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT | | 2.171.400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | 2.171.400.000,00 | |
| | Pemerintah Dewan Dewan Pengurusan Dan Kesihatan Masyarakat yang terpenuhi | 2.170.350.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemerintah Dewan Dewan Pengurusan Dan Kesihatan Masyarakat yang terpenuhi | 1.050.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.0.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UMK Kawasan Dariuk Kabupaten Kota | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| 1.02.02.2.0.07 | Pembangunan Faizilitas Kesehatan Lainnya | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| 1.02.02.2.0.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| 1.02.02.2.0.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelajaran Kesehatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| 1.02.02.2.0.14 | Pengadaan dan Pemasaran Alat Penjuring Medik Fasilitas Pelajaran Kesehatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| | Pemeliharaan Ratu dan Berkala Alat Kesehatan/Ratu dan Berkala Alat Kesehatan/Kesehatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| | Penyelenggaraan Rumah Sakit | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| | Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vacin, Makuan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4DIV/0 | | |
| 1.03.00.00.00.00.00 | DNAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAKUAN UMUM DAN PENGATURAN RUANG | | 136.896.630.650 | 95.095.317.323 | 125.620.000 | | | | | | | | | | | | 8,29 | 144.781.631.871 | |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA | | 2.296.472.400 | 23.389.851.064 | 7.759.981.221 | | | | | | | | | | | | 31,18 | 10.056.453.621 | |
| 1.03.01.2.0.01 | Penercahan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 74.000.000 | 35.721.000 | 6.393.000 | | | | | | | | | | | | 17,90 | 80.393.000 | |
| 1.03.01.2.0.01 | Penyusunan Dokumen Penercahan Penganggaran | | 14.000.000 | 10.000.000 | 2.672.000 | | | | | | | | | | | | 2.672.000 | 26.72 | 16.672.000 |
| 1.03.01.2.0.02 | Koordinasi dan Perwujudan Dokumen RKA-SKPD | | 10.000.000 | 3.755.000 | 705.000 | | | | | | | | | | | | 705.000 | 18,77 | 10.705.000 |
| 1.03.01.2.0.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 10.000.000 | 3.755.000 | 705.000 | | | | | | | | | | | | 705.000 | 18,77 | 10.000.000 |
| 1.03.01.2.0.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | 10.000.000 | 3.755.000 | 705.000 | | | | | | | | | | | | 705.000 | 18,77 | 10.000.000 |
| 1.03.01.2.0.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Kinerja Realistik Kredivit SKPD | | 20.000.000 | 18.213.000 | 2.311.000 | | | | | | | | | | | | 2.311.000 | 12,69 | 22.311.000 |
| 1.03.01.2.0.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 23.997.93.802 | 22.201.681.366 | 7.297.446.395 | | | | | | | | | | | | 32,87 | 31.195.180.187,00 | |
| 1.03.01.2.0.01 | Penyusunan dan Penyajian ASN | | 23.997.93.802 | 22.201.681.366 | 7.297.446.395 | | | | | | | | | | | | 7.297.446.395 | 32,87 | 31.195.180.187,00 |
| 1.03.01.2.0.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Bulanan | | 18.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 18.000.000 | | |
| 1.03.01.2.0.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 50.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 1.03.01.2.0.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 50.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 1.03.01.2.0.05 | Administrasi Kepapegawai Perangkat Daerah | | 95.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 95.000.000 | | |
| 1.03.01.2.0.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | 95.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 95.000.000 | | |
| 1.03.01.2.0.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 501.638.000 | 174.415.596 | 39.197.000 | | | | | | | | | | | | 22,51 | 540.35.000,00 | |
| 1.03.01.2.0.01 | Penyusunan Instalasi Listrik/Penerangan Ruang dan Kuningan | | 30.000.000 | 25.000.000 | 5.284.000 | | | | | | | | | | | | 5.284.000 | 21,14 | 35.284.000,00 |
| 1.03.01.2.0.02 | Pengelolaan Perjalanan dan Pendidikan Kanak-Kanak | | 166.38.000 | 49.963.500 | 9.460.500 | | | | | | | | | | | | 9.460.500 | 18,93 | 176.068.000,00 |
| 1.03.01.2.0.03 | Pengelolaan Perjalanan Rumah Tinggal | | 50.000.000 | 49.963.500 | 8.167.500 | | | | | | | | | | | | 8.167.500 | 32,65 | 58.162.500,00 |
| 1.03.01.2.0.04 | Pengelolaan Bantuan Cetakan dan Perorangan | | 70.000.000 | 25.000.000 | 6.099.000 | | | | | | | | | | | | 6.099.000 | 24,35 | 76.000.000 |
| 1.03.01.2.0.06 | Pengelolaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Perundangan | | 80.000.000 | 30.000.000 | 10.200.000 | | | | | | | | | | | | 10.200.000 | 34,00 | 90.200.000 |
| 1.03.01.2.0.09 | Penyelesaian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 55.000.000 | 4.150.000 | - | | | | | | | | | | | | 55.000.000 | | |
| 1.03.01.2.0.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | 115.800 | - | - | | | | | | | | | | | | 115.800 | | |
| 1.03.01.2.0.06 | Penatausahaan Peraturan dan Mesin Lainnya | | 115.800.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 115.800.000 | | |
| 1.03.01.2.0.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 905.034.400 | 773.331.200 | 268.192.436 | | | | | | | | | | | 268.192.436 | 34,68 | 1.173.226.836,00 | |
| 1.03.01.2.0.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumur Daya Air dan Listrik | | 220.000.000 | 200.000.000 | 49.213.510 | | | | | | | | | | | | 49.213.510 | 24,61 | 209.113.416.00 |
| 1.03.01.2.0.04 | Penyediaan Jasa Pelabuhan Umum Kantor | | 605.534.400 | 572.331.200 | 218.979.000 | | | | | | | | | | | | 218.979.000 | 38,19 | 904.013.470.00 |
| 1.03.01.2.0.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 555.000.000 | 205.000.000 | 148.752.400 | | | | | | | | | | | 148.752.400 | 72,56 | 703.752.400,00 | |
| 1.03.01.2.0.01 | Upaya Peningkatan Kesejahteraan | | 80.000.000 | 30.000.000 | 9.532.400 | | | | | | | | | | | | 9.532.400 | 31,77 | 89.532.400,00 |
| 1.03.01.2.0.01 | Peningkatan Kesejahteraan Biaya Pemeliharaan dan Kondisi Perangkat Daerah | | 80.000.000 | 30.000.000 | 9.532.400 | | | | | | | | | | | | 9.532.400 | 31,77 | 89.532.400,00 |
| 1.03.01.2.0.03 | Peningkatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan | | 100.000.000 | 100.000.000 | 74.220.000 | | | | | | | | | | | | 74.220.000 | 74,22 | 174.220.000 |
| 1.03.01.2.0.06 | Pemeliharaan Peraturan dan Mewujudkan Mewujudkan | | 100.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | 100,00 | 125.000.000 |
| 1.03.01.2.0.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 275.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | 40.000.000 | 80,00 | 315.000.000 |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | 36.234.821.300 | 25.822.184.350 | 112.000.000 | | | | | | | | | | | 112.000.000 | 0,43 | 36.346.821.300 | |
| | Mengelola dan Kaitkan dengan Kesiabilitas Finansial | 371.550.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.02.2.0.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 18.042.416.900 | 8435.423.650 | - | | | | | | | | | | | | 18.042.416.900 | | |
| 1.03.02.2.0.02 | Rehabilitasi dan Pengembangan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | | 700.000.000 | 312.147.750 | - | | | | | | | | | | | | 700.000.000 | | |
| 1.03.02.2.0.09 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air | | 300.000.000 | 100.000.000 | - | | | | | | | | | | | | 300.000.000 | | |
| 1.03.02.2.0.03 | Normalisasi/Prestasi Lingkungan | | 100.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.02.2.0.10 | Pemeliharaan Barugan Perkiraan Tetangga | | 11.552.967.000 | 3.379.700.150 | - | | | | | | | | | | | | 11.532.967.000 | | |
| 1.03.02.2.0.11 | Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Air Lengkap | | 3.189.449.700 | 3.079.012.750 | - | | | | | | | | | | | | 3.189.449.700 | | |
| 1.03.02.2.0.12 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Infrastruktur Baru, Lahan dan Penggunaan Air Lengkap | | 50.000.000 | 100.000.000 | - | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 1.03.02.2.0.12 | Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Air Lengkap | | 2.200.000.000 | 349.540.600 | - | | | | | | | | | | | | 2.200.000.000 | | |
| 1.03.02.2.0.12 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Infrastruktur Baru, Lahan dan Penggunaan Air Lengkap | | 50.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 1.03.02.2.0.2 | Pengembangan dan Peningkatan Sistem Irigasi | | 18.192.404.400 | 17.386.680.700 | 112.000.000 | | | | | | | | | | | 112.000.000 | 0,64 | 18.304.404.400 | |
| 1.03.02.2.0.2 | Peningkatan Kekurangan pada Sistem Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 150.000.000 | 75.000.000 | - | | | | | | | | | | | | 75.000.000 | | |
| 1.03.02.2.0.24 | Rehabilitasi Jaringan Infrastruktur Pemukiman | | 17.261.604.400 | 16.616.921.700 | - | | | | | | | | | | | | 17.261.604.400 | | |
| 1.03.02.2.0.21 | Opsiensi dan Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Pemukiman | | 781.400.000 | 694.759.000 | 112.000.000 | | | | | | | | | | | 112.000.000 | 16,12 | 893.400.000 | |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | 13.238.505.000 | 9485.320.425 | - | | | | | | | | | | | | 13.238.505.000 | | |
| | Mengelola teknologi air bersih kepada masyarakat | 62.075.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.03.2.0.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | 13.238.505.000 | 9485.320.425 | - | | | | | | | | | | | | 13.238.505.000 | | |
| 1.03.03.2.0.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpakan di Kawasan Pedesaan | | 1.200.000.000 | - | - | | | | | | | | | | | | 1.200.000.000 | | |
| 1.03.03.2.0.04 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpakan | | 1.190.320.425 | - | - | | | | | | | | | | | | 1.190.320.425 | | |
| 1.03.03.2.0.18 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpakan | | 12.038.505.000 | 1.385.000.000 | - | | | | | | | | | | | | 12.038.505.000 | | |
| 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | 2.100.000.000 | 66.264.200 | - | | | | | | | | | | | | 2.100.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | Jumlah fasilitas pengembangan | 6.750.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04.2.81 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Permasahan di Daerah Kabupaten/Kota | | 2.100.000.000 | 66.264.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100.000.000,00 | | | | |
| 1.03.04.2.01.03 | Pembangunan PAU/PSP/PAU/PSP/PAU/PSP | | 2.100.000.000 | 66.264.200 | | | | | | | | | | | | 2.100.000.000,00 | | | |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | 10.226.302.000 | 1.680.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.226.302.000 | | | | |
| | Akses Sanitasi Lekok | 16.400.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 10.226.302.000,00 | | | |
| 1.03.05.2.81 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 10.226.302.000 | 1.680.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.05.2.01.12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu Statis Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.05.2.01.22 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.05.2.01.28 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu Statis Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.05.2.01.32 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu Statis Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.05.2.01.39 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu | | 10.226.302.000 | 1.680.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.226.302.000,00 | | | | |
| 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | 209.553.850 | 109.757.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.553.850 | | | | |
| | Berkurangnya laju air permukaan banjir di perumahan (m/d) | 22.515.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.06.2.81 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsing dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 209.553.850 | 109.757.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.553.850,00 | | | | |
| 1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | 209.553.850 | 9.757.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.553.850 | | | | |
| 1.03.06.2.01.14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | | | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | 100.000.000 | 65.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | | |
| | Rasio bangunan berizin | 19.900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.08.2.81 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lai Fungi Bangunan Gedung | | 100.000.000 | 65.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | | |
| 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaran Penetapan dan Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lai Fungi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan dan Penilaian Kelayakan Bangunan Gedung serta Imbalan (SIMBG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.08.2.01.13 | Pemeliharaan dan Pawaiwan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.08.2.01.23 | Penyelenggaran Penetapan Penetapan Bangunan Gedung (PGC), Sertifikat Lai Fungi (SLF), Surat Bakti Kepada Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teks Perbaikan dan Peningkatan Kapasitas Jalan, Tim Proses Ahli (TPA), Tim Penila Teknis (PTP), Perilaku, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | 100.000.000 | 65.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | | |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINDUNGKANSA | | 29.615.368.500 | 23.762.800.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.615.368.500 | | | | |
| | Persentase pemeliharaan dan pawaiwan bangunan gedung dan lingkungannya (%) | 43.750.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.09.2.81 | Penyelenggaraan Perataan Bangunan dan Lindungkannya di Daerah Kabupaten/Kota | | 29.615.368.500 | 23.762.800.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.615.368.500 | | | | |
| 1.03.09.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Perataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.09.2.01.03 | Perataan Bangunan dan Lindungkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.09.2.01.07 | Pengawasan Perataan Bangunan dan Lingkungan | | 29.615.368.500 | 23.762.800.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.615.368.500 | | | | |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | 44.320.980.000 | 34.042.988.573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.320.980.000 | | | | |
| | Persentase mendirikan jalanan | 3.056.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.10.2.81 | Penyelenggaraan Jalan Kebutuhan/Kota | | 44.320.980.000 | 34.042.988.573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.320.980.000 | | | | |
| 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Perataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.10.2.01.03 | Perataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.10.2.01.07 | Pengawasan Perataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | 475.000.000 | 37.092.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.000.000 | | | | |
| | Persentase kewacanaan kerja | 4.125.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Keterbantuan Pasarwanan dan Hermosa/Sewa Operativa Bina | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11.2.81 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruktif | | 325.000.000 | 22.004.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.000.000 | | | | |
| 1.03.11.2.01.09 | Pelatihan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruktif Kualifikasi jabatan Operator dan Tenisi atau Analis | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | 25.000.000 | | |
| 1.03.11.2.01.11 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruktif Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruktif | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | 100.000.000 | | |
| 1.03.11.2.01.16 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruktif Kualifikasi jabatan Desainer dan Analis | | 200.000.000 | 22.004.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 200.000.000 | | | |
| 1.03.11.2.01.40 | Survey Kondisi Jalan Jembatan | | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11.2.01.43 | Survei Kondisi Jalan Jembatan | | 220.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11.2.01.44 | Rehabilitasi Jalan | | 200.000.000 | 22.004.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 80.000.000 | | | |
| 1.03.11.2.01.46 | Renovasi/Ruas Jalan | | 5.049.795.000 | 5.308.750.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000.000 | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | 475.000.000 | 37.092.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.000.000 | | | | |
| | Persentase kewacanaan kerja | 4.125.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Keterbantuan Pasarwanan dan Hermosa/Sewa Operativa Bina | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11.2.2.81 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruktif | | 325.000.000 | 22.004.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 1.03.11.2.01.09 | Pelatihan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruktif jabatan Operator dan Tenisi atau Analis | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | 25.000.000 | | |
| 1.03.11.2.01.11 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruktif Kualifikasi jabatan Desainer dan Analis | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | 100.000.000 | | |
| 1.03.11.2.01.16 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruktif Kualifikasi jabatan Desainer dan Analis | | 200.000.000 | 22.004.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 200.000.000 | | | |
| 1.03.11.2.01.40 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruktif Gabungan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.01.42 | Penyelenggaraan Pengaturan Perekiraaan Layanan Informasi Jasa Konstruktif | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.01.44 | Penyelenggaraan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.01.47 | Penyelidikan Data dan Material dan Peralatan | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.02.09 | Penyelidikan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.02.09 | Penerapan dan Evaluasi IJUK Nasional yang telah diterbitkan | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.02.09 | Penerapan dan Evaluasi Uraji Jasa Konstruktif Nasional (Non Kecil dan Kecamatan) | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.02.03 | Penerapan dan Evaluasi Uraji Jasa Konstruktif Nasional (Non Kecil dan Kecamatan) | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.02.03 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.03.05 | Pembinaan dan Evaluasi IJUK Nasional yang telah diterbitkan | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | |
| 1.03.11.2.04.04 | Pengawasan Terhadap Usaha Jasa Konstruktif | | 150.000.000 | 14.998.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 150.000.000 | | | |
| 1.03.11.2.04.02 | Penyelenggaraan Tenaga Kerja dan Penyelenggaraan Jasa Konstruktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11.2.04.07 | Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Jasa Konstruktif | | 150.000.000 | 14.998.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 150.000.000 | | | |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | 375.500.000 | 24.080.000 | 13.620.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.620.000 | 56.56 | 369.120.000 | | |
| | Persentase kewacanaan dikemasan tata ruang | 7.900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.12.2.81 | Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rintis Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota | | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 30.000.000 | | |
| 1.03.12.2.01.12 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Standarisasi Penataan | | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 30.000.000 | | |
| 1.03.12.2.01.09 | Koordinasi dan Implementasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | 270.500.000 | | | | | | | | | | | | | | 270.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------|-------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--|--|
| 1.03.12.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | | 248.530.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240.500.000 | | |
| 1.03.12.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota | | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.000.000 | | |
| 1.03.12.2.02.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | |
| | Pelaksanaan Perencanaan Substansi RTRW | | | 231.798.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | |
| 1.03.12.2.03.05 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | |
| 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | 50.000.000 | | 24.080.000 | 13.620.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.620.000 | 54.56 | 63.620.000 | | | | | | |
| 1.03.12.2.04.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.03.12.2.04.07 | Pengaruan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran zonasi/tanah dalam RTR | | 25.000.000 | | 24.080.000 | 13.620.000 | | | | | | | | | | | 13.620.000 | 54.56 | 63.620.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.2.10.00.00.00 | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERKUMLAN DAN PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMLAN | | 54.069.970.003 | | 58.855.093.650 | 2.460.633.712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.460.633.712 | 4,18 | 56.530.693.715 | | | | | | |
| 1.04.01 | PROGRAM PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA | | 9.033.652.843 | | 7.765.834.841 | 2.388.138.712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.388.138.712 | 30,75 | 11.421.791.555 | | | | | | |
| 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 180.000.000 | | 6.810.000 | 2.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200.000 | 32,31 | 182.200.000 | | | | | | |
| 1.04.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 50.000.000 | | 6.810.000 | 2.200.000 | | | | | | | | | | 2.200.000 | 32,31 | 52.200.000 | | | | | |
| 1.04.01.2.01.02 | Koordinasi dan Perwujudan Dokumen RRA-SKPD | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.01.04 | Koordinasi dan Perwujudan DPA-SKPD | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.01.06 | Koordinasi dan Perwujudan DPA-SKPD, Cekiran Kinerja dan Akhir Rapida Kredita SKPD | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.01.07 | Evaluasi Kredita Perangkat Daerah | | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.02 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 7.384.972.843 | | 7.101.984.841 | 2.236.387.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.236.387.078 | 31,49 | 9.513.879.813 | | | | | | |
| 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN | | 7.314.972.843 | | 7.085.984.841 | 2.220.907.078 | | | | | | | | | 2.220.907.078 | 31,36 | 9.533.879.813 | | | | | | |
| 1.04.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.02.05 | Koordinasi dan Perwujudan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 15.480.000 | | | | | | | | | | 15.480.000 | 77,40 | 35.480.000 | | | | | |
| 1.04.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.03.06 | Administrasi Kepajuanan Perangkat Daerah | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 1.886.000 | 25,02 | 21.886.000 | | | | |
| 1.04.01.2.03.07 | Pengembangan Perangkat Daerah | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | 20.000.000 | | 6.500.000 | 1.886.000 | | | | | | | | | 1.886.000 | 29,02 | 21.886.000 | | | | | | |
| 1.04.01.2.05.05 | Amenitas dan Sarana Pendukung Perangkat Daerah | | 20.000.000 | | 6.500.000 | 1.886.000 | | | | | | | | | 1.886.000 | 29,02 | 21.886.000 | | | | | | |
| 1.04.01.2.06 | Penyelenggaraan Riset Koordinasi dan Karatasi SKPD | | 15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 10.213.406 | 7,49 | 52.000.000 | | | | |
| 1.04.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.07 | Penyelenggaraan Perangkat Daerah, Baya Remeharana, dan Paket Kenderaan Perorangan Diraja/Latau Kenderaan dan Diraja/abatua | | 33.310.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.310.000 | | | |
| 1.04.01.2.07.01 | Pemeliharaan Perlakuan dan Mesti Lainnya | | 7.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 1.500.000 | 21,43 | 1.500.000 | | | | |
| 1.04.01.2.07.02 | Pemeliharaan Perlakuan dan Mesti Lainnya | | 18.840.000 | | | 745.000 | | | | | | | | | | 745.000 | 3,95 | 745.000 | | | | | |
| 1.04.01.2.07.03 | Pengembangan Perangkat Daerah | | 15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.07.06 | Pengembangan Perangkat Daerah | | 45.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.08 | Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | | 515.900.000 | | 501.550.000 | 137.442.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.442.442 | 27,40 | 651.442.442 | | | | | | |
| 1.04.01.2.08.01 | Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 65.000.000 | | | | | | | | | | | | | | 6.788.842 | 9,49 | 71.788.842 | | | | |
| 1.04.01.2.08.02 | Penyelidikan Jasa Relawan Urum Kerto | | 450.000.000 | | 430.000.000 | 130.653.600 | | | | | | | | | | 130.653.600 | 30,38 | 581.013.600 | | | | | |
| 1.04.01.2.08.04 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 278.640.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 278.640.000 | | | |
| 1.04.01.2.09 | Penyelidikan Jasa Perangkat Daerah, Baya Remeharana dan Paket Kenderaan Perorangan Diraja/Latau Kenderaan dan Diraja/abatua | | 54.550.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.550.000 | | | |
| 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan Perilaku dan Mesti Lainnya | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | | 174.130.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 174.130.000 | | | |
| 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | | 174.130.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 174.130.000 | | | |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | 8.035.311.003 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 8.035.311.003 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.02.2.01 | Pendanaan Penyebarluasan dan Rehabilitasi Rumah Kering Bambu atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | 19.200.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.02.2.01.04 | Pendanaan Triptik Keruakan Rumah Akibat Bencana | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | 8.035.311.003 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 8.035.311.003 | | | | |
| 1.04.02.2.03.01 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana | | 250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 250.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.03.02 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana | | 7.785.311.003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.785.311.003 | | | |
| 1.04.02.2.04 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana | | 16.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.500.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.05 | Pendanaan Penyebarluasan dan Rehabilitasi Rumah Kering Bambu atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.06 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.07 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.08 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.09 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.10 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.11 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.12 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.13 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.14 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.15 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.16 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.17 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.18 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.19 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.20 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.21 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.22 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.23 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.24 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.25 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.26 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 1.04.02.2.27 | Peningkatan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan | | 25.000.000 | </td | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---|---|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYALAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | 1.853.000.000 | 310.000.000 | 25.200.000 | - | - | - | 25.200.000 | 8,13 | 1.878.200.000 | | | |
| | | Cakupan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | | 1.489.556.250 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyalaman dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Non Bahaya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.853.000.000 | 310.000.000 | 25.200.000 | - | - | - | 25.200.000 | 8,13 | 1.878.200.000 | | | |
| | 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.410.000.000 | 150.000.000 | 8.400.000 | | | | 8.400.000 | 5,60 | 1.418.400.000 | | | |
| | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 210.000.000 | 50.000.000 | 6.400.000 | | | | 8.400.000 | 16,80 | 218.400.000 | | | |
| | 1.05.04.2.01.03 | Koordinasi dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | 233.000.000 | 110.000.000 | 8.400.000 | | | | 8.400.000 | 7,64 | 241.400.000 | | | |
| | 1.05.0.00.00.20.00 | BABAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTITRASMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | 2.861.416.100 | 1.149.731.000 | 27.650.000 | - | - | - | 27.650.000 | 2,40 | 2.889.066.100 | | | | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 3.106.058.546 | 3.140.435.489 | 856.560.045 | - | - | - | 856.560.045 | 27,28 | 3.962.618.191 | | | |
| | 1.05.01.2.01 | Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 36.755.000 | - | - | - | - | - | - | - | 36.755.000 | | | |
| | 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Implementasi | | | 36.755.000 | - | - | - | - | - | - | - | 36.755.000 | | | |
| | 1.05.01.2.01.07 | Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.222.241.076 | 2.291.094.079 | 674.451.388 | - | - | - | 674.451.388 | 29,44 | 2.836.832.464 | | | |
| | 1.05.01.2.02.01 | Penyusunan Gali dan Turangan ASN | | | 2.222.241.076 | 2.291.094.079 | 674.451.388 | - | - | - | 674.451.388 | 22.222.241.076 | | | | |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.01.2.05.02 | Pengambilan Pakuan Dikors. Birokrasi Antrid. Kolaborasi dan | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.01.2.05.05 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 260.000.000 | 143.495.500 | 28.761.000 | - | - | - | 28.761.000 | 20,00 | 296.827.000 | | | |
| | 1.05.01.2.05.06 | Pengembangan Komunikasi dan Penerangan Publik dan Kantor | | | 9.000.000 | 10.000.000 | 1.871.000 | - | - | - | 1.871.000 | 14,71 | 10.871.000 | | | |
| | 1.05.01.2.05.07 | Penyebarluasan Peraturan dan Perintah Kantor | | | 77.000.000 | 29.472.500 | 11.285.000 | - | - | - | 11.285.000 | 88,29 | 89.500.000 | | | |
| | 1.05.01.2.05.08 | Pengembangan Bantuan Tugasan | | | 8.151.500 | - | - | - | - | - | - | - | 8.151.500 | | | |
| | 1.05.01.2.05.09 | Penyebarluasan Bahan Logistik Kantor | | | 37.700.000 | 27.650.000 | 1.760.000 | - | - | - | 1.760.000 | 3,760.000 | 41.460.000 | | | |
| | 1.05.01.2.05.05 | Penyebarluasan Cetakan dan Pengembangan | | | 28.460.000 | 19.996.000 | 1.720.000 | - | - | - | 1.720.000 | 18,60 | 32.180.000 | | | |
| | 1.05.01.2.05.06 | Penyebarluasan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundung-Undangan | | | 32.560.000 | 20.000.000 | 1.425.000 | - | - | - | 1.425.000 | 32,13 | 38.985.000 | #DIV/0! | | |
| | 1.05.01.2.06.09 | Penyelegaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 74.350.000 | 36.577.000 | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | 4,65 | 76.050.000 | | | |
| | 1.05.01.2.06.10 | Perbaikan Jasa Arsitektur dan Sumber Daya SKPD | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.01.2.07 | Pengembangan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.01.2.07.06 | Pengembangan Peraturan dan Misi Lahirnya | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.01.2.07.10 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.01.2.08 | Penyebarluasan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 462.428.970 | 476.045.910 | 134.524.157 | - | - | - | 134.524.157 | 28,26 | 506.953.127 | | | |
| | 1.05.01.2.08.01 | Pengembangan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 65.000.370 | 78.620.310 | 14.200.157 | - | - | - | 14.200.157 | 18,05 | 79.203.377 | | | |
| | 1.05.01.2.08.04 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 297.425.000 | 307.425.000 | 12.000.000 | - | - | - | 12.000.000 | 32,20 | 313.425.000 | | | |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan | | | 114.567.500 | 229.000.000 | 18.423.500 | - | - | - | 18.423.500 | 8,13 | 135.591.000 | | | |
| | 1.05.01.2.09.02 | Pengembangan Jasa Perawatan dan Perbaikan dan Misi Lahirnya | | | 109.117.500 | 144.000.000 | 18.621.500 | - | - | - | 18.621.500 | 12,93 | 127.741.000 | | | |
| | 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan | | | 7.450.000 | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | 7.450.000 | | | |
| | 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | | |
| | 1.05.01.2.09.10 | Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | 2.861.416.100 | 1.149.731.000 | 27.650.000 | - | - | - | - | - | 2.861.416.100 | | | |
| | | Penyelenggaraan dan Pengembangan Bencana | | | 16.881.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | | | - | 1.880.760.000 | 360.975.000 | - | - | - | - | - | - | 239.010.000 | | |
| | 1.05.03.2.01.03 | Pengembangan Rista Bencana Kabupaten/Kota | | | - | 239.010.000 | 287.975.000 | - | - | - | - | - | - | 239.010.000 | | |
| | 1.05.03.2.01.04 | Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (NE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | | | 1.641.750.000 | - | 73.000.000 | - | - | - | - | - | - | 1.641.750.000 | | |
| | 1.05.03.2.02 | Penyebarluasan dan Kesigapannya Terhadap Bencana | | | 543.116.750 | 555.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 543.116.750 | | |
| | 1.05.03.2.02.02 | Pengembangan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | 106.924.000 | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 106.924.000 | | |
| | 1.05.03.2.02.03 | Pengembangan Operasi dan Penyebarluasan Sarana Prasarana Kesigapannya Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | 102.138.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.138.000 | | |
| | 1.05.03.2.02.06 | Pengembangan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana | | | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | |
| | 1.05.03.2.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.02.09 | Pengembangan Risma Kontinen | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.02.10 | Giat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 20.968.750 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 20.968.750 | | |
| | 1.05.03.2.02.11 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | | |
| | 1.05.03.2.02.12 | Pengaruh Kebijakan Tanggap Bencana Alam | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.02.13 | Pengembangan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.02.14 | Pengembangan Penyebarluasan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.02.15 | Pengembangan Perilaku Penyelidikan dan Kesigapannya Terhadap Bencana | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.02.16 | Pelatihan Penyebarluasan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | 108.926.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.926.000 | | |
| | 1.05.03.2.02.17 | Pengembangan Operasi dan Penyebarluasan Sarana Prasarana Kesigapannya Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | 102.138.000 | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 102.138.000 | #DIV/0! | |
| | 1.05.03.2.03 | Penyebarluasan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 311.295.500 | 193.866.000 | 16.550.000 | - | - | - | 16.550.000 | 8,54 | 327.435.500 | #DIV/0! | | |
| | 1.05.03.2.03.01 | Pengembangan Kepatuhan Lalu Biliar Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.03.02 | Risiko Cekat Daurul Bencana Kabupaten/Kota | | | 9.970.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.970.000 | | |
| | 1.05.03.2.03.03 | Percaya, Pemberdayaan dan Evaluasi Korban Bencana | | | 56.500.000 | 19.000.000 | 16.550.000 | - | - | - | 16.550.000 | 87,11 | 73.050.000 | | | |
| | 1.05.03.2.03.07 | Penyusunan Rencana Operasi Kedauratan Bencana | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.03.09 | Pengembangan Logistik Penyebarluasan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 254.795.500 | 164.836.000 | - | - | - | - | - | - | - | 254.795.500 | | |
| | 1.05.03.2.03.10 | Pengembangan dan Perbaikan Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.03.11 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.04 | Pengembangan Sistem Daurul Bencana | | | 126.251.858 | 39.950.000 | 11.100.000 | - | - | - | 11.100.000 | - | 127.433.858 | | | |
| | 1.05.03.2.04.02 | Pengembangan Keterlibatan Bencana Kabupaten/Kota | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.04.04 | Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Kecamatan | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.04.05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyebarluasan Bencana | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.04.07 | Pengembangan Kapasitas SDM/Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 56.643.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.643.750 | | |
| | 1.05.03.2.04.10 | Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.05.03.2.04.13 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JUKPASHA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah (RDRD) Kabupaten/Kota | | | 69.590.100 | 39.950.000 | 11.100.000 | - | - | - | 11.100.000 | 27,78 | 80.690.100 | | | |
| | 1.06.00.00.00.00.00 | DINAS SOSIAL | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | 4.360.843.600 | 360.000.000 | 77.410.000 | - | - | - | 77.410.000 | 21,52 | 4.438.253.600 | #DIV/0! | | |
| | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 6.250.997.353 | 4.975.123.630 | 1.324.024.980 | - | - | - | 1.324.024.980 | - | 7.575.022.333 | | | |
| | 1.06.01.2.01 | Pengembangan dan Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 105.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000.000 | | |
| | 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 22.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 22.000.000 | | |
| | 1.06.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Amanat Realisasi Kinerja SKPD | | | 83.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|---|---|---|---------------|-------|----------------|-------------|-------------|--|--|
| 1.06.07.2.81 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | 50.000.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 | | |
| 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 2.07.3.32.0.00.09.00 | DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMORASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | 8.084.653.995 | 300.000.000 | 33.850.000 | - | - | - | - | 33.850.000 | 11,28 | 8.118.503.995 | | | | |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 7.224.653.995 | 5.153.712.584 | 1.464.210.389 | - | - | - | - | 1.464.210.389 | 28,41 | 6.868.864.384 | | | | |
| 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perorangan Daerah | | 5.376.770.008 | 5.103.712.584 | 1.455.460.689 | - | - | - | - | 1.455.460.689 | 28,52 | 6.826.030.697 | | | | |
| 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Data dan Turunan ASN | | 5.255.710.008 | 5.103.712.584 | 1.455.460.689 | - | - | - | - | 1.455.460.689 | 28,52 | 6.711.030.697 | | | | |
| 2.07.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir (LKA) SED | | 115.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.05 | Administrator Kepengawilan Perangkat Daerah | | 760.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.05.03 | Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kependidikan | | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.05.06 | Administrasi Insya'at Pengadaan | | 345.000.000 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 345.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Jalan/Ruas Jalan | | 40.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.06.02 | Penyediaan dan Perekembangan Kantor | | 68.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 70.000.000 | - | 25.000.000 | 7.525.000 | - | - | - | 7.525.000 | 30,10 | 77.525.000 | | | | |
| 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakkan dan Perdagangan | | 60.000.000 | - | 25.000.000 | 9.199.000 | - | - | - | 9.199.000 | 36,80 | 68.199.000 | | | | |
| 2.07.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan | | 50.000.000 | - | 30.000.000 | 7.700.000 | - | - | - | 7.700.000 | 25,67 | 57.700.000 | #DIV/0! | | | |
| 2.07.01.2.06.09 | Penyelegarana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 65.000.000 | - | 20.000.000 | 5.040.000 | - | - | - | 5.040.000 | 25,20 | 70.040.000 | | | | |
| 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha | | 175.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.07.06 | Penyediaan Perabot dan Mesin Laundry | | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Jalinan dan Infrastruktur | | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintah Daerah | | 569.083.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 569.083.987 | | | | |
| 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 93.139.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.139.987 | | | | |
| 2.07.01.2.08.04 | Penyelektaraan Jasa Pengajuan Umum Kantor | | 475.944.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475.944.000 | | | | |
| 2.07.01.2.09 | Penyelektaraan dan Pengembangan Dinas Penunjang Operasi Pemerintah Daerah | | 356.000.000 | 50.000.000 | 8.749.700 | - | - | - | - | 8.749.700 | 17,50 | 356.749.700 | | | | |
| 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan dan Pemeliharaan dan Perbaikan dan Pengadaan Perabot dan Mesin Laundry | | 40.000.000 | 50.000.000 | 8.749.700 | - | - | - | - | 8.749.700 | 17,50 | 48.749.700 | | | | |
| 2.07.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mobil | | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.09.06 | Penyediaan Perabot dan Meja/Lemari | | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000.000 | | | | |
| 2.07.01.2.09.09 | Pembinaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jaringan | | 250.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.000.000 | | | | |
| 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.000.000 | | | | |
| | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan kerangka kerja yang efektif dan efisien | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja RTIKO | | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.000.000 | | | | |
| 2.07.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Miskin | | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.000.000 | | | | |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | 9.386.574.900 | 2.725.773.700 | 114.477.400 | - | - | - | - | 114.477.400 | 4,20 | 9.501.052.300 | | | | |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | 9.386.574.900 | 2.725.773.700 | 114.477.400 | - | - | - | - | 114.477.400 | 4,20 | 9.501.052.300 | | | | |
| 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan dan Pengkajian Kerja Berdasarkan Klasifikasi Kompetensi | | 9.386.574.900 | 2.725.773.700 | 114.477.400 | - | - | - | - | 114.477.400 | 4,20 | 9.501.052.300 | | | | |
| 2.07.03.2.01.03 | Penyusunan Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2.07.03.2.02.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | 595.000.000 | 300.000.000 | 33.850.000 | - | - | - | - | 33.850.000 | - | 628.850.000 | | | | |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Dinas Kependidikan | | 415.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415.000.000 | | | | |
| 2.07.04.2.01.02 | Pelayanan antar Kerja | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2.07.04.2.01.03 | Penyaluran dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 | | | | |
| 2.07.04.2.01.04 | Penyaluran dan Unit Layanan Disabilitas Keterangkapatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2.07.04.2.01.05 | Perkajian Keperluan Kerja | | 370.000.000 | 546 orang | - | - | - | - | - | - | - | 390.000.000 | | | | |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | 1.100.000.000 | 110.000.000 | 300.000.000 | 33.850.000 | - | - | - | - | - | 33.850.000 | 11,28 | 143.850.000 | | |
| 2.07.04.2.03.02 | Pelaporan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Online | | 60.000.000 | 12 data | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000.000 | | | |
| 2.07.04.2.03.03 | Ins. dan Penerbit. Kita | | 50.000.000 | 2000 orang | 300.000.000 | 33.850.000 | - | - | - | - | - | 33.850.000 | 11,28 | 81.850.000 | | |
| 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pria dan Puma Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota) | | 70.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000.000 | | | |
| 2.07.04.2.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia/PMI) | | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000.000 | | | |
| 2.07.04.2.04.02 | Penyediakan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | 35.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.000.000 | | | |
| 2.07.04.2.04.03 | Pembinaan Pekerja Migran Indonesia Purna Pendidikan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | 190.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.000.000 | | | | |
| | Meningkatnya Perusahaan yang mampu bersaing di pasar kerja yang lemah | 500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendirian Perjalanan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah | | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | |
| 2.07.05.2.01.03 | Peningkatan Pendekatan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | |
| 2.07.05.2.02 | Pengelolaan dan Penyebarluasan Persetujuan Hubungan Industrial. Mognik Kerja dan Penutupan Perusahaan yang beroperasi dalam 1 (satu) Daerah | | 90.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.000.000 | | | |
| 2.07.05.2.02.01 | Pengesahan Persetujuan Hubungan Industrial. Mognik Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang beroperasi dalam 1 (satu) Daerah | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.07.05.2.02.03 | Peningkatan Verifikasi dan Rekjepitulan Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Pengusaha dan Pengusaha | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kepajiana Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | 90.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.000.000 | | | |
| 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesiapsiagaan Petugas | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSIMIGRASI | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSIMIGRASI | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3.32.03.2.01 | Pembangunan Pusat Pendukung yang bersifat dari Satu Daerah Kabupaten/Kota | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3.32.03.2.01.05 | Penyaluran Transmigrasi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSIMIGRASI | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permuksa pada Tahap Awal | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3.32.04.2.01.02 | Pengurangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan dalam rangka Kemudahan Satuan Permuksa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.09.3.27.0.00.19.00 | DNAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | | 27.449.751.059 | 14.331.372.350 | 497.069.150 | - | - | - | - | 497.069.150 | 3,47 | 27.946.620.200 | | | | |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | 7.972.168.250 | 5.921.166.448 | 378.690.075 | - | - | - | - | 378.690.075 | 6,40 | 7.450.858.325 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---------------|-------|----------------|--|--|
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH KABUPATEN/KOTA | | | 3.756.724.000 | 28.657.135.108 | 8.813.106.224 | - | - | - | - | 8.813.106.224 | 30,76 | 12.572.830.224 | | |
| 2.09.01.2.01 | Peningkatan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 115.000.000 | 148.975.000 | 20.560.000 | - | - | - | - | 20.560.000 | 13,80 | 135.560.000 | | |
| 2.09.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 15.000.000 | 10.000.000 | 9.750.000 | | | | | 9.750.000 | 97,50 | 24.750.000 | | |
| 2.09.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhirse Realistik Kriteria SKPD | | | 75.000.000 | 38.975.000 | 3.810.000 | | | | | 3.810.000 | 9,78 | 78.810.000 | | |
| 2.09.01.2.01.07 | Analisa dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 25.000.000 | 20.000.000 | 4.250.000 | | | | | 4.250.000 | 2,03 | 32.000.000 | | |
| 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 172.400.000 | 26.390.806.400 | 8.333.495.970 | - | - | - | - | 8.333.495.970 | 31,58 | 8.305.895.970 | | |
| 2.09.01.2.02.01 | Penyebarluasan dan Turpanan ASN | | | 157.400.000 | 26.390.806.400 | 8.333.495.970 | | | | | 8.333.495.970 | 31,58 | 8.333.495.970 | | |
| 2.09.01.2.02.02 | Penyebarluasan Administrasi Perekembang Tugas ASN | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| 2.09.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhirse Realistik Kriteria SKPD | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | |
| 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.056.440.000 | 270.051.300 | 56.967.500 | - | - | - | - | 56.967.500 | 21,09 | 1.113.407.500 | | |
| 2.09.01.2.06.01 | Peningkatan Kapasitas Instansi Lestari/Penerapan Sanusi Kandang | | | 96.800.000 | 15.000.000 | 9.059.000 | | | | | 9.059.000 | 60,39 | 105.919.000 | | |
| 2.09.01.2.06.02 | Penyelidikan Perilaku dan Perkembangan Kantor | | | 564.480.000 | 169.690.500 | 27.915.500 | | | | | 27.915.500 | 16,45 | 593.395.500 | | |
| 2.09.01.2.06.03 | Pengembangan dan Penerapan Logistik Kantor | | | 100.000.000 | 25.000.000 | 4.400.000 | | | | | 4.400.000 | 17,60 | 104.400.000 | | |
| 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian | | | 100.000.000 | 12.526.000 | 10.778.000 | | | | | 10.778.000 | 86,03 | 110.778.000 | | |
| 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | 30.100.000 | 15.000.000 | 4.815.000 | | | | | 4.815.000 | 32,10 | 34.915.000 | | |
| 2.09.01.2.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 140.000.000 | 32.835.000 | | | | | | | | 140.000.000 | | |
| 2.09.01.2.09.01 | Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.429.884.000 | 1.418.037.200 | 384.332.754 | - | - | - | - | 384.332.754 | 26,82 | 1.814.216.754 | | |
| 2.09.01.2.09.02 | Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 266.552.000 | 269.725.200 | 52.372.154 | | | | | 52.372.154 | 19,42 | 318.924.154 | | |
| 2.09.01.2.09.04 | Penyelidikan Jasa Pelajaran Umum Kantor | | | 1.163.332.000 | 1.163.332.000 | 331.960.600 | | | | | 331.960.600 | 28,54 | 1.495.392.600 | | |
| 2.09.01.2.09.05 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rumah Tangga | | | 983.000.000 | 414.243.000 | 20.750.000 | - | - | - | - | 20.750.000 | 5,01 | 1.003.750.000 | | |
| 2.09.01.2.09.06 | Penyelidikan Jasa Pemerintahan Biaya Pemeliharaan dan Fisik Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas | | | 200.000.000 | 50.000.000 | 3.500.000 | | | | | 3.500.000 | 7,00 | 203.500.000 | | |
| 2.09.01.2.09.10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 783.000.000 | 364.241.000 | 17.250.000 | | | | | 17.250.000 | 4,74 | 800.250.000 | | |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDALAMATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | 25.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 | | |
| | | Tersedianya pendidikan dan pelatihan pertanian | | 11.585.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 2.09.02.2.01 | Penyelidikan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemendagri/Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 | | |
| 2.09.02.2.01.03 | Penyelidikan Infrastruktur Pendukung Kemendagri/Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.000.000 | 25.000.000 | - | | | | | | | 25.000.000 | | |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | 2.153.846.000 | 4.027.195.448 | 378.690.075 | - | - | - | - | 378.690.075 | 9,40 | 2.532.930.075 | | |
| | | Meningkatnya diversifikasi pangan | | 20.108.250.000 | | | | | | | | | | | |
| 2.09.03.2.01 | Penyelidikan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Dinas dan Harga Pangan/Kelompok Rantai Stabilitas Pangan dan Harga Pangan | | | 1.283.520.000 | 1.003.030.000 | 233.840.075 | - | - | - | - | 233.840.075 | 23,31 | 1.517.360.075 | | |
| 2.09.03.2.01.02 | Penyaluran Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 750.000.000 | 160.363.000 | | | | | | | | 750.000.000 | | |
| 2.09.03.2.01.06 | Penyelidikan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko-Toko Kesehatan | | | 383.520.000 | 542.667.000 | 221.875.000 | | | | | 221.875.000 | 40,89 | 605.395.000 | | |
| 2.09.03.2.01.10 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan | | | 150.000.000 | 300.000.000 | 11.965.075 | | | | | 11.965.075 | 3,99 | 161.965.075 | | |
| 2.09.03.2.01.14 | Koordinasi dan Sinronisasi Pementasan Stok, Paketan dan Harga Pangan Paket Strategis | | | 200.000.000 | 378.798.440 | - | - | - | - | - | | | 200.000.000 | | |
| 2.09.03.2.02 | Penyelidikan dan Asimilasi/Catatan Pangan Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | 378.798.440 | - | | | | | | | 200.000.000 | | |
| 2.09.03.2.02.02 | Penyelidikan Rencana Kebutuhan Pangan Legal | | | 200.000.000 | 378.798.440 | - | | | | | | | 200.000.000 | | |
| 2.09.03.2.02.03 | Pembentukan dan Pengembangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | 378.798.440 | - | | | | | | | 200.000.000 | | |
| 2.09.03.2.04 | Penelaksanaan Penepatan Target Konsumsi Pangan Perkaitan/Tahun sesuai dengan Angka Keadaan Gizi | | | 670.320.000 | 2.645.367.000 | 144.850.000 | - | - | - | - | 144.850.000 | 5,48 | 815.170.000 | | |
| 2.09.03.2.04.01 | Penyelidikan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kedua per Tahun | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 2.09.03.2.04.02 | Pembentukan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 620.320.000 | 1.645.367.000 | 144.850.000 | | | | | 144.850.000 | 5,48 | 765.170.000 | | |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANAMAN KERAWANAN PANGAN | | | 1.036.604.250 | 1.806.721.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.036.604.250 | | |
| | | Tersedianya kerawanan pangan | | 11.585.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 2.09.04.2.02 | Penanaman Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.036.604.250 | 1.806.721.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.036.604.250 | | |
| 2.09.04.2.02.03 | Koordinasi dan Sinronisasi Penanaman Kerawanan Pangan dan Ciri Khas Kawasan/Kota | | | 1.036.604.250 | 1.806.721.000 | - | | | | | | | 1.036.604.250 | | |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | 100.000.000 | 66.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | |
| | | Terlaksanaan program penanaman pangan | | 2.317.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 2.09.05.2.01 | Penanaman Panganan Keamanan Pangan Sejati Dari Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | 66.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | |
| 2.09.05.2.01.07 | Penyelidikan Sanaria Pengulaman keamanan dan mutu jenang sejati dan beras/kg Dari Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | 60.250.000 | | | | | | | | 100.000.000 | | |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | 27.449.751.050 | 14.331.372.350 | 497.069.150 | - | - | - | - | 497.069.150 | 3,47 | 27.946.820.200 | | |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | 9.904.003.500 | 4.223.868.500 | 497.069.150 | - | - | - | - | 497.069.150 | 11,77 | 10.461.072.650 | | |
| | | Terwujudnya sarana pertanian | | 63.570.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya Produk Daging Sapi Segar (Ton) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Daging Segi | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Daging Segi dan Daging Ayam | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Daging Ayam dan Daging Sapi | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Daging Ayam dan Daging Sapi Pedaging | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya produksi daging sapi (Ton) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Daging Ayam dan Daging Sapi | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. Daging Ayam dan Daging Sapi Pedaging | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya populasi ternak sapi | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. Sapi Perah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. Sapi Perang | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9. Domba | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. Kambing | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11. Kelinci | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12. Ikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya Bahasan Pangan dan Bahan Bakar (Ton) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya Pengembangan Sarana Pertanian dan Kesiapsiagaan Bencana (PTK) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.02.02.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 9.904.003.500 | 4.223.868.500 | 497.069.150 | - | - | - | - | 497.069.150 | 11,77 | 10.461.072.650 | | |
| 3.27.02.02.01.01 | Pengawasan / Pengurusan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi | | | 3.720.100.000 | 5.983.350 | | | | | | | | 3.720.100.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|----------------|--|
| | | Jumlah Kualitas Tingkat Lahan (KTTL) | 10.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Berstatus Tersedia Tersedia Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Kekelembagaan Hayati Kebutuhan(Kota) | | 412.718.850 | 78.750.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412.718.850 | | |
| 2.11.04.2.01.01 | Pengembangan Rencana Pengelolaan Kekelembagaan Hayati | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 2.11.04.2.01.02 | Pengelolaan Taman Kekekagaman Hayati di Luar Kota | | | 65.242.500 | | | | | | | | | | | | | | 65.242.500 | | |
| 2.11.04.2.01.03 | Pengelolaan Kebon Raya | | 99.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 99.000.000 | | |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | 148.476.350 | 78.750.000 | | | | | | | | | | | | | | 148.476.350 | | |
| 2.11.04.2.01.06 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kekelembagaan Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.04.2.01.07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kekekagaman Hayati | | 65.242.500 | | | | | | | | | | | | | | | 65.242.500 | | |
| 2.11.04.2.01.08 | Pengelolaan Taman Kekekagaman Hayati Lemura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.04.2.01.09 | Pengelolaan Taman Kekekagaman Hayati di Luar Kepastian Hutan | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BAKAU(BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BAKAU(LBB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Diskonsumsi Bahan Bakar Bahan BB dan Limbah LBB | 1.050.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.05.2.01 | Pembinaan Sementara Limbah LBB | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.11.05.2.01.01 | Fasilitasi Pemerintah Komitmen Izin Penyimpanan Limbah Untuk Dikembangkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Bantuan Terintegrasi Siswa Elektronik | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.11.05.2.01.02 | Versifikasi dan Monitoring Melalui Penerapan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah LBB | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBERIAN DAN PENGAWASAN TERWADAH DINI LINDUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 435.200.000 | 400.000.000 | | | | | | | | | | | 435.200.000 | | |
| | | Persentase jumlah industri yang memenuhi peraturan pengelolaan lingkungan | 1.325.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dengan Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 435.200.000 | 400.000.000 | | | | | | | | | | | 435.200.000 | | |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemerintah Kecamatan dan Kewilayah Izin Lingkungan dan PPLH | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | | | | | | | | | | | 400.000.000 | | |
| 2.11.06.2.01.05 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Perbelanjaan Pemerintah terhadap Perstudi Lingkungan yang diperlukan untuk mendapatkan izin lingkungan atau perbelanjaan pada pembangunan dan pelaksanaan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | |
| 2.11.06.2.01.06 | Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.06.2.01.04 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | 15.200.000 | | | | | | | | | | | 15.200.000 | | | |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENTULIHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | |
| | | Lokasi yang diberikan pendidikan dan penyuluhan lingkungan | 1.200.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 2.11.08.2.01.02 | Pengembangan Gedakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | 30.000.000 | | | | | | | | | | | 30.000.000 | | | |
| 2.11.08.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | 40.000.000 | | | |
| | | Jumlah penghargaan/ inspirasi/ apresiasi/ Edukasi/Usaha/ Dana Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka PPLH | 900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | 40.000.000 | | | |
| 2.11.09.2.01.01 | Pemberian Penghargaan Masyarakat Duri Usaha dan Peningkatan Fisik trop dan Petindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | 40.000.000 | | | |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANAMAN PENANAMAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| | | Persentase penanaman/ inspirasi/ apresiasi/ Edukasi/Usaha/ Dana | 825.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 2.11.10.2.01.04 | Pengembangan penilaian pencemaran dan Pengurangan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 2.11.10.2.01.06 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 8.798.428.850 | 898.783.650 | | | | | | | | | | 8.798.428.850 | | | |
| | | Pengelolaan Sampah | 50.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 8.798.428.850 | | |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | | | | | 8.798.428.850 | 898.783.650 | | | | | | | | | | 8.798.428.850 | | | |
| 2.11.11.2.01.04 | Pengurangan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah | | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 2.11.11.2.01.07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengolahan di TPA/TPS/TPTSP Kabupaten/Kota | | | | | 8.205.264.000 | 898.783.650 | | | | | | | | | | 8.205.264.000 | | | |
| 2.11.11.2.01.08 | Pengelolaan Sampah di Wilayah Strategis Daerah | | | | | 300.000.000 | | | | | | | | | | | 300.000.000 | | | |
| 2.11.11.2.01.13 | Pengolahan Sampah kabupaten/kota | | | | | 77.000.000 | | | | | | | | | | | 77.000.000 | | | |
| 2.11.11.2.01.15 | Pengolahan sampah melalui pemaritan kembali | | | | | 31.000.000 | | | | | | | | | | | 31.000.000 | | | |
| 2.11.11.2.01.19 | Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah | | | | | 11.280.000 | | | | | | | | | | | 11.280.000 | | | |
| 2.11.11.2.01.20 | Pengurangan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPTSP kabupaten/kota atau TPA/TPTSP Regional | | | | | 123.884.850 | | | | | | | | | | | 123.884.850 | | | |
| 2.12.0.00.00.00.12.00 | DINAS KEPEMUDAHAN DAN PENCATATAN SIFIL | | | | | 8.714.669.205 | 3.558.767.000 | 1.678.859.072 | | | | | | | | | 1.678.859.072 | 47.18 | 10.393.519.277 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|-----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|-------|----------------|----------------|---------------|--|--|
| | | 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 8.714.660,205 | 3.558.767,000 | 1.678.859,072 | | | | | | 1.678.859,072 | 47,18 | 10.393.519,277 | | | | |
| | | 2.12.01 | PROSES PENGALUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEPENDUDUKAN KOTAKOTA | | | | 6.795.480,205,0 | 5.656.203,928 | 1.651.169,072 | | | | | | 1.651.169,072 | 29,19 | 8.446.649,277 | | | | |
| | | 2.12.01.2.01 | Pencatatan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 71.850,000 | | | | | | | | | | 71.850,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Pencatatan Perangkat Daerah | | | | 14.050,000 | | | | | | | | | | 14.050,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 57.800,000 | | | | | | | | | | 57.800,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.681.151,495 | 4.862.965,978 | 1.446.133,612 | | | | | | 1.446.133,612 | 29,74 | 7.129.285,017 | | | | |
| | | 2.12.01.2.02.01 | Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5.461.706,495 | 4.862.965,978 | 1.446.133,612 | | | | | | 1.446.133,612 | 29,74 | 7.113.240,017 | | | | |
| | | 2.12.01.2.02.05 | Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Keuangan Bulanan/Tahunan/Semesteran SKPD | | | | 15.645,000 | | | | | | | | | | 15.645,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.03 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 307.215,000 | 237.833,958 | 62.245,150 | | | | | | 62.245,150 | 26,17 | 365.326,750 | | | | |
| | | 2.12.01.2.03.01 | Pengembangan Kaderisasi dan Kesiapsiagaan Berwawasan Kependidikan | | | | 10.430,000 | | | | | | | | | | 10.430,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.03.02 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 80.000,000 | 85.000,000 | 23.691,400 | | | | | | 23.691,400 | 31,25 | 111.691,400 | | | | |
| | | 2.12.01.2.03.04 | Penyediaan Barang Logistik Kantor | | | | 49.450,000 | 32.625,000 | 17.747,000 | | | | | | 17.747,000 | 23,75 | 52.217,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.03.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengarsipan | | | | 69.355,600 | 36.408,850 | 9.628,750 | | | | | | 9.628,750 | 26,43 | 58.984,850 | | | | |
| | | 2.12.01.2.03.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 17.800,000 | 10.000,000 | 4.500,000 | | | | | | 4.500,000 | 45,00 | 22.300,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Consultasi SKPD | | | | 95.000,000 | 73.800,000 | 11.678,000 | | | | | | 11.678,000 | 15,82 | 106.678,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.07 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Penuguan Urusan Pemerintah Daerah | | | | - | - | - | | | | | | - | - | - | | #DIV/0! | | |
| | | 2.12.01.2.07.01 | Pengelolaan Kendaraan Penuguan Dinas atau Kendaranan Umum | | | | - | - | - | | | | | | - | - | - | | | | |
| | | 2.12.01.2.07.10 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Birokrasi Istimewa | | | | - | - | - | | | | | | - | - | - | | | | |
| | | 2.12.01.2.08 | Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 444.919,200 | 446.944,000 | 123.097,310 | | | | | | 123.097,310 | 27,54 | 568.016,510 | | | | |
| | | 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 81.454,800 | 85.000,000 | 14.659,910 | | | | | | 14.659,910 | 17,25 | 96.114,710 | | | | |
| | | 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 363.444,400 | 361.944,000 | 108.437,400 | | | | | | 108.437,400 | 29,55 | 471.901,800 | | | | |
| | | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuguan Urusan Pemerintah Daerah | | | | 288.284,000 | 108.460,000 | 19.693,000 | | | | | | 19.693,000 | 18,16 | 307.977,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemerintahan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penuguan Dinas atau Kendaranan Dinas | | | | 65.000,000 | 35.000,000 | 5.144,000 | | | | | | 5.144,000 | 14,70 | 70.144,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 196.084,000 | 73.460,000 | 14.549,000 | | | | | | 14.549,000 | 19,81 | 210.633,000 | | | | |
| | | 2.12.01.2.09.10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Birokrasi Istimewa | | | | 27.200,000 | | | | | | | | | | 27.200,000 | | | | |
| | | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | 1.452.545,000 | 3.426.767,000 | 27.690,000 | | | | | | 27.690,000 | 0,81 | 1.480.235,000 | | | | |
| | | 2.12.02.01 | Pelaporan Penduduk | | | | 6.450.000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.01.01 | Pelaporan Penduduk | | | | 67.540,000 | 1.115.000,000 | 27.690,000 | | | | | | 27.690,000 | 2,45 | 95.230,000 | | | | |
| | | 2.12.02.01.03 | Perekaman Pelaporan Penduduk | | | | 67.540,000 | | | | | | | | | | 67.540,000 | | | | |
| | | 2.12.02.01.04 | Perekaman Pelaporan Penduduk | | | | - | 1.115.000,000 | 27.690,000 | | | | | | 27.690,000 | 2,45 | 27.690,000 | | | | |
| | | 2.12.02.01.05 | Perekaman Penduduk | | | | 1.324.805,000 | 1.013.767,000 | | | | | | | | | | 1.324.805,000 | | | |
| | | 2.12.02.02.01 | Penyusunan Tata Cara Pencatatan, Pelaksanaan, Pengelolaan dan Penerbitan Peraturan dan Perkawinan | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.02.02 | Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 1.324.805,000 | 1.013.767,000 | | | | | | | | | | | 1.324.805,000 | | |
| | | 2.12.02.02.03 | Pendaftaran Penduduk | | | | 56.200,000 | 1.390.000,000 | | | | | | | | | | 56.200,000 | | | |
| | | 2.12.02.02.03.01 | Koordinasi Antar Lembaran Pemerintah dan Lembaran Peraturan dan Penerbitan dalam Penerbitan Peraturan Penduduk | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.02.03.02 | Pelaporan secara Akif Pendafuratan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Dalam Penduduk | | | | 56.200,000 | | | | | | | | | | | 56.200,000 | | | |
| | | 2.12.02.02.03.03 | Fasilitasi Pendafuratan Penduduk | | | | 1.300.000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.02.04 | Pembinaan dan Pengawasan Penyeleksiangan | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.02.04.02 | Pendafuratan Penduduk | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | 143.285,000 | | | | | | | | | | | 143.285,000 | | | |
| | | 2.12.02.03.01 | Pencatatan Pendaftaran Sipil | | | | 1.850.000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.03.01.01 | Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen atas Dokumen Perda dan Peraturan | | | | 45.190,000 | | | | | | | | | | | 45.190,000 | | | |
| | | 2.12.02.03.01.02 | Penerbitan Peraturan dan Penerbitan Dokumen Sipil | | | | 21.150,000 | | | | | | | | | | | 21.150,000 | | | |
| | | 2.12.02.03.01.03 | Penerbitan Peraturan dan Penerbitan Dokumen Sipil | | | | 44.040,000 | | | | | | | | | | 44.040,000 | | | | |
| | | 2.12.02.03.02 | Penerileksaan Pencatatan Sipil | | | | 78.095,000 | | | | | | | | | | 78.095,000 | | #DIV/0! | | |
| | | 2.12.02.03.02.04 | Penerileksaan secara Akif Pendafuratan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.02.03.02.10 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil | | | | 78.095,000 | | | | | | | | | | 78.095,000 | | | | |
| | | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 267.150,000 | 130.000,000 | | | | | | | | | | 267.150,000 | | | |
| | | 2.12.04.01 | Meningkatkan dan Mengoptimalkan Pengembangan Administrasi Kependudukan | | | | 2.550.000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.04.01.01 | Tersedianya peraturan yang jelas, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam program kerja | | | | 2.700.000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.04.01.02 | Pengembangan Data Kependudukan | | | | 35.350,000 | | | | | | | | | | | 35.350,000 | | | |
| | | 2.12.04.01.03 | Penerileksaan Pencatatan Data Kependudukan | | | | 36.650,000 | | | | | | | | | | | 36.650,000 | | | |
| | | 2.12.04.02 | Penerileksaan dan Penerbitan Data Kependudukan | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.04.02.01 | Penyusunan Tata Cara Pencatatan, Pelaksanaan, Pengelolaan dan Penerbitan Peraturan dan Perkawinan | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.04.02.03 | Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 195.150,000 | 130.000,000 | 19.500,000 | | | | | | 19.500,000 | | 15,00 | 214.650,000 | | | |
| | | 2.12.04.02.03.01 | Penerileksaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 110.850,000 | 130.000,000 | 19.500,000 | | | | | | 19.500,000 | | 15,00 | 130.350,000 | | | |
| | | 2.12.04.02.03.04 | Penerileksaan dan Pengelolaan Data Kependudukan | | | | 25.100,000 | | | | | | | | | | | 25.100,000 | | | |
| | | 2.12.04.02.03.05 | Konsolidasi dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.04.02.03.07 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil | | | | 28.100,000 | | | | | | | | | | | 28.100,000 | | | |
| | | 2.12.04.02.03.08 | Penyaluran Data Kependudukan Yang Aman dan dapat Diandalkan | | | | 28.100,000 | | | | | | | | | | | 28.100,000 | | | |
| | | 2.12.04.02.04 | Penerileksaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.04.02.04.03 | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penerileksaan Data Kependudukan | | | | - | - | - | | | | | | | | | | 56.200,000 | | |
| | | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | 56.200,000 | | | | | | | | | | | | 56.200,000 | | |
| | | 2.12.05.01 | Tersedianya Data Profil Kependudukan dan Pengelolaan | | | | 900.000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.05.01.01 | Penerileksaan dan Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | 56.200,000 | | | | | | | | | | | 56.200,000 | | | |
| | | 2.12.05.01.02 | Penerileksaan dan Pengelolaan Profil Kependudukan setiap kabupaten yang lain | | | | 56.200,000 | | | | | | | | | | | 56.200,000 | | | |
| | | 2.13.00.00.11.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 18.375.580,368 | 18.375.580,368 | | | | | | | | | | 18.375.580,368 | | | |
| | | 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 15.951.289,894 | 20.543.545,086 | 1.622.951,934 | | | | | | 1.622.951,934 | | 7,90 | 17.576.241,828 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---------------|------------|----------------|---------|--|
| | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 6.231.098.029 | 5.046.966.640 | 1.576.136.403 | - | - | - | - | 1.576.136.403 | 31,23 | 7.807.234.432 | | |
| 2.13.01.2.01 | Penercanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 59.000.000 | 42.596.000 | 17.628.200 | - | - | - | - | 17.628.200 | 41,38 | 76.628.200 | | |
| 2.13.01.2.01.01 | Penercanaan Dokumen Penercanaan Perangkat Daerah | | | | 19.000.000 | 14.330.000 | 7.375.200 | - | - | - | - | 7.375.200 | 50,76 | 26.375.200 | #DIV/0! | |
| 2.13.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir kegiatan Realisasi Kredita SKPD | | | | 15.000.000 | 12.916.000 | 6.128.000 | - | - | - | - | 6.128.000 | 47,45 | 21.128.000 | | |
| 2.13.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD | | | | 25.000.000 | 15.150.000 | 6.128.000 | - | - | - | - | 6.128.000 | 47,45 | 29.125.000 | | |
| 2.13.01.2.01.04 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.192.099.000 | 4.409.291.248 | 1.453.190.824 | - | - | - | - | 1.453.190.824 | 31,53 | 6.645.280.824 | | |
| 2.13.01.2.01.05 | Penyelenggaraan Galat dan Tuntangan ASN | | | | 5.157.079.000 | 4.597.126.648 | 1.449.190.824 | - | - | - | - | 1.449.190.824 | 31,53 | 6.605.190.824 | | |
| 2.13.01.2.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 15.000.000 | 6.962.600 | - | - | - | - | - | - | 15.000.000 | #DIV/0! | | |
| 2.13.01.2.02.01 | Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Tanggapan Bencana | | | | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 | 100,00 | 25.000.000 | | |
| 2.13.01.2.02.02 | Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Tanggapan Bencana | | | | 60.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 | 100,00 | 25.000.000 | | |
| 2.13.01.2.02.03 | Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60.000.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | - | - | - | - | 3.000.000 | 20,00 | 63.000.000 | | |
| 2.13.01.2.02.04 | Pengadaan Barang Milik Daerah Perluasan Jurasan | | | | 348.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340.000.000 | | |
| 2.13.01.2.02.05 | Pembentukan Organisasi dan Kordinasi Lantau | | | | 340.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340.000.000 | | |
| 2.13.01.2.02.06 | Penyelidikan dan Penyelesaian Permasalahan | | | | 164.998.029 | 219.424.400 | 39.535.879 | - | - | - | - | 39.535.879 | 18,02 | 204.433.908 | | |
| 2.13.01.2.02.07 | Pembahasan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Lahan | | | | 59.999.829 | 69.425.400 | 9.299.479 | - | - | - | - | 9.299.479 | 13,39 | 69.299.308 | | |
| 2.13.01.2.02.08 | Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 104.999.200 | 149.999.000 | 30.236.400 | - | - | - | - | 30.236.400 | 20,16 | 135.234.600 | | |
| 2.13.01.2.02.09 | Pengelolaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.001.030 | 62.750.000 | 6.050.000 | - | - | - | - | 6.050.000 | 9,64 | 156.960.000 | | |
| 2.13.01.2.02.10 | Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Dariyah Perluasan Jurasan | | | | 55.010.000 | 35.000.000 | 6.050.000 | - | - | - | - | 6.050.000 | 17,29 | 61.060.000 | | |
| 2.13.01.2.02.11 | Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lantau | | | | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 | | |
| 2.13.01.2.02.12 | Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lantau | | | | 55.000.000 | 27.750.000 | - | - | - | - | - | - | - | 55.000.000 | | |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | 1.770.000.000 | 2.618.294.217 | - | - | - | - | - | - | - | 1.770.000.000 | | |
| | | Tertibansaya Lembaga Perwujudan Prayogyakarta Primer | | | 18.625.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | 1.770.000.000 | 2.618.294.217 | - | - | - | - | - | - | - | 1.770.000.000 | | |
| 2.13.02.2.01.01 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | 1.770.000.000 | 2.618.294.217 | - | - | - | - | - | - | - | 1.770.000.000 | | |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Pembangunan Kerjasama Perekonomian Yang di Bantuan | | | 3.400.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.03.2.01.03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pendesaan | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | 6.350.000.000 | 6.298.942.000 | 1.596.965.604 | - | - | - | - | 1.596.965.684 | - | 7.946.965.684 | | |
| | | Peningkatan Perekonomian Administrasi Pemerintahan | | | 34.050.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 6.350.000.000 | 6.298.942.000 | 1.596.965.604 | - | - | - | - | 1.596.965.684 | 25,35 | 7.946.965.684 | | |
| 2.13.04.2.01.01 | Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 125.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 125.000.000 | | |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | 50.000.000 | 27.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 | | |
| 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan | | | | 5.775.000.000 | 6.150.000.000 | 1.739.965.684 | - | - | - | - | 1.739.965.684 | 25,37 | 7.371.965.684 | | |
| 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Perangkat Kepala Desa | | | | 125.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.000.000 | | |
| 2.13.04.2.01.06 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | | | | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 | | |
| 2.13.04.2.01.07 | Pembinaan dan Pengembangan Desa | | | | 200.000.000 | 96.942.000 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000.000 | | |
| 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 | | |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT KURUM ADAT | | | | 7.833.289.894 | 11.426.309.369 | 25.986.250 | - | - | - | - | 25.986.250 | 0,23 | 7.859.276.144 | | |
| | | Meningkatnya Perekonomian Pesisir dan Pariwisata Masyarakat Kemasyarakatan Religius Ekonomi, <td></td> <td></td> <td>33.200.000.000</td> <td>-</td> <td></td> | | | 33.200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.13.05.2.01 | Pembentukan Lembaga Komsosrakatan yang Bergairah di Bidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Desa/Kelurahan/Kota serta Peningkatan Keterlibatan dan Keterwujudan Lembaga Adat yang Sama dalam Desa/Kelurahan/Kota | | | | 7.833.289.894 | 11.426.309.369 | 25.986.250 | - | - | - | - | 25.986.250 | 0,22 | 7.859.276.144 | | |
| 2.13.05.2.01.02 | Peningkatan Kaderisasi Keterlibatan dan Peningkatan Keterwujudan Lembaga Komsosrakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PPK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 1.581.581.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.581.581.326 | | |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kaderisasi Keterlibatan dan Peningkatan Keterwujudan Lembaga Komsosrakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PPK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 2.066.121.911 | 1.123.392.740 | - | - | - | - | - | - | - | 2.066.121.911 | | |
| 2.13.05.2.01.04 | Peningkatan Kaderisasi Keterlibatan dan Peningkatan Keterwujudan Lembaga Komsosrakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PPK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 1.150.000.000 | 1.869.440.020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.150.000.000 | | |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Mengikuti Kompetisi Asas Desa | | | | 1.539.860.000 | 5.311.004.588 | 25.986.250 | - | - | - | - | 25.986.250 | 0,49 | 1.565.846.250 | | |
| 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi dan Pengembangan Desa dalam Mengikuti Kompetisi Asas Desa | | | | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 395.726.657 | 2.522.472.021 | - | - | - | - | - | - | - | 395.726.657 | | |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PPK dalam Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Komasrakatan | | | | 1.000.000.000 | 800.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000.000 | | |
| 2.14.08.00.00.14.00 | DINAS PERGIDDANAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMERDAYAAN PERMIMPINAN DAN PERLINGKUNGAN ANAK | | | | 15.899.249.000 | 11.004.820.000 | - | - | - | - | - | 261.510.000 | 2,38 | 16.160.759.000 | | |
| 2.14. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 15.899.249.000 | 11.004.820.000 | 261.510.000 | - | - | - | - | 261.510.000 | 2,38 | 16.160.759.000 | | |
| 2.14.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 10.224.635.432 | 9.562.930.220 | 2.696.862.994 | - | - | - | - | 2.696.862.994 | 28,20 | 12.921.498.426 | | |
| 2.14.01.2.01 | Penercanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 115.000.000 | 15.915.250 | - | - | - | - | - | 15.915.250 | - | 130.915.250 | | |
| 2.14.01.2.01.01 | Penercanaan Dokumen Penercanaan Perangkat Daerah | | | | - | 15.915.250 | - | - | - | - | - | 15.915.250 | - | 15.915.250 | | |
| 2.14.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 115.000.000 | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | 115.000.000 | | |
| 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 8.900.774.632 | 8.358.210.670 | 2.316.967.615 | - | - | - | - | 2.316.967.615 | - | 11.217.742.247 | | |
| 2.14.01.2.02.01 | Pembangunan dan Penerapan Peraturan Daerah | | | | 8.186.000.000 | 8.358.210.670 | 2.316.967.615 | - | - | - | - | 2.316.967.615 | - | 11.217.742.247 | | |
| 2.14.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (Bilangan) Berencanaan SKPD | | | | 36.000.000.000 | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | 36.000.000.000 | | |
| 2.14.01.2.02.08 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 149.040.005 | 70.000.000 | 32.265.000 | - | - | - | - | 32.265.000 | 46,09 | 81.805.000 | | |
| 2.14.01.2.02.09 | Penercanaan, Penganggaran dan Penerapan Peraturan Daerah | | | | 59.960.000 | 1.100.000 | - | - | - | - | - | - | - | 59.960.000 | | |
| 2.14.01.2.02.03 | Pembangunan dan Penerapan Peraturan Daerah | | | | 1.100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100.000 | | |
| 2.14.01.2.02.04 | Penercanaan dan Penyaluran Bahan Logistik Kantor | | | | 67.720.000 | 1.100.000 | 13.750.000 | - | - | - | - | 13.750.000 | 91,07 | 81.470.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|-------|---------------|---------------|--|--|
| 2.14.01.2.06.05 | Penyelenggaraan Barang Cetak dan Pengprintan | | 59.760.000 | 1 Paket | 15.000.000 | 6.465.000 | | | | | | 5.461.000 | 43.10 | 66.725.000 | | | |
| 2.14.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unteranan | | 59.600.000 | 1 Dokumen | 15.000.000 | 6.550.000 | | | | | | 6.550.000 | 43.67 | 66.150.000 | | | |
| 2.14.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 162.000.000 | 1 Laporan | 25.000.000 | 5.500.000 | | | | | | 5.500.000 | 22.00 | 167.500.000 | | | |
| 2.14.01.2.07 | Pengembangan Sumber Daya Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | - | - | - | - | | | | | | - | - | - | - | | |
| 2.14.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | - | 1 Unit | - | - | | | | | | - | - | - | - | | |
| 2.14.01.2.08 | Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 780.760.000 | 1.004.759.300 | 269.112.129 | - | - | - | - | - | - | 269.112.129 | 26.78 | 1.049.872.929 | | | |
| 2.14.01.2.08.02 | Pembangunan Jaring Komunikasi - Sumber Daya Air dan Listrik | | - | 1 Laporan | 70.674.500 | 9.512.129 | | | | | | 9.512.129 | 13.46 | 9.512.129 | | | |
| 2.14.01.2.08.04 | Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 780.760.000 | 1 Laporan | 934.084.800 | 259.600.000 | | | | | | 259.600.000 | 27.79 | 1.040.360.800 | | | |
| 2.14.01.2.09 | Pembangunan dan Perbaikan Sarana Deraht Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 78.060.000 | 1 Laporan | 114.463.000 | 62.403.000 | | | | | | 62.403.000 | 54.89 | 141.661.000 | | | |
| 2.14.01.2.09.01 | Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemerintah Dinas atau Kendaraan Dinas | | 79.050.000 | 12 Unit | 50.100.000 | 15.212.000 | | | | | | 15.212.000 | 30.36 | 94.272.000 | | | |
| 2.14.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jalan | | - | 1 Unit | 63.945.000 | 47.391.000 | | | | | | 47.391.000 | 74.11 | 47.391.000 | | | |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDIDIKAN | | 800.000.000 | | 554.951.000 | 46.750.000 | - | - | - | - | - | 46.700.000 | 8,42 | 846.750.000 | | | |
| | | Guru yang dilimpahkan an sebagai dosen di universitas | 4.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah sebanyak normal / non normal yang masuk dalam pendidikan perguruan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Ressources Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cakupan penyebarluasan Data Mikro Keluarga dan rumah tangga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pengajar yang berpendidikan dalam karakteristik sosial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.02.2.01 | Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Bidang Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan | | 400.000.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.000.000 | | | |
| 2.14.02.2.01.02 | Penyusunan dan Penerapan Guid Desig Pengembangan Kepedidikan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | 100.000.000 | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | |
| 2.14.02.2.01.04 | Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengembangan Masyarakat tentang Kependidikan | | - | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.14.02.2.01.18 | Pengadaan Kesiap Siaga Pelaksanaan Pendidikan dan Pembentukan Organisasi Penduduk | | 200.000.000 | 5 | 1 Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.000.000 | | | |
| 2.14.02.2.01.23 | Pelaksanaan Real Pendekatan Program Bangga Kencara | | 100.000.000 | 1 Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | |
| 2.14.02.2.02 | Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Cakupan Desa/Kabupaten/Kota | | 400.000.000 | 554.951.000 | 46.750.000 | - | - | - | - | - | - | 46.750.000 | 8,42 | 446.750.000 | | | |
| 2.14.02.2.02.10 | Pelaksanaan Data Hasil Pemantauan Data Keluarga | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | 100.000.000 | | |
| 2.14.02.2.02.13 | Pelaksanaan Data Pengkajian Lapangan dan Pelajaran KB | | 100.000.000 | | 144.500.000 | 46.750.000 | | | | | | 46.750.000 | | 146.750.000 | | | |
| 2.14.02.2.02.15 | Pemberitahuan dan operasionalisasi Rumah Data Kependidikan dan Pengembangan Organisasi Penduduk antara Provinsi Banten/Konvensi di Seluruh Indonesia | | 100.000.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | | | |
| 2.14.02.2.02.18 | Pembinaan dan Pengembangan Pelaporan Rencana Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban | | 100.000.000 | | 56.451.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | #DIV/0! | | |
| | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | 354.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | 8896.394.000 | | 6372.649.000 | 214.760.000 | - | - | - | - | - | 214.760.000 | 3,37 | 9.021.064.000 | | | |
| | | Jumlah Famili berstatus dan status disabilitas dilakukan Willyaya yang dilakukan | 600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Keluarga (CDS) intracriptive Prevention RPS | 600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase mengalami Data Sekarang Diketahui terhadap CB tidak tersebut (sementara) | 600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Cakupan Mendekat Menulis mengalami Jenis Pengang RUMCI | 6.907.500.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengembangan Pendiduk dan KB sesuai Keairan Budaya Lokal | | 2.166.450.000 | | 997.390.000 | 214.760.000 | - | - | - | - | - | 214.760.000 | 21,53 | 2.381.210.000 | | | |
| 2.14.03.2.01.08 | Pengembangan Program KNPBK | | 290.000.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.000.000 | | | |
| 2.14.03.2.01.09 | Pengembangan Distribusi Siswa KIE: Program Bangga Kencara | | 100.000.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | #DIV/0! | | |
| 2.14.03.2.01.10 | Pengembangan Operasional dan Sarana di Balai Penuhyan Banjar Kecamatan | | 1.047.200.000 | | 336.200.000 | 94.760.000 | | | | | | 94.760.000 | 28,19 | 1.141.960.000 | | | |
| 2.14.03.2.01.11 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencara melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (RKK), Rapat Koordinasi Dinas, Dinas dan Mitra kerja | | 480.000.000 | | 400.000.000 | 120.000.000 | | | | | | 120.000.000 | 30,00 | 600.000.000 | | | |
| 2.14.03.2.01.14 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencara Metal Melaka dan Eksotika serta Masa Lalu Rungai | | 100.000.000 | | 114.850.000 | - | | | | | | - | - | 100.000.000 | | | |
| 2.14.03.2.01.15 | Kelakuan Program Bangga Kencara untuk pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra kerja | | 49.250.000 | | 146.340.000 | - | | | | | | - | - | 49.250.000 | | | |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Pelugas Jangkauan KB (PPBJ-KB) | | 1.403.560.000 | | 1316.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.403.560.000 | | | |
| 2.14.03.2.02.04 | Pembinaan dan Pengembangan Pendiduk dan KB sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat (BPK) | | 1.316.000.000 | | 1316.000.000 | - | | | | | | - | - | 1.313.600.000 | | | |
| 2.14.03.2.02.05 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencara di Lira Ijungan dan PPKB KB | | 49.960.000 | | - | - | | | | | | - | - | 49.960.000 | | | |
| | | Hari ini kita mengingatkan bahwa pembinaan, pengembangan, pelatihan dan pengamanan Program Bangga Kencara untuk | | | 2.536.859.000 | - | | | | | | - | - | - | - | | |
| 2.14.03.2.03 | Pengembangan dan Pendidistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | 3.115.769.000 | | 3674.459.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.115.769.000 | | | |
| 2.14.03.2.03.01 | Pengembangan Pendidistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan | | 95.400.000 | | 96.300.000 | - | | | | | | - | - | 95.400.000 | | | |
| 2.14.03.2.03.03 | Pembangunan Kestabilan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jantung Paragoni (MKP) | | 2.970.369.000 | | 3.578.119.000 | - | | | | | | - | - | 2.970.369.000 | | | |
| 2.14.03.2.03.04 | Pembangunan Dukungan A�aymen Kompleks Berat dan Dukungan A�aymen Kompleks Ringan | | 50.000.000 | | - | - | | | | | | - | - | 50.000.000 | | | |
| 2.14.03.2.03.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Berbasis | | - | | - | - | | | | | | - | - | - | 2.120.525.000 | | |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdyaan dan Penitigakan Peran Organisasi dan Kebutuhan Organisasi Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan BerKB | | 2.120.525.000 | | 384.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.120.525.000 | | | |
| 2.14.03.2.04.02 | Melakukan Pengembangan dan Pengembangan di Komunitas KB | | 2.004.259.000 | | - | - | | | | | | - | - | 2.004.259.000 | | | |
| | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Terpusat Jantung Paragoni (MKP) | | | 61.650.000 | - | | | | | | - | - | - | - | | |
| 2.14.03.2.04.08 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencara di Kampung Kajang Berkualitas | | 116.275.000 | | 394.800.000 | - | | | | | | - | - | 116.275.000 | | | |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | 6.292.945.000 | | 4.077.220.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.292.945.000 | | | |
| | | MUDIK (Medan Untuk Perjalanan Kerja) | 4.850.400.000 | | - | - | | | | | | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|------------|--|--|
| 2.16.02.2.01.09 | Manajemen Krisis dan Bencana | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | | | |
| 2.16.02.2.01.10 | Pengurangan Sumber Daya Komunikasi Publik | 283.000.000 | | 30.000.000 | 8.506.000 | | | | | | | | | | | 8.506.000 | 28,35 | 291.506.000 | | | | |
| 2.16.02.2.01.11 | Pengurangan Tata Kelola Kriminil Informatik di Daerah | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kembangsaan | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000.000 | | | | |
| | Kordinasi Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | 525.000.000 | 179.313.500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spesialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | | 275.544.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 2.233.979.000 | 8.777.552.000 | 210.041.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.041.600 | 420,08 | 2.444.000.000 | | | | | |
| | Terlaksananya pengelolaan Wilayah Administratif Kabupaten/Kota dengan | 48.550.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Didapatkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.748.469.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.748.469.000 | | | | | |
| 2.16.03.2.01.01 | Pendataan Nama Domai Pemerintah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 2.16.03.2.01.02 | Penatakanan dan Pengawasan Nama Domai dan Sub Domai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 24.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 24.500.000 | | | | |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1.698.969.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.698.969.000 | #DIV/0! | | | |
| | Penyelenggaran Nama Domai dan Sub Domai | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domai Pemerintah Daerah | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 495.518.000 | 8.727.552.000 | 210.041.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.041.600 | 2,41 | 695.551.000 | | | | | |
| 2.16.03.2.02.01 | Penatakanan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | | |
| 2.16.03.2.02.02 | Implementasi Program Reversi Indra dan Anggaran Pemerintah Bantuan Elektro | 96.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 96.000.000 | | | | |
| 2.16.03.2.02.04 | Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 57.010.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 57.010.000 | | | | |
| 2.16.03.2.02.06 | Konsolidasi dan Sincronisasi Data dan Informasi Elektronik | 28.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | | |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.08 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | - | | | | | | | | | | | | | | | | 218.000.000 | | | | |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 218.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03.2.02.12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SIRE | 74.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 74.500.000 | | | | |
| | Koordinasi Pemerintah Pusat-Data Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analisa dan Pengembangan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.775.000 | 97,85 | 10.775.000 | | |
| | Analisa dan Pengembangan Data dan Informasi | | | | 25.425.000 | 18.675.000 | | | | | | | | | | 18.675.000 | 73,45 | 18.675.000 | | | | |
| | Evaluasi penyelenggaraan SIRE di Inggris Raya | | | | 1.899.168.000 | 130.641.600 | | | | | | | | | | 130.641.600 | 6,88 | 130.641.600 | | | | |
| | Penyelenggaran Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | 156.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | 50.000.000 | 33,33 | 50.000.000 | | | | |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK | 130.540.000 | 175.000.000 | 171.017.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.017.000 | 99,72 | 301.557.000 | | | | | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELINGGAARAAN STATISTIK SEKTORAL | 130.540.000 | 175.000.000 | 171.017.000 | | | | | | | | | | | 171.017.000 | 97,72 | 301.557.000 | | | | | |
| | Terlaksananya pengelolaan data statistik sektor | 1.825.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 130.540.000 | 175.000.000 | 171.017.000 | | | | | | | | | | | 171.017.000 | 99,72 | 301.557.000 | | | | | |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sincronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Pengembangan Data Sektoral | 85.540.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 85.540.000 | | | | |
| 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaran Mutu Statistik Daerah yang Benar-Benar | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 2.20.02.2.01.03 | Membentuk Mekatola Statistik Sektoral | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | | |
| | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | | | | 175.000.000 | 171.017.000 | | | | | | | | | | 171.017.000 | 99,72 | 171.017.000 | | | | |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN | 315.000.000 | 120.775.000 | 107.889.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.889.000 | 89,33 | 422.889.000 | | | | | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELINGGAARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 315.000.000 | 120.775.000 | 107.889.000 | | | | | | | | | | | 107.889.000 | 89,33 | 422.889.000 | | | | | |
| | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Sosial Keamanan | 2.775.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi Sosial Keamanan | 295.000.000 | 120.775.000 | 107.889.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.889.000 | 89,33 | 402.889.000 | | | | | |
| 2.21.02.2.01.01 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 250.000.000 | | | | |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 2.21.02.2.01.04 | Penyelidikan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | | | 120.775.000 | 107.889.000 | | | | | | | | | | 107.889.000 | 89,33 | 127.889.000 | | | | |
| 2.21.02.2.02 | Pendapat Pojok dan Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | 20.000.000 | | | |
| 2.21.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | |
| 2.17.3.30.31.31.70 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KEcil, MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KEcil, DAN MENENGAH | 159.331.498.739 | 11.817.552.932 | 325.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.000.000 | 2,75 | 159.656.468.739 | | | | | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.265.495.000 | 10.238.800.092 | 2.979.401.746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.979.401.746 | 29,10 | 5.244.806.746 | | | | | |
| 2.17.01.2.01 | Penercanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56.200.000 | 25.000.000 | 17.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.000.000 | 68,00 | 73.200.000 | | | | | |
| 2.17.01.2.01.01 | Penercanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | 31.200.000 | | 15.000.000 | 8.100.000 | | | | | | | | | | 8.100.000 | 54,00 | 39.300.000 | | | | | |
| 2.17.01.2.01.06 | Koordinasi dan Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Mitigasi Risiko Kreditor | 25.000.000 | | 10.000.000 | 8.900.000 | | | | | | | | | | 8.900.000 | 89,00 | 33.900.000 | | | | | |
| 2.17.01.2.01.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | 8.827.466.465 | 2.513.936.645 | | | | | | | | | | 2.513.936.645 | 28,48 | 2.513.936.645 | | | | | |
| 2.17.01.2.01.03 | Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN | 8.827.466.465 | 2.513.936.645 | 2.513.936.645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.513.936.645 | 28,48 | 2.513.936.645 | | | | | |
| 2.17.01.2.01.04 | Pembentukan dan Pengembangan Organisasi | 265.399.000 | 263.393.645 | 64.022.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.022.000 | 22,74 | 25.000.000 | | | | | |
| 2.17.01.2.01.05 | Peningkatan Komponen Instansi Lahir/Penerapan Standarisasi Kelembagaan | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.02 | Peningkatan Organisasi dan Perkembangan Kantor | 175.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 175.000.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.03 | Peningkatan Peraturan Rumah Tangga | 60.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 60.000.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.04 | Peningkatan Bahan Logistik Kantor | 100.000.000 | | | 75.000.000 | 26.100.000 | | | | | | | | | | 26.100.000 | 34,80 | 126.100.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.05 | Peningkatan Barang Cadangan dan Pengadaan | 200.000.000 | | | 93.323.627 | 12.957.500 | | | | | | | | | | 12.957.500 | 17,10 | 214.957.500 | | | | |
| 2.17.01.2.01.06 | Peningkatan Bahan Baku dan Peredaran Pendirian-Undangan | 58.000.000 | | | 65.000.000 | 11.500.000 | | | | | | | | | | 11.500.000 | 17,62 | 65.500.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.09 | Peningkatan Rapot Koordinasi dan Komunikasi SKPD | 155.000.000 | | | 50.000.000 | 10.765.000 | | | | | | | | | | 10.765.000 | 21,57 | 165.765.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.07 | Pengembangan Milik Daerah Penunjang Urusan | 124.669.200 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | 124.669.200 | | | | |
| 2.17.01.2.01.10 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 124.669.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 124.669.200 | | | |
| 2.17.01.2.01.08 | Pengembangan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 870.760.000 | | | 945.000.000 | 302.586.061 | | | | | | | | | | 302.586.061 | 32,02 | 1.173.306.861 | | | | |
| 2.17.01.2.01.09 | Pengembangan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 170.000.000 | | | 235.000.000 | 58.214.061 | | | | | | | | | | 58.214.061 | 24,77 | 228.214.061 | | | | |
| 2.17.01.2.01.04 | Pengembangan Jasa Pengolahan limbah Kantor | 705.700.000 | | | 710.000.000 | 243.477.000 | | | | | | | | | | 243.477.000 | 34,42 | 945.127.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.05 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 448.845.000 | | | 158.000.000 | 81.462.500 | | | | | | | | | | 81.462.500 | 51,56 | 530.307.500 | | | | |
| 2.17.01.2.01.06 | Pengembangan dan Perbaikan Infrastruktur | 250.000.000 | | | 83.000.000 | 20.762.500 | | | | | | | | | | 20.762.500 | 25,02 | 270.762.500 | | | | |
| 2.17.01.2.01.09 | Peningkatan dan Perbaikan Dinas dan Kondisi | 100.000.000 | | | 39.767.500 | | | | | | | | | | | | | | 39.767.500 | | | |
| 2.17.01.2.01.05 | Pembentahan Metab | 25.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| 2.17.01.2.01.09 | Pembentahan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | 150.000.000 | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | | | | | | 50.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | | | | |
| 2.17.01.2.01.09 | Pembentahan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana | 150.000.000 | | | 50.000.000 | 50. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--|--|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|--|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--|--|
| 2.17.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jaringan | | | | 23.845.000 | 25.000.000 | 19.700.000 | | | | | 10.700.000 | 42,80 | 34.545.000 | | | | |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| | Peningkatan Jumlah Operasional Aktif | 525.000.000 | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2.17.02.2.02 | Pembentukan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2.17.02.2.02.01 | Peningkatan izin Usaha Pemakaian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Untuk Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.03.2.01.04 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2.17.04.2.01.01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keanggotan Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | 700.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasi Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengertahan Perkoperasi Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | 125.000.000 | 575.000.000 | 75.000.000 | | | | | | 75.000.000 | 13,04 | 200.000.000 | | | |
| 2.17.06.2.01 | Pembentukan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.06.2.01.05 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambang, Akses Pasar, Akses Pembelian, Peningkatan Keterbukaan, Penilaian Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Mikro | | | | 125.000.000 | 575.000.000 | 75.000.000 | | | | | | 75.000.000 | 13,04 | 200.000.000 | | | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENINGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIRKO (UMKM) | | | | 9.106.488.739 | 11.112.552.932 | 200.000.000 | | | | | | 200.000.000 | 1,80 | 9.306.488.739 | | | |
| | Peningkatan jumlah UMKM | 26.100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendekatan Pendekatan Pendirian, Pengembangan Kebutuhan dan Koordinasi dengan Peningkatan Keperingintahan | | | | 9.106.488.739 | 11.112.552.932 | 200.000.000 | | | | | | 200.000.000 | 1,80 | 9.306.488.739 | | | |
| 2.17.07.2.01.02 | Pembentukan mitra Komiteen Usaha Mikro | | | | 130.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.07.2.01.04 | Pembentukan Kebutuhan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | 8.431.488.739 | 10.812.552.932 | 100.000.000 | | | | | | 100.000.000 | 0,92 | 8.531.488.739 | | | |
| 2.17.07.2.01.05 | Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemimpin Koperasi dalam Pembentukan Usaha Mikro | | | | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.07.2.01.15 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kompetensi SDM UMKM dan Kompetensi dan Pelatihan | | | | 545.000.000 | 300.000.000 | 100.000.000 | | | | | | 100.000.000 | 33,33 | 645.000.000 | | | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN | | | | 150.000.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | 33,33 | 150.050.000.000 | | | |
| | Peningkatan jumlah pasar terdesentralisasi | 6.750.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | 150.000.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | 33,33 | 150.050.000.000 | | | |
| 2.17.08.2.01.06 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | 150.000.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | 33,33 | 150.050.000.000 | | | |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 2.499.000.000 | 1.389.370.000 | 345.100.000 | | | | | | 195.100.000 | 14,04 | 2.694.100.000 | | | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | 1.875.000.000 | 1.014.420.000 | 195.100.000 | | | | | | 195.100.000 | 19,23 | 2.070.100.000 | | | |
| | Peningkatan jumlah pasar terdesentralisasi | 10.050.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 1.875.000.000 | 1.014.420.000 | 195.100.000 | | | | | | 195.100.000 | 19,23 | 2.070.100.000 | | | |
| 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 1.375.000.000 | 664.450.000 | 195.100.000 | | | | | | 195.100.000 | 29,33 | 1.570.100.000 | | | |
| 3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 505.000.000 | 349.770.000 | | | | | | | | | 500.000.000 | | | |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | 250.000.000 | 199.950.000 | 100.000.000 | | | | | | 100.000.000 | 50,01 | 350.000.000 | | | |
| | Peningkatan jumlah pasar terdesentralisasi | 3.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Keluarkan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | 250.000.000 | 199.950.000 | 100.000.000 | | | | | | 100.000.000 | 50,01 | 350.000.000 | | | |
| 3.30.04.2.02.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Keluarkan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.04.2.02.03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 150.000.000 | 199.950.000 | 100.000.000 | | | | | | 100.000.000 | 50,01 | 250.000.000 | | | |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | 2.400.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaran Promosi dan Mit Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 3.30.05.2.01.02 | Pembinaan Diklat Nasional | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 3.30.05.2.01.05 | Peningkatan Cita Produksi Ekspor | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 149.000.000 | 175.000.000 | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | 28,37 | 199.000.000 | | | |
| | Peningkatan jumlah aktivitas inspeksi dan perlengkapan standar di tingkat daerah, teritorial, serta internasional | 677.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metropol Legis Benugo Tera, Tera Utara, dan Panawangan | | | | 149.000.000 | 175.000.000 | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | 28,37 | 199.000.000 | | | |
| 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metropol Legis Benugo Tera, Tera Utara | | | | 99.000.000 | 160.000.000 | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | 31,25 | 149.000.000 | | | |
| 3.30.06.2.01.02 | Pengawas/Penyalur Metropol Legis | | | | 50.000.000 | 15.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | 225.000.000 | | | | | | | | | | | 225.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---------------|-------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERLUAN KADET | | | 900.000.000 | 741.020.000 | 250.000.000 | - | - | - | - | 250.000.000 | 35,74 | 1.150.000.000 | | |
| | Meningkatnya pengembangan kapasitas kader dan ketaerlaksanaan | 2.350.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kemerdekaan | | | 900.000.000 | 741.020.000 | 250.000.000 | - | - | - | - | 250.000.000 | 35,74 | 1.150.000.000 | | |
| 2.19.04.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemerdekaan Tingkat Daerah | | | 500.000.000 | 500.000.000 | 250.000.000 | | | | | 250.000.000 | 50,00 | 750.000.000 | | |
| 2.19.04.2.01.03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kemerdekaan Tingkat Daerah | | | 400.000.000 | 241.030.000 | | | | | | | - | 400.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | 14.159.504.082 | 252.111.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000 | 19,83 | 14.209.504.082 | | |
| 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TAKIR DESTINASI PARIWISATA | | | 6.938.504.082 | | | - | - | - | - | - | - | 6.938.504.082 | | |
| | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | 27.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02.2.01 | Peningkatan Daya Tarik Wilayah Kabupaten/Kota | | | 600.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 600.000.000 | | |
| 3.26.02.2.01.06 | Peningkatan Daya Tarik Wilayah Uggulan Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | | | | | | | | 500.000.000 | | |
| 3.26.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wilayah Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | | | | | | | | 100.000.000 | | |
| 3.26.02.2.03 | Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 6.378.314.082 | - | - | - | - | - | - | | | 6.378.314.082 | | |
| 3.26.02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 4.498.514.082 | | | | | | | | | 4.498.514.082 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02.2.03.04 | Pengabdian/Penelitian/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata | | | 1.200.000.000 | | | | | | | | | 1.200.000.000 | | |
| 3.26.02.2.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 650.000.000 | | | | | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | 4.100.000.000 | | | - | - | - | - | - | | 4.100.000.000 | #DIV/0! | |
| | Meningkatnya permintaan destinasi | 17.250.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Keterbatasnya sumber destinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 4.100.000.000 | | | - | - | - | - | - | | 4.100.000.000 | | |
| 3.26.03.2.01.03 | Peningkatan dan Penyampaian Informasi Pariwisata Pariwisata Banyak dari Luar Negeri | | | 775.000.000 | | | | | | | | | 775.000.000 | | |
| 3.26.03.2.01.04 | Peningkatan Keja Saman dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | | | 625.000.000 | | | | | | | | | 625.000.000 | | |
| 3.26.03.2.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | 200.000.000 | | | | | | | | | 200.000.000 | | |
| 3.26.03.2.01.06 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Banyak Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 1.800.000.000 | | | | | | | | | 1.800.000.000 | | |
| 3.26.03.2.01.07 | Pengabdian Promosi Melalui Media Cetar, Elektronik, dan Media Lainnya Banyak dari Luar Negeri | | | 700.000.000 | | | | | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI KINERJA DAN PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELIGENSI | | | 550.000.000 | | | - | - | - | - | - | | 550.000.000 | | |
| | Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi kreatif | 2.825.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.04.2.02 | Penyeimbangan Ekonomi Ekonomi Kreatif | | | 550.000.000 | | | - | - | - | - | - | | 550.000.000 | | |
| 3.26.04.2.02.03 | Fasilitasi Pendanaan dan Pembinaan | | | 550.000.000 | | | | | | | | | 550.000.000 | | |
| 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | 2.571.000.000 | 252.111.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000 | 19,83 | 2.621.000.000 | | |
| | Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi kreatif | 6.300.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bertujuan menyampaikan informasi dan edukasi mengenai sumber daya dan potensi destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Daerah | | | 2.571.000.000 | 252.111.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000 | 19,83 | 2.621.000.000 | | |
| 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreatif Produk di Dinas Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | 1.450.000.000 | 252.111.000 | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | 19,83 | 1.500.000.000 | | |
| 3.26.05.2.01.06 | Peningkatan Kompetensi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | 650.000.000 | | | | | | | | | 650.000.000 | | |
| 3.26.05.2.01.08 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKDKN | | | - | | | | | | | | | | | |
| 3.26.05.2.01.09 | Hembardaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | | | 471.000.000 | | | | | | | | | 471.000.000 | | |
| 3.26.05.2.01.10 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | - | | | | | | | | | | | |
| 3.26.05.2.01.11 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | - | | | | | | | | | 275.000.000 | | |
| 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | 275.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 275.000.000 | | |
| 3.26.05.2.02.01 | Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | 275.000.000 | | | - | - | - | - | | | 275.000.000 | #DIV/0! | |
| 3.26.05.2.02.02 | Dikurangi Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Industri | | | 275.000.000 | | | | | | | | | 275.000.000 | | |
| 2.24.23.03.00.20.00 | DINAS KEARIFAN RUMAH DAN PERPUSTAKAAN | | | 6.568.805.869 | 6.568.805.869 | | | | | | | | 6.568.805.869 | | |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | 700.000.000 | 1.750.000.000 | | - | - | - | - | - | | 700.000.000 | | |
| 2.23.01 | PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 5.360.424.609 | 4.888.116.438 | 1.567.605.168 | - | - | - | - | 1.567.605.168 | | #DIV/0! | 6.928.029.637 | |
| 2.23.01.2.01 | Penerancangan, Penggarapan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 95.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 95.000.000 | | |
| 2.23.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Penerancangan Perangkat Daerah | | | 25.000.000 | | | | | | | | | 25.000.000 | | |
| 2.23.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKD | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2.23.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2.23.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKD | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2.23.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKD | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2.23.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cakupan Kinerja dan Akhir Realistik Kineda SKDKN | | | 70.000.000 | | | | | | | | | 70.000.000 | | |
| 2.23.01.2.01.07 | Penyusunan dan Penetapan SKDKN | | | 4.392.244.461 | 6.790.104.030 | 1.403.243.928 | - | - | - | - | 1.403.243.928 | 31,26 | 5.285.792.389 | #DIV/0! | |
| 2.23.01.2.01.08 | Penyusunan dan Penetapan SKDKN | | | 4.392.244.461 | 4.392.244.461 | 1.403.243.928 | | | | | 1.403.243.928 | 31,26 | 5.285.792.389 | | |
| 2.23.01.2.01.09 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 303.959.800 | 117.680.000 | 46.308.500 | - | - | - | - | 46.308.500 | 41,10 | 349.268.300 | | |
| 2.23.01.2.01.10 | Peningkatan Komponen Instansi Litis/Penerangan | | | 14.050.000 | | | | | | | | | 14.050.000 | | |
| 2.23.01.2.01.02 | Peningkatan Perilaku dan Perbaikan Kinerja | | | 191.550.000 | 10.480.000 | 7.558.500 | - | - | - | - | 7.558.500 | 70,21 | 66.538.500 | | |
| 2.23.01.2.01.03 | Peningkatan Perilaku dan Perbaikan Kinerja | | | 77.150.000 | 15.000.000 | 17.400.000 | - | - | - | - | 17.400.000 | 50,29 | 74.600.000 | | |
| 2.23.01.2.01.04 | Peningkatan Bantuan Cetak dan Pengembangan | | | 42.154.000 | 19.200.000 | 8.645.000 | - | - | - | - | 8.645.000 | 41,90 | 50.199.800 | | |
| 2.23.01.2.01.05 | Peningkatan Bahan Bacauan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | 28.200.000 | 10.000.000 | 1.740.000 | - | - | - | - | 1.740.000 | 17,40 | 29.940.000 | | |
| 2.23.01.2.01.06 | Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 82.675.000 | 38.000.000 | 11.545.000 | - | - | - | - | 11.545.000 | 30,43 | 94.240.000 | | |
| 2.23.01.2.01.07 | Pengembangan Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah | | | 58.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 58.000.000 | | |
| 2.23.01.2.01.08 | Pengembangan Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah | | | 58.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 58.000.000 | | |
| 2.23.01.2.01.09 | Pengembangan Milik Daerah Peningkatan Gedung Kantor atau Balai | | | 58.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 58.000.000 | | |
| 2.23.01.2.01.10 | Pengembangan Milik Daerah Peningkatan Gedung Kantor atau Balai | | | 58.000.000 | - | - | - | - | - | - | | | 58.000.000 | | |
| 2.23.01.2.01.11 | Pengembangan Milik Daerah Peningkatan Gedung Kantor atau Balai | | | 271.184.408 | 271.184.408 | 85.575.340 | - | - | - | - | 85.575.340 | 31,56 | 356.759.748 | | |
| 2.23.01.2.01.12 | Peningkatan Jasa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | 53.533.608 | 73.831.000 | 14.297.940 | - | - | - | - | 14.297.940 | 19,37 | 67.651.548 | | |
| 2.23.01.2.01.03 | Peningkatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 11.248.000 | 20.000.000 | 6.975.000 | - | - | - | - | 6.975.000 | 34,88 | 18.215.000 | | |
| 2.23.01.2.01.04 | Peningkatan Jasa Perjalanan Umum Kantor | | | 204.972.000 | 192.907.200 | 64.302.400 | - | - | - | - | 64.302.400 | 33,13 | 269.274.400 | | |
| 2.23.01.2.01.05 | Peningkatan Jasa Pemeliharaan Gawai Pemerintah | | | 250.794.000 | 114.646.000 | 32.477.400 | - | - | - | - | 32.477.400 | 28,45 | 283.211.400 | | |
| 2.23.01.2.01.06 | Peningkatan Jasa Pemeliharaan Gawai Pemerintah | | | 45.240.000 | 49.046.000 | 13.788.900 | - | - | - | - | 13.788.900 | 27,10 | 58.528.900 | | |
| 2.23.01.2.01.07 | Peningkatan Jasa Pemeliharaan Gawai Pemerintah | | | 45.240.000 | 49.046.000 | 13.788.900 | - | - | - | - | 13.788.900 | 27,10 | 58.528.900 | | |
| 2.23.01.2.01.08 | Peningkatan Jasa Pemeliharaan Gawai Pemerintah | | | 205.494.000 | 65.108.000 | 19.188.500 | - | - | - | - | 19.188.500 | 29,47 | 224.682.500 | | |
| 2.23.01.2.01.09 | Peningkatan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|----------------|---------|--|
| 3.27.02.2.06 | Penyediaan Bantuan Pendidikan dan Sumber Belajar | | 5.055.680.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.055.680.000 | | |
| 3.27.02.2.06.02 | Pengadaan Bantuan Pendidikan dan Sumber Belajar | | 5.055.680.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.055.680.000 | | |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 | | |
| 3.27.03.2.01 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Vorasepatra prasarana pertanian | 34.207.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 | abru/bi | |
| 3.27.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinergisasi Prasarana Pertanian | | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 | | |
| 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.03.2.02.02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.03.2.02.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Utama Tertinggi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Hewan DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | 1.143.450.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.143.450.000 | | |
| 3.27.04.2.01 | Peningkatan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tertibaksaraya kebersihan dan kesehatan hewan dan kebersihan masyarakat veteriner | 4.800.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04.2.01.03 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04.2.01.08 | Pembentukan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04.2.03 | Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Jasa Medis Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 1.143.450.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.143.450.000 | | |
| 3.27.04.2.03.02 | Penyelenggaraan dan Pengembangan Jasa Medis Veteriner | | 1.143.450.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.143.450.000 | | |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengwasanaan Peraturan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04.2.04.02 | Penerapan dan Pengwasanaan Peraturan Produk Hewan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04.2.04.10 | Pengwasanaan Unit Usaha Produk Hewan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengwasanaan Peraturan Teknis Akreditasi Hewan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.27.04.2.05.03 | Pengembangan Kesehatan Hewan pada Unit Usaha | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.00.00.00.22.00 | INSPEKTORAT KABUPATEN | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | 16.345.713.665 | 5.896.765.000 | 351.261.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.261.000 | 5,96 | 16.698.974.665 | | |
| 6.01.01 | PROGRAM PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 12.480.319.915 | 12.383.051.813 | 3.517.977.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.517.977.239 | - | 16.200.997.154 | | |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 20.000.000 | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000.000 | | |
| 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 20.000.000 | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000.000 | | |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 11.757.646.815 | 11.137.818.812 | 3.333.788.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.333.788.239 | 39,93 | 15.091.385.054 | | |
| 6.01.01.2.02.01 | Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN | | 11.757.646.815 | 11.137.818.812 | 3.333.788.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.333.788.239 | 39,93 | 15.091.385.054 | | |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepapatan Perangkat Daerah | | 96.000.000 | 120.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.000.000 | | |
| 6.01.01.2.05.03 | Pendaftaran dan Pengelolaan Administrasi Kepapatan | | 6.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000.000 | | |
| 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | | 90.000.000 | 120.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.000.000 | | |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 389.390.100 | 514.401.800 | 87.971.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.971.000 | 17,09 | 477.331.100 | | |
| 6.01.01.2.06.01 | Pembentukan Komponen Instansi Litis/Penerangan | | 25.000.000 | 50.000.000 | 11.437.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.437.000 | 22,87 | 36.437.000 | | |
| 6.01.01.2.06.02 | Penyelidikan Perilaku dan Penerapan Kantor | | 125.571.600 | 100.000.000 | 22.845.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.845.000 | 22,85 | 148.416.600 | | |
| 6.01.01.2.06.04 | Pembentukan Bahan Logistik Kantor | | 75.000.000 | 75.000.000 | 11.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.000.000 | 14,67 | 86.000.000 | | |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyelidikan Bahan Cetak dan Pengendalian | | 78.908.500 | 159.631.800 | 25.539.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.539.000 | 16,00 | 103.347.500 | | |
| 6.01.01.2.06.06 | Penyelidikan Bahan Baku dan Perlakuan Perindustrian-Undangan | | 25.000.000 | 30.000.000 | 12.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.300.000 | 41,00 | 37.300.000 | | |
| 6.01.01.2.08.09 | Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 60.000.000 | 100.000.000 | 4.850.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.850.000 | 4,85 | 64.850.000 | | |
| 6.01.01.2.08.27 | Pengabdian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.01.2.07.01 | Pengembangan dan Perbaikan Perangkat Daerah | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.01.2.08.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 299.393.000 | 350.583.200 | 63.251.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.251.000 | 18,04 | 363.244.000 | | |
| 6.01.01.2.08.09 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 150.000.000 | 200.000.000 | 22.521.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.521.400 | 11,26 | 172.521.400 | | |
| 6.01.01.2.08.04 | Pembentukan dan Konsolidasi Organisasi Kependidikan | | 149.991.000 | 150.583.200 | 40.729.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.729.600 | 27,05 | 190.729.600 | | |
| 6.01.01.2.08.08 | Pembentukan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 120.000.000 | 230.000.000 | 33.087.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.087.700 | 14,36 | 153.037.700 | | |
| 6.01.01.2.08.01 | Pembentukan dan Perbaikan Perangkat Daerah | | 50.000.000 | 50.000.000 | 18.452.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.452.000 | 36,90 | 68.452.000 | | |
| 6.01.01.2.08.09 | Pembentukan dan Perbaikan Perangkat Daerah | | 40.000.000 | 110.000.000 | 8.355.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.355.000 | 7,60 | 48.365.000 | | |
| 6.01.01.2.08.10 | Pembentukan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.01.2.08.01.11 | Pembentukan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | 30.000.000 | 70.000.000 | 6.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.200.000 | 8,86 | 36.200.000 | | |
| 6.01.01.2.08.02 | Pembentukan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.01.2.08.09.11 | Pembentukan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balai | | 30.000.000 | 70.000.000 | 6.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.200.000 | 8,86 | 36.200.000 | | |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | 3.356.296.500 | 4.963.696.250 | 313.656.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.656.000 | - | 3.669.862.500 | | |
| 6.01.02.01 | Penyeleenggaran Pengawasan Internal | | 2.851.951.500 | 4.320.731.250 | 785.406.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785.406.000 | 6,54 | 3.136.457.500 | | |
| 6.01.02.01.01 | Peningkatan Kreativitas Perangkat Daerah | | 517.096.000 | 1.100.000.000 | 31.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.600.000 | - | 517.096.000 | | |
| 6.01.02.01.02 | Peningkatan Kreativitas Perangkat Daerah | | 31.600.000 | 46.900.000 | 36.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.300.000 | 19,40 | 36.300.000 | | |
| 6.01.02.01.03 | Buku Laporan Kinerja | | 795.500.000 | 484.436.250 | 1.350.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350.000 | 0,28 | 795.850.000 | | |
| 6.01.02.01.04 | Buku Laporan Keuangan | | 298.000.000 | 401.300.000 | 107.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.500.000 | - | 298.000.000 | | |
| 6.01.02.01.05 | Pengembangan dan Peningkatan Internal | | 259.575.000 | 1.160.000.000 | 107.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.500.000 | 27,27 | 377.275.000 | | |
| 6.01.02.01.06 | Monitoring dan Evaluasi Internal | | 500.000.000 | 750.000.000 | 132.754.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.754.000 | 16,74 | 432.754.000 | | |
| 6.01.02.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Hasil Penerapan APPK dan Tindak Lanjut Hasil Penerapan APPK | | 169.940.500 | 195.943.000 | 6.895.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.895.200 | 5,95 | 176.850.500 | | |
| 6.01.02.02 | Penyeleenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | 505.455.000 | 601.965.000 | 26.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.250.000 | 4,69 | 533.405.000 | | |
| 6.01.02.02.01 | Peningkatan dan Perbaikan Perangkat Daerah | | 165.155.000 | 189.963.000 | 28.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.250.000 | - | 185.155.000 | | |
| 6.01.02.02.02 | Pengembangan Perangkat Daerah | | 340.000.000 | 500.000.000 | 28.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.250.000 | 5,65 | 368.250.000 | | |
| 6.01.02.03 | PROGRAM PERUBAAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | 306.497.250 | 933.068.750 | 37.665.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.665.000 | 4,03 | 344.097.250 | | |
| 6.01.02.03.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Peningkatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.02.03.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6.01.02.03.03 | Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi | | 250.000.000 | 550.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.250.000 | | |
| 6.01.02.03.04 | Perbaikan dan Peningkatan Kinerja | | 174.250.000 | 550.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.250.000 | | |
| 6.01.02.03.05 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan | | 132.237.250 | 133.068.750 | 37.665.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.665.000 | 28,26 | 169.842.250 | | |
| 6.01.05.00.00.23.00 | SARDAN PENGEMBANGAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | 11.179.595.724 | 8.181.822.060 | 2.259.459.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.259.459.465 | 27,62 | 13.439.051.189 | | |
| 5.01 | URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

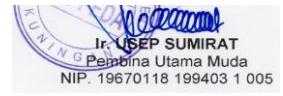
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---------------|-------|---------------|---------|-------------|--|--|
| 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 40.000.000,00 | 20.000.000 | 9.950.000 | | | | | 9.950.000 | 49,75 | 49.950.000 | | | | |
| 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiasi Realisasi Kewirausahaan | | | 50.000.000 | 20.000.000 | 8.720.000 | | | | | 8.720.000 | 43,60 | 58.720.000 | | | | |
| 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 297.280.000 | 40.000.000 | | | | | | | | 297.280.000 | | | | |
| 5.01.01.2.01.08 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.403.442.788 | 5.851.704.438 | 1.799.110.491 | + | + | + | + | 1.799.110.491 | 36,50 | 6.802.712.278 | | | | |
| 5.01.01.2.01.09 | Pembangunan Infrastruktur | | | 6.074.710.000 | 5.873.704.585 | 1.793.630.495 | + | + | + | + | 1.793.630.495 | 30,14 | 6.671.340.717 | | | | |
| 5.01.01.2.01.10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 25.000.000 | 8.000.000 | 5.500.000 | | | | | 5.500.000 | 68,75 | 30.500.000 | | | | |
| 5.01.01.2.01.11 | Analisis dan Pengelolaan Permasalahan Daerah | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 5.01.01.2.01.12 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 50.000.000 | | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 5.01.01.2.01.13 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 896.429.000 | 288.064.800 | 86.372.000 | - | - | - | - | 86.372.000 | 26,88 | 981.861.800 | | | | |
| 5.01.01.2.02 | Pembentukan Kompleks Instansi Littih/Penerangan Bahasa dan Kebudayaan | | | 10.000.000 | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | 30,00 | 3.000.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.02 | Penyebarluasan dan Penerapan Kultur | | | 248.300.000 | 65.000.000 | 33.000.000 | | | | | 33.000.000 | 50,77 | 281.300.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.03 | Penyebarluasan dan Penerapan Logistik Kantor | | | 294.200.000 | 75.064.800 | 18.500.000 | | | | | 18.500.000 | 24,65 | 312.978.800 | | | | |
| 5.01.01.2.02.04 | Penyebarluasan dan Penerapan Perangkat Daerah | | | 51.320.000 | 24.000.000 | 7.621.000 | | | | | 7.621.000 | 31,43 | 59.941.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.05 | Penyebarluasan dan Penerapan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | 47.450.000 | 40.000.000 | 10.600.000 | | | | | 10.600.000 | 26,50 | 58.250.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.06 | Penyebarluasan dan Penerapan Koordinasi dan Konsolidasi SKPD | | | 274.900.000 | | 75.000.000 | | | | | 75.000.000 | 18,13 | 288.500.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.07 | Penyelegaranan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi SKPD | | | 274.900.000 | | 75.000.000 | | | | | 75.000.000 | 18,13 | 288.500.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.08 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah | | | 352.193.736 | 370.215.480 | 88.520.074 | - | - | - | - | 88.520.074 | 23,91 | 440.713.810 | | | | |
| 5.01.01.2.02.09 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah | | | 105.027.736 | 108.981.750 | 22.777.074 | | | | | 22.777.074 | 21,22 | 127.304.410 | | | | |
| 5.01.01.2.02.10 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah | | | 247.566.400 | 265.731.290 | 66.243.000 | | | | | 66.243.000 | 24,98 | 313.809.400 | #DIV/0! | | | |
| 5.01.01.2.02.11 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 254.200.000 | 80.000.000 | 12.791.400 | - | - | - | - | 12.791.400 | 15,99 | 266.991.400 | | | | |
| 5.01.01.2.02.12 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah, Bayar Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas dan Kondisi Dinas Abitur | | 1 unit | 90.000.000 | 40.000.000 | 8.491.400 | | | | | 8.491.400 | 21,23 | 98.491.400 | | | | |
| 5.01.01.2.02.13 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah, Gudang Kantor atau Barongan Lemah | | 1 unit | 40.000.000 | 30.000.000 | 1.900.000 | | | | | 1.900.000 | 5,33 | 41.900.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.14 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah, Gedung Kantor atau Barongan Lemah | | 1 unit | 95.250.000 | 10.000.000 | 2.400.000 | | | | | 2.400.000 | 24,00 | 97.650.000 | | | | |
| 5.01.01.2.02.15 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah, Gedung Kantor atau Barongan Lemah | | 1 unit | 28.050.000 | | | | | | | | | 28.050.000 | | | | |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | 1.110.000.000 | 898.775.600 | 122.925.000 | - | - | - | - | 122.925.000 | 15,68 | 1.232.925.000 | | | | |
| 5.01.02.01 | Penyebarluasan dan Penerapan Peraturan Daerah | | | 905.000.000 | 768.179.600 | 122.925.000 | - | - | - | - | 122.925.000 | 16,00 | 1.107.925.000 | | | | |
| 5.01.02.01.01 | Analisa Kondisi Daerah, Pernasionalan dan Isu Strategis | | | 1.144.770.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.02.01.02 | Koordinasi Perbaikan Dokumen Perencanaan | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| 5.01.02.01.03 | Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Jangka Panjang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.02.01.04 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | 58.000.000 | 39.990.000 | 36.050.000 | | | | | 36.050.000 | 90,15 | 86.050.000 | | | | |
| 5.01.02.01.05 | Pembangunan dan Penerapan Kabupaten Kota | | | 125.000.000 | 58.649.600 | | | | | | | | 125.000.000 | | | | |
| 5.01.02.01.06 | Perbaikan dan Penerapan Kode Etik Muzakarah Kecamatan | | | 58.000.000 | 39.400.000 | | | | | | | | 58.000.000 | | | | |
| 5.01.02.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota | | | 768.000.000 | 639.140.000 | 86.875.000 | | | | | 86.875.000 | 13,59 | 846.875.000 | | | | |
| 5.01.02.02 | Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 75.000.000 | 62.600.000 | | - | - | - | - | | | 75.000.000 | #DIV/0! | | | |
| 5.01.02.02.01 | Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 50.000.000 | 55.600.000 | | | | | | | | 50.000.000 | #DIV/0! | | | |
| 5.01.02.02.02 | Penyebarluasan dan Penerapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 25.000.000 | 27.000.000 | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 5.01.02.02.03 | Perbaikan dan Penerapan Bidang Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | 48.000.000 | | - | - | - | - | | | 50.000.000 | | | | |
| 5.01.02.02.04 | Koordinasi Pengembangan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | 50.000.000 | 48.000.000 | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 5.01.02.02.05 | Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala Perkembangan Pembangunan Daerah | | | 50.000.000 | 48.000.000 | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 5.01.02.02.06 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Perkembangan Pembangunan Daerah | | | 50.000.000 | 48.000.000 | | | | | | | | 50.000.000 | | | | |
| 5.01.03 | PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 1.225.829.400 | 582.857.600 | 131.070.500 | - | - | - | - | 131.070.500 | | 1.356.899.900 | | | | |
| 5.01.03.01 | Meningkatkan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 12.287.250.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.01.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manfaat | | | 420.000.000 | 203.120.000 | 37.010.000 | - | - | - | - | 37.010.000 | 18,22 | 457.010.000 | | | | |
| 5.01.03.01.02 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPD) | | | 180.000.000 | 42.220.000 | 10.600.000 | | | | | 10.600.000 | 25,11 | 190.600.000 | | | | |
| 5.01.03.01.03 | Assistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.01.04 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.01.05 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.01.06 | Assistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.01.09 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan SDM (Sumber Daya Aman) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03.02 | PROGRAM KORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 401.749.400 | 182.717.600 | 48.171.000 | - | - | - | - | 48.171.000 | 26,36 | 449.920.400 | | | | |
| 5.01.03.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPD) | | | 99.999.800 | 33.000.000 | 18.650.000 | | | | | 18.650.000 | 56,52 | 118.649.800 | | | | |
| 5.01.03.02.02 | Assistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | 25.000.000 | 23.020.000 | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 5.01.03.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 15.000.000 | 6.000.000 | | | | | | | | 15.000.000 | | | | |
| 5.01.03.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 95.000.000 | 18.766.000 | 5.841.000 | | | | | 5.841.000 | 31,13 | 100.841.000 | | | | |
| 5.01.03.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM (RPJPD, RPJMD dan RPD) | | | 35.000.000 | 32.000.000 | 10.760.000 | | | | | 10.760.000 | 33,63 | 45.760.000 | | | | |
| 5.01.03.02.06 | Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan | | | 25.000.000 | 21.931.600 | | | | | | | | 25.000.000 | | | | |
| 5.01.03.02.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | | | | 15.000.000 | | | | |
| 5.01.03.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 91.749.600 | | 32.000.000 | | | | | 32.000.000 | 40,38 | 104.669.600 | | | | |
| 5.01.03.02.09 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | | | 404.080.000 | 156.320.000 | 45.889.500 | - | - | - | - | 45.889.500 | 23,39 | 449.969.500 | | | | |
| 5.01.03.02.10 | Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RPD) | | | 75.000.000 | 24.000.000 | 13.207.500 | | | | | 13.207.500 | 55,03 | 88.207.500 | | | | |
| 5.01.03.02.11 | Assistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | 20.000.000 | 24.000.000 | 5.130.000 | | | | | 5.130.000 | 21,38 | 25.130.000 | | | | |
| 5.01.03.02.12 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 30.000.000 | | 11.000.000 | | | | | | | 12.000.000 | 10,18 | 31.120.000 | | |
| 5.01.03.02.13 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | 56.000.000 | | 32.880.000 | | | | | | | 4.005.000 | 12,18 | 60.005.000 | | |
| 5.01.03.02.14 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RPD) | | | 75.000.000 | | 25.240.000 | | | | | | | 13.692.000 | 54,25 | 88.692.000 | | |
| 5.01.03.02.15 | Assistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | 20.000.000 | | 24.350.000 | | | | | | | 5.025.000 | 20,64 | 25.025.000 | | |
| 5.01.03.02.16 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | 27.000.000 | | 11.440.000 | | | | | | | 1.260.000 | 11,01 | 28.860.000 | | |
| 5.01.03.02.17 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayah | | | 100.480.000 | | 43.310.000 | | | | | | | 2.450.000 | 5,66 | 102.930.000 | | |
| 5.05 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENELITIAN DAN PENEMUAN | | | 110.000.000 | 83.000.000 | | - | - | - | - | | | | | 110.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|----------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| | 6.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DASAR | Jumlah Kasus | 12.180.000.000 | 83.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 110.000.000 | |
| | 6.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | 110.000.000 | 83.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 110.000.000 | |
| | 6.05.02.2.04.04 | Asuransi dan Organisasi Hasta/Hasta Kellangan | | 110.000.000 | 83.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 110.000.000 | |
| | 6.02.08.00.08.24.00 | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | 526.775.038.824 | 514.801.777.675 | 49.011.674.646 | | | 49.011.674.646 | 9,52 | 575.786.713.470 | | | |
| | 6.02 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEUANGAN | | 5.815.394.000 | 4.571.499.875 | 812.270.625 | | | | | 812.270.625 | 17,77 | 6.627.664.625 | |
| | 6.02.01 | PROGRAM PENUNJUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 15.704.974.209 | 12.973.986.267 | 3.209.106.239 | | | | | 3.209.106.239 | | 18.914.074.448 | |
| | 6.02.01.2.01 | Penercanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perorangan | | 75.000.000 | 61.000.000 | 23.131.000 | | | | | 23.131.000 | 37,92 | 98.131.000 | |
| | 6.02.01.2.01.08 | Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Akhirnya Realisasi Kinerja SKPD | | 75.000.000 | 61.000.000 | 23.131.000 | | | | | 23.131.000 | 37,92 | 98.131.000 | |
| | 6.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.130.406.609 | 10.311.081.337 | 2.364.114.189 | | | | | | 2.364.114.189 | 22,43 | 14.502.420.298 | |
| | 6.02.01.2.02.01 | Penyelesaian Catatan dan Tuntangan ASN | 12.130.406.609 | 10.311.081.337 | 2.364.114.189 | | | | | | 2.364.114.189 | 22,43 | 14.502.420.298 | |
| | 6.02.01.2.02.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 800.000.000 | 100.000.000 | 85.000.000 | | | | | | 85.000.000 | 85,00 | 885.000.000 | |
| | 6.02.01.2.05.02 | Pengelolaan Pakaiannya Dinas berdasarkan Atribut | | - | - | - | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | - | - | - | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.01.2.05.10 | Spesifikasi Peraturan Perundang-Undangan | 800.000.000 | 100.000.000 | 85.000.000 | | | | | | 85.000.000 | 85,00 | 885.000.000 | |
| | 6.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | - | - | - | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 996.000.000 | 615.500.000 | 314.875.675 | | | | | | 314.875.675 | 50,87 | 1.309.075.675 | |
| | 6.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Berguna bagi Masyarakat | 16.000.000 | 25.000.000 | 3.500.000 | | | | | | 6.900.000 | 37,40 | 22.900.000 | |
| | 6.02.01.2.06.02 | Pengelolaan Perlakuan dan Penyelepasan Kantor | 200.000.000 | 78.000.000 | 33.500.000 | | | | | | 38.600.000 | 49,49 | 238.600.000 | |
| | 6.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 150.000.000 | 75.000.000 | 26.000.000 | | | | | | 28.000.000 | 37,31 | 178.000.000 | |
| | 6.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengemasan | 400.000.000 | 350.000.000 | 202.725.675 | | | | | | 202.725.675 | 57,94 | 602.725.675 | |
| | 6.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 88.000.000 | 37.500.000 | 21.605.000 | | | | | | 21.605.000 | 57,41 | 101.605.000 | |
| | 6.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000 | 50.000.000 | 15.245.000 | | | | | | 15.245.000 | 30,49 | 165.245.000 | |
| | 6.02.01.2.06.10 | Penatalaksanaan Aset Dinamis oleh SKPD | | - | - | - | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.01.2.07 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 259.970.000 | 85.800.000 | - | | | | | | - | - | - | 259.970.000 |
| | 6.02.01.2.07.02 | Pengelolaan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lepasang | | - | - | - | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.01.2.07.11 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 259.970.000 | 85.800.000 | - | | | | | | - | - | - | 259.970.000 |
| | 6.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.023.597.600 | 1.071.204.930 | 325.830.465 | | | | | | 325.830.465 | 30,42 | 1.346.428.065 | |
| | 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 285.000.000 | 300.107.330 | 87.031.265 | | | | | | 87.031.265 | 29,00 | 372.031.265 | |
| | 6.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Perlakuan dan Penetrakan Kantor | | 47.500.000 | - | | | | | | - | - | - | |
| | 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelaruan Umum Kantor | 715.597.600 | 721.597.600 | 238.799.200 | | | | | | 238.799.200 | 33,05 | 974.799.800 | |
| | 6.01.01.2.08.05 | Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah | 415.000.000 | 725.400.000 | 97.546.510 | | | | | | 97.546.510 | 21,43 | 512.546.510 | |
| | 6.02.01.2.08.09 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah | 175.000.000 | 200.000.000 | 52.071.932 | | | | | | 52.071.932 | 26,04 | 227.073.932 | |
| | 6.02.01.2.08.09.06 | Pemeliharaan Perstasi dan Mesiinya | 100.000.000 | 162.000.000 | 19.750.000 | | | | | | 19.750.000 | 12,19 | 119.750.000 | |
| | 6.02.01.2.08.09.09 | Pengelolaan dan Perlindungan Kantor dan Bangunan Lainnya | 140.000.000 | 167.400.000 | 26.124.978 | | | | | | 26.124.978 | 15,81 | 166.124.978 | |
| | 6.02.01.2.08.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | - | 200.000.000 | | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.01.2.08.11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | - | - | | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | 5.815.394.000 | 4.571.499.875 | 812.270.625 | | | | | 812.270.625 | 17,77 | 6.627.664.625 | INDIV/01 |
| | 6.02.04.01 | Penercanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perorangan | 78.526.160.000 | | | | | | | | | | | |
| | 6.02.04.2.01 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah | | 5.815.394.000 | 4.571.499.875 | 812.270.625 | | | | | 812.270.625 | 17,77 | 6.627.664.625 | |
| | 6.02.04.2.01.01 | Penercanaan, Pengembangan dan Pengawasannya | 50.000.000 | 52.000.000 | 24.123.000 | | | | | | 14.373.000 | 28,45 | 44.373.000 | |
| | 6.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan pajak Daerah, serta Penyeputan Kebijakan Pajak Daerah | 262.400.000 | 37.500.000 | 19.755.000 | | | | | | 19.755.000 | 52,68 | 282.155.000 | |
| | 6.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Perbaikan Kebijakan Pajak Daerah | 400.000.000 | 241.190.000 | 93.700.000 | | | | | | 93.700.000 | 38,85 | 493.700.000 | |
| | 6.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 82.594.000 | 272.700.000 | 74.365.000 | | | | | | 74.365.000 | 33,39 | 156.959.000 | |
| | 6.02.04.2.01.05 | Pengelolaan dan Penyeputan Objek Pajak Daerah | 500.000.000 | 590.830.000 | 5.000.000 | | | | | | 5.000.000 | 0,85 | 505.000.000 | |
| | 6.02.04.2.01.06 | Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 205.000.000 | 204.206.250 | 505.429.625 | | | | | | 505.429.625 | 247,51 | 710.439.625 | |
| | 6.02.04.2.02.07 | Pengelolaan Pakaiannya Dinas dan Bangunan Perkantoran (PBP2) serta Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (HTB) | 3.200.000.000 | 1.638.005.625 | 21.000.000 | | | | | | 21.000.000 | | 3.238.000.000 | |
| | 6.02.04.2.02.08 | Pengelolaan Wastafel Perangkat Daerah | 71.000.000 | 77.250.000 | 13.526.000 | | | | | | 13.526.000 | 1,60 | 83.526.000 | |
| | 6.02.04.2.02.09 | Penyeputan dan Konsultasi Pajak Daerah | 100.000.000 | 100.900.000 | 10.900.000 | | | | | | 10.900.000 | 18,11 | 110.900.000 | |
| | 6.02.04.2.02.10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 200.000.000 | 73.550.000 | 24.900.000 | | | | | | 24.900.000 | 33,45 | 224.900.000 | |
| | 6.02.04.2.02.11 | Penyelenggaraan Pajak Daerah | 584.400.000 | 358.010.000 | - | | | | | | - | - | - | 584.400.000 |
| | 6.02.04.2.02.12 | Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah | | - | - | - | | | | | - | - | - | |
| | 6.02.04.2.02.13 | Pemeliharaan, Pemerkasaan dan Pengawasannya | 100.000.000 | 300.000.000 | 7.047.000 | | | | | | 7.047.000 | 2,31 | 107.047.000 | |
| | 6.02.04.2.02.14 | Pembinaan dan Pengawasannya | 60.000.000 | 52.000.000 | 6.315.000 | | | | | | 6.315.000 | 12,14 | 66.315.000 | |
| | 6.02.04.00.00.25 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| | 6.02 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEUANGAN | | 520.959.644.824 | 510.230.367.880 | 48.199.484.021 | | | | | 48.199.484.021 | 9,45 | 569.159.048.845 | |
| | 6.02.01 | PROGRAM PENUNJUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 12.258.267.422 | 7.613.630.182 | 2.453.769.289 | | | | | 2.453.769.289 | 32,23 | 14.712.036.711 | |
| | 6.02.01.2.01 | Penercanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perorangan | 65.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | | | 25.000.000 | 100,00 | 90.000.000 | |
| | 6.02.01.2.02.06 | Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Akhirnya Realisasi Kinerja SKPD | 65.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | | | 25.000.000 | 100,00 | 90.000.000 | |
| | 6.02.01.2.02.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.403.271.422 | 5.216.114.222 | 1.584.849.289 | | | | | | 1.584.849.289 | 30,38 | 7.988.120.711 | |
| | 6.02.01.2.02.01 | Penyeputan Catatan dan Tuntangan ASN | 6.370.271.422 | 5.216.114.222 | 1.584.849.289 | | | | | | 1.584.849.289 | 30,38 | 7.963.120.711 | |
| | 6.02.01.2.02.05 | Penyediaan dan Pengemasan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25.000.000 | 100.000.000 | 26.320.000 | | | | | | 26.320.000 | 25.000.000 | | |
| | 6.02.01.2.02.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 1.000.000.000 | 600.914.700 | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | 60,04 | 2.314.410.900 | |
| | 6.02.01.2.02.07 | Pengelolaan Perlakuan dan Penyeputan Kantor | 235.000.000 | 160.000.000 | 68.680.500 | | | | | | 68.680.500 | 42,93 | 303.680.500 | |
| | 6.02.01.2.02.08 | Penyeputan Barang Cetakan dan Pengemasan | 250.000.000 | 160.000.000 | 108.127.400 | | | | | | 108.127.400 | 67,58 | 358.137.400 | |
| | 6.02.01.2.02.09 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 160.500.000 | 120.000.000 | 26.320.000 | | | | | | 26.320.000 | 23,80 | 188.820.000 | |
| | 6.02.01.2.02.09.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 289.956.000 | 147.200.000 | 48.300.000 | | | | | | 48.300.000 | 32,81 | 338.296.000 | |
| | 6.02.01.2.02.09.09 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah | 1.300.000.000 | | - | | | | | | - | - | - | 1.300.000.000 |
| | 6.02.01.2.02.09.02 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 650.000.000 | 542.019.200 | 170.254.350 | | | | | | 170.254.350 | 31,41 | 620.254.350 | |
| | 6.02.01.2.02.08 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.000.000 | 18.140.000 | 1.649.350 | | | | | | 1.649.350 | 9,00 | 51.649.350 | |
| | 6.02.01.2.02.04 | Penyeputan Jasa Pelaruan Umum Kantor | 600.000.000 | 523.979.200 | 168.604.800 | | | | | | 168.604.800 | 31,16 | 768.604.800 | |
| | 6.02.01.2.02.05 | Penyediaan dan Perlindungan Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.500.000.000 | 657.456.760 | 26.334.000 | | | | | | 26.334.000 | 1,99 | 1.526.334.000 | |
| | 6.02.01.2.02.06 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000 | 32.000.000 | 8.750.000 | | | | | | 8.750.000 | 39,77 | 58.750.000 | |
| | 6.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | 518.759.645.024 | 508.213.658.100 | 47.987.754.021 | | | | | 47.98 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|---|---|----------------|-------|----------------|
| 5.03.02.01.08 | Fasilitasi Lembaga Projek ASN | 275.000.000 | 225.000.000 | 200.000.000 | - | - | - | 200.000.000 | 88.89 | 457.000.000 |
| 5.03.02.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan | 138.000.000 | 135.538.000 | 14.350.000 | - | - | - | 15.310.000 | 11.33 | 145.350.000 |
| 5.03.02.01.11 | Pengelolaan Data Kelepasan | 20.000.000 | 37.125.000 | - | - | - | - | - | - | 20.000.000 |
| 5.03.02.01.12 | Fasilitasi Pengembangan dan Sistem Informasi Kesejahteraan | 44.575.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.02.01.26 | Mutasi dan Promosi ASN | 251.000.000 | 468.787.200 | 257.445.000 | - | - | - | 257.445.000 | 54.02 | 497.145.000 |
| 5.03.02.01.27 | Pengelolaan Data Kelepasan | 50.000.000 | 46.000.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 |
| 5.03.02.01.29 | Pengelolaan Kelepasan Pansus ASN | 150.000.000 | 115.325.000 | - | - | - | - | - | - | 150.000.000 |
| 5.03.02.01.30 | Pengelolaan Primum ASN | 35.000.000 | 335.762.200 | 257.445.000 | - | - | - | 257.445.000 | 76.67 | 292.445.000 |
| 5.03.02.01.32 | Pengembangan Kompetensi ASN | 201.367.000 | 327.187.200 | 34.795.000 | - | - | - | 34.795.000 | 10.32 | 236.382.000 |
| 5.03.02.01.33 | Pengembangan Kompetensi | 45.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 45.000.000 |
| 5.03.02.01.35 | Pengelolaan Assessment Center | 25.000.000 | 16.470.000 | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 |
| 5.03.02.01.36 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 40.000.000 | 84.037.200 | 19.795.000 | - | - | - | 19.795.000 | 23.56 | 109.795.000 |
| 5.03.02.01.38 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | 63.955.000 | 13.000.000 | - | - | - | - | 13.000.000 | 21.45 | 15.000.000 |
| 5.03.02.01.44 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran | 230.000.000 | 426.137.200 | 31.240.000 | - | - | - | 31.240.000 | 7.44 | 261.240.000 |
| 5.03.02.01.45 | Pengembangan Kajian Pelaku dan Cakupan Kinerja Anggaran | 66.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 66.000.000 |
| 5.03.02.01.46 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Anggaran | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 |
| 5.03.02.01.47 | Pengembangan Perbaikan Pelayanan Bapak Pospesial | 67.000.000 | 164.075.000 | 20.000.000 | - | - | - | 20.000.000 | 12.24 | 87.000.000 |
| 5.03.02.01.49 | Pengelolaan Tanda Jasa Bapak Pospesial | 37.712.200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.03.02.01.50 | Pembangunan Dasar ASN | 57.000.000 | 150.750.000 | - | - | - | - | - | - | 52.000.000 |
| 5.03.02.01.52 | Pengembangan Perbaikan Relaksasi Dasar ASN | 67.000.000 | 87.220.000 | 11.160.000 | - | - | - | 11.160.000 | 16.51 | 11.160.000 |
| 5.03.02.01.54 | Pelajaran Proses Unsur Perencanaan Pegawai | 40.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000.000 |
| 5.04 | URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 550.000.000 | 1.018.190.000 | 46.895.000 | - | - | - | 46.895.000 | 4.65 | 596.895.000 |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 550.000.000 | 1.018.190.000 | 46.895.000 | - | - | - | 46.895.000 | 5.97 | 596.895.000 |
| | Meningkatnya Minat Dalam Berwirausaha Profesionalisme ASN | 12.180.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Guru/Guru/Asetra dan Penilaian KEPERLUAN | 12.180.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.02.01.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 500.000.000 | 785.750.000 | 46.895.000 | - | - | - | 46.895.000 | 5.97 | 546.895.000 |
| 5.04.02.01.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagian Administrasi Penyelepasan Usur dan Penilaian Konkuren: Perangkat Dasar Penugasan dan Usulan Pengembangan | - | 147.950.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.02.01.03 | Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagian Administrasi Penyelepasan Usur dan Penilaian Konkuren: Perangkat Dasar Penugasan dan Usulan Pengembangan | 500.000.000 | 637.800.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.02.01.04 | Sertifikasi, Keterlibatan, Pengembangan Kompetensi dan Standarisasi | - | 46.895.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.02.01.05 | Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Perkuliahan dan Kompetensi di Lingkungan Pendidikan | 50.000.000 | 232.440.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 |
| 5.04.02.01.06 | Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Pendidikan | - | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.04.02.02.07 | Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Dinas, Komisi dan Organisasi dan Badan | 50.000.000 | 182.440.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000.000 |
| 4.01.02.00.00.47.00 | REKORTASATUAN | 82.013.396.473 | 66.598.232.610 | 13.607.010.000 | - | - | - | 13.607.010.300 | 20.44 | 95.638.408.774 |
| 4.01 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KESEHATAN DAN KESATUAN KERJA DALAM DAERAH | 82.013.398.474 | 66.598.232.610 | 13.607.010.300 | - | - | - | 13.607.010.300 | 20.44 | 95.638.408.774 |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 52.628.404.974 | 46.613.198.360 | 11.697.960.400 | - | - | - | 11.697.960.400 | 25.10 | 64.326.365.382 |
| | Pemerintahan Bukan Pemerintahan Daerah | 186.335.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.21.01 | Penercanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perekonomian Daerah | 1.900.000.000 | 311.644.000 | 62.720.000 | - | - | - | 62.720.000 | 20.13 | 1.963.720.000 |
| 4.01.01.21.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perekonomian Daerah | 1.000.000.000 | 100.425.000 | 29.672.000 | - | - | - | 38.620.000 | 38.46 | 1.038.620.000 |
| 4.01.01.21.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kreditor SKPD | 150.000.000 | 75.000.000 | 24.100.000 | - | - | - | 24.100.000 | 32.13 | 174.100.000 |
| 4.01.01.21.07 | Bantuan dan Pendampingan Kinerja Realisasi Kreditor | 750.000.000 | 136.719.000 | 11.000.000 | - | - | - | 11.000.000 | 8.08 | 761.000.000 |
| 4.01.01.21.22 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 23.366.277.331 | 20.545.976.953 | 6.143.513.738 | - | - | - | 6.143.513.738 | 29.90 | 29.10.261.719 |
| 4.01.01.22.01 | Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.017.677.931 | 20.222.501.952 | 6.042.902.298 | - | - | - | 6.042.902.298 | 29.88 | 28.050.600.219 |
| 4.01.01.22.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Pelaksanaan Tugas ASN | 450.000.000 | 67.800.000 | 22.900.000 | - | - | - | 22.900.000 | 19.78 | 472.900.000 |
| 4.01.01.22.03 | Pelaksanaan Perekonomian dan Pengelolaan Keuangan SKPD | 300.000.000 | 68.175.000 | 20.045.000 | - | - | - | 20.045.000 | 41.14 | 328.045.000 |
| 4.01.01.22.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.22.07 | Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.22.08 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 600.000.000 | 187.500.000 | 49.666.500 | - | - | - | 49.666.500 | 26.49 | 649.666.500 |
| 4.01.01.23.04 | Pengadaan, Pengrasian, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 200.000.000 | 62.500.000 | 7.266.500 | - | - | - | 7.266.500 | 11.63 | 207.266.500 |
| 4.01.01.23.06 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 200.000.000 | 62.500.000 | 8.925.000 | - | - | - | 8.925.000 | 14.28 | 208.925.000 |
| 4.01.01.23.08 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 200.000.000 | 62.500.000 | 33.475.000 | - | - | - | 33.475.000 | 53.56 | 233.475.000 |
| 4.01.01.23.26 | Administrasi Jumlah Perangkat Daerah | 4.948.619.600 | 5.006.311.000 | 1.366.051.730 | - | - | - | 1.366.051.730 | 20.79 | 6.264.701.730 |
| 4.01.01.23.27 | Pengembangan Instansi Lahir/Penerapan Baru | 290.010.000 | 250.000.000 | 70.000.000 | - | - | - | 70.000.000 | 28.00 | 360.010.000 |
| 4.01.01.23.29 | Pengembangan Perangkat dan Perekonomian | 330.000.000 | 872.000.000 | 146.364.600 | - | - | - | 146.364.600 | 16.78 | 476.364.600 |
| 4.01.01.23.30 | Pengembangan Peraturan Rumah Tangga | 99.999.000 | 149.972.250 | 14.897.250 | - | - | - | 14.897.250 | 14.90 | 214.897.250 |
| 4.01.01.23.31 | Pengembangan Peraturan Rumah Tangga | 1.485.277.000 | 1.500.000.000 | 71.700.000 | - | - | - | 71.700.000 | 46.73 | 2.186.700.000 |
| 4.01.01.23.35 | Pengembangan Bahan Bakar dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.37 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.38 | Pengembangan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.39 | Pengembangan Bahan Bakar dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.40 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.41 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.42 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.43 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.44 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.45 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.46 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.47 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.48 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.49 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.50 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.51 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.52 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.53 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.54 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.55 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.56 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.57 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.58 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.59 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.60 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.61 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.62 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.63 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.64 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.65 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.66 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.67 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.68 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.69 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.70 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.71 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.72 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.73 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.74 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.75 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.76 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.77 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.78 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.79 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.80 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.81 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.82 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.83 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.84 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.85 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perundangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.23.86 | Pengembangan Bahan Makanan dan Peraturan Perundang-Perund | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|----------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|
| 4.01.01.2.13.01 | Pengembangan Kompetensi dan Analisis Jurusan | 224,999,800 | 187,500,000 | 20,080,000 | | 20,080,000 | 10,75 | 245,079,800 |
| 4.01.01.2.13.02 | Koordinasi, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja | 224,999,800 | 187,500,000 | 20,080,000 | | 20,080,000 | 10,75 | 245,079,800 |
| 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 224,999,900 | 124,000,000 | 10,310,000 | | 10,310,000 | 8,33 | 233,309,900 |
| 4.01.01.2.13.04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas | 100,000,000 | 30,265,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 49,56 | 115,000,000 |
| 4.01.01.2.13.05 | Koordinasi dan Penerapan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 224,999,900 | 45,000,000 | | | | - | 224,999,900 |
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3,000,000,000 | 1,277,506,000 | 639,715,000 | - | - | 639,715,000 | 50,08 |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Kelembagaan | 500,000,000 | 85,125,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 8,79 | 507,000,000 |
| 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 2,050,000,000 | 1,105,875,000 | 632,215,000 | | 632,215,000 | 57,17 | 2,682,215,000 |
| 4.01.01.2.14.03 | Penerapan Kode Etik dan Tata Kelola Pemerintahan | 500,000,000 | 86,300,000 | | | | - | 500,000,000 |
| 4.01.01.2.14.04 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 25,210,500,000 | 17,737,700,500 | 1,645,174,892 | - | - | 1,645,174,892 | 212,58 |
| | Penerjemah Bahasa Ketua Kelompok Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 104,176,995,000 | | | | | | |
| 4.01.01.2.20.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | 2,500,000,000 | 776,100,000 | 407,000,000 | - | - | 407,000,000 | 52,48 |
| 4.01.01.2.20.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 271,000,000 | 79,110,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 | 27,81 | 297,000,000 |
| 4.01.01.2.20.01.02 | Pembentukan Organisasi | 500,000,000 | 125,000,000 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 25,00 | 525,000,000 |
| 4.01.01.2.20.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Organisi Daerah | 1,625,000,000 | 400,000,000 | 88,000,000 | | 88,000,000 | 22,00 | 1,713,000,000 |
| 4.01.01.2.20.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kejahehteraan Rakyat | 21,360,500,000 | 16,415,500,500 | 1,202,174,892 | - | - | 1,202,174,892 | 7,32 |
| 4.01.01.2.20.02.01 | Fasilitasi Penopongan Bina Mental Spiritual | 20,370,500,000 | 15,147,400,500 | 1,139,174,892 | | | 1,139,174,892 | 7,53 |
| 4.01.01.2.20.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Edukasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 990,000,000 | 839,000,000 | 63,000,000 | | 63,000,000 | 14,55 | 1,053,000,000 |
| 4.01.01.2.20.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Edukasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 1,478,000,000 | 433,100,000 | | | | - | 1,478,000,000 |
| 4.01.01.2.20.02.06 | Pelaksanaan Kebijakan, Kebutuhan dan Pengurangan Pendidikan dan Keterlibatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 275,000,000 | 75,000,000 | | | 63,000,000 | 15,83 | 338,000,000 |
| 4.01.01.2.20.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1,000,000,000 | 398,100,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 | 10,05 | 1,040,000,000 |
| 4.01.01.2.20.03.01 | Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah | 400,000,000 | 149,100,000 | 24,750,000 | | 24,750,000 | 19,89 | 413,250,000 |
| 4.01.01.2.20.03.02 | Penerapan Peraturan Daerah | 300,000,000 | 124,000,000 | 15,250,000 | | 15,250,000 | 10,73 | 300,000,000 |
| 4.01.01.2.20.03.03 | Penerapan Peraturan Daerah | 350,000,000 | 144,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | - | 350,000,000 |
| 4.01.01.2.20.04 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negar | 350,000,000 | 144,000,000 | | | | - | 350,000,000 |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4,192,493,500 | 2,233,333,750 | 259,875,000 | - | - | 259,875,000 | 11,64 |
| | Penerjemah Pengolahan dan Pengembangan Perencanaan Perekonomian serta Pembangunan masyarakat kebijakan perencanaan pertumbuhan | 13,800,000,000 | | | | | | 4,452,398,500 |
| 4.01.03.2.20.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 557,498,000 | 443,257,750 | 159,408,500 | - | - | 159,408,500 | 36,04 |
| 4.01.03.2.20.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian di IMB dan BI (D) | 162,045,000 | 63,750,000 | | | | | 162,965,000 |
| 4.01.03.2.20.01.02 | Penerapan Peraturan Daerah | 405,433,000 | 178,507,750 | 71,014,000 | | | 71,014,000 | 18,75 |
| 4.01.03.2.20.01.03 | Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Mikro-Kecil | 257,052,000 | 282,800,000 | 88,394,500 | | | 88,394,500 | 31,25 |
| 4.01.03.2.20.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 1,350,000,000 | 601,097,000 | 49,669,000 | | | 49,669,000 | 8,25 |
| 4.01.03.2.20.02.01 | Pengembangan dan Pengelolaan Perangkat Daerah | 350,000,000 | 125,000,000 | 25,000,000 | | 25,000,000 | - | 380,000,000 |
| 4.01.03.2.20.02.02 | Penerapan dan Evaluasi Program Pembangunan | 650,000,000 | 140,847,000 | 21,924,000 | | 21,924,000 | 6,43 | 671,024,000 |
| 4.01.03.2.20.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan | 350,000,000 | 134,850,000 | 13,485,000 | | 13,485,000 | 27,745,000 | 20,57 |
| 4.01.03.2.20.03 | Penerapdaan Peraduan Barang dan Jasa | 1,399,295,500 | 1,034,479,000 | 33,000,000 | | 33,000,000 | 3,19 | 1,432,995,500 |
| 4.01.03.2.20.03.01 | Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa | 600,000,000 | 699,978,000 | 33,800,000 | | 33,800,000 | 5,41 | 633,000,000 |
| 4.01.03.2.20.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 399,999,500 | 300,116,000 | | | | - | 399,999,500 |
| 4.01.03.2.20.03.03 | Pembinaan dan Adekuasi Pengadaan Barang dan Jasa | 399,996,000 | 124,395,000 | | | | - | 399,996,000 |
| 4.01.03.2.20.04 | Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam | 875,000,000 | 155,500,000 | 17,797,500 | | | 17,797,500 | 11,45 |
| 4.01.03.2.20.04.01 | Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam Peningkatan Keharmonisan, Kebutuhan dan Pengelolaan Keharmonisan, Kebutuhan dan Pengelolaan | 364,500,000 | 107,300,000 | 17,797,500 | | | 17,797,500 | 16,59 |
| 4.01.03.2.20.04.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam | 217,000,000 | 25,000,000 | | | | - | 217,000,000 |
| 4.01.03.2.20.04.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 291,500,000 | 23,200,000 | | | | - | 291,500,000 |
| 4.02.00.00.00.28.00 | SEKRETARIAAT DPRD | | | | | | | |
| 4.02.01 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KESEKRETARIATAT DPRD | 23,204,796,000 | 13,490,085,000 | 3,473,705,000 | - | - | 3,473,705,000 | 25,75 |
| 4.02.01.2.20.01 | PERENCANAAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN KAMPANYE KOTA | 55,504,549,702 | 50,314,537,600 | 11,188,206,523 | | | 13,188,206,523 | 26,21 |
| 4.02.01.2.20.01.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 136,000,000 | 83,000,000 | | | | - | 136,000,000 |
| 4.02.01.2.20.01.02 | Koordinasi dan Perwujudan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kriteria SKPD | 136,000,000 | 83,000,000 | | | | - | 136,000,000 |
| 4.02.01.2.20.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,122,719,987,4 | 4,057,251,780 | 1,213,419,825 | - | | 1,213,419,825 | 29,91 |
| 4.02.01.2.20.02.01 | Penyekran Gaji dan Tunjangan ASN | 5,092,719,874 | 4,032,251,780 | 1,213,419,825 | | | 1,213,419,825 | 30,09 |
| 4.02.01.2.20.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progresiv Realisasi Anggaran | 30,000,000 | 25,000,000 | | | | - | 30,000,000 |
| 4.02.01.2.20.05 | Administrasi Kepegawai dan Perangkat Daerah | 519,560,000 | 70,650,000 | 7,180,000 | | 7,180,000 | 10,16 | 526,740,000 |
| 4.02.01.2.20.05.01 | Pelaporan dan Pelaporan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Dutanya | 515,560,000 | 70,650,000 | 7,180,000 | | 7,180,000 | 10,16 | 526,740,000 |
| 4.02.01.2.20.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5,301,480,000 | 1,917,266,000 | 631,600,872 | | | 631,600,872 | 32,94 |
| 4.02.01.2.20.06.01 | Penerapan Komputerisasi Instansi Lulusan Perangkat Daerah | 250,000,000 | 274,760,000 | 27,410,872 | | | 27,410,872 | 9,97 |
| 4.02.01.2.20.06.02 | Penerapan Peraturan dan Peretegakan Kantor | 700,000,000 | 118,790,000 | | | | | 810,790,000 |
| 4.02.01.2.20.06.03 | Penerapan Bantuan dan Anggaran | 600,000,000 | 125,000,000 | | | | | 63,31 |
| 4.02.01.2.20.06.04 | Penerapan Bantuan dan Anggaran | 975,000,000 | 104,000,000 | 115,000,000 | | | 115,000,000 | 26,73 |
| 4.02.01.2.20.06.05 | Penerapan Bantuan dan Anggaran | 1,000,000,000 | 235,000,000 | 125,000,000 | | | 125,000,000 | 51,19 |
| 4.02.01.2.20.06.06 | Penerapan Bantuan dan Anggaran | 1,000,000,000 | 250,010,000 | 108,400,000 | | | 108,400,000 | 43,36 |
| 4.02.01.2.20.06.09 | Penerapan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 526,480,000 | 272,400,000 | | | | | 526,480,000 |
| 4.02.01.2.20.17 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5,512,854,000 | 6,011,340,000 | | | | | 5,512,854,000 |
| 4.02.01.2.20.17.01 | Pengadaan Kendaraan Penunujiang Dinas atau Kendaran Dinas Lainnya | 1,300,000,000 | 2,479,200,000 | | | | | 1,300,000,000 |
| 4.02.01.2.20.17.02 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 688,704,000 | 257,100,000 | | | | | 688,704,000 |
| 4.02.01.2.20.17.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3,524,150,000 | 3,275,940,000 | | | | | 3,524,150,000 |
| 4.02.01.2.20.28 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,956,991,120 | 1,755,098,228 | 281,514,120 | | | 281,514,128 | 16,04 |
| 4.02.01.2.20.28.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 228,593,520 | 224,849,628 | 61,014,128 | | | 61,014,128 | 27,14 |
| 4.02.01.2.20.28.03 | Penyediaan Jasa Perdagangan dan Peredaran | 150,000,000 | 55,000,000 | | | | | 150,000,000 |
| 4.02.01.2.20.28.04 | Penyediaan Jasa Jelajah dan Selidiki Umur Kantor | 1,216,397,400 | 1,475,461,000 | 210,500,000 | | | 210,500,000 | 24,93 |
| 4.02.01.2.20.28.05 | Penyediaan Bantuan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3,471,454,000 | 2,628,651,960 | 111,500,000 | | | 111,500,000 | 4,24 |
| 4.02.01.2.20.29 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penelitian dan Pajak Kandanan Perangkat Daerah atau Kendaran Dinas Lainnya | 1,671,414,000 | 980,050,000 | 111,500,000 | | | 111,500,000 | 11,38 |
| 4.02.01.2.20.29.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jalan | 1,800,000,000 | 1,648,001,960 | | | | | 1,800,000,000 |
| 4.02.01.2.20.29.22 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 34,043,130,768 | 33,791,885,640 | 10,942,991,698 | | | 10,942,991,698 | 32,38 |
| 4.02.01.2.20.29.21 | Penyediaan dan Administirasi Keuangan DPRD | 37,493,137,768 | 33,399,885,640 | 10,942,991,698 | | | 10,942,991,698 | 44,986,322,406 |
| 4.02.01.2.20.29.22 | Penerapan dan Pengelolaan Diklat dan Diklat DPRD | 450,000,000 | 182,500,000 | | | | | 44,436,127,406 |
| 4.02.01.2.20.29.23 | Penerapan Medical Check Up DPRD | 99,995,000 | 99,500,000 | | | | | 99,995,000 |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PENELAKUAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 23,204,796,000 | 13,490,085,000 | 3,473,705,000 | - | - | 3,473,705,000 | 25,75 |
| | Penerjemahan Ketua dan Anggota Dewan | 75,174,855,000 | | | | | | |
| 4.02.02.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 6,579,906,000 | 2,161,840,000 | 204,550,000 | - | - | 204,550,000 | 9,43 |
| 4.02.02.01.01 | Penerapan dan Pengelolaan Program Pemerintahan Peraturan Daerah | 5,971,966,000 | 1,958,730,000 | 204,550,000 | | | 204,550,000 | 51,44 |
| 4.02.02.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 600,000,000 | 203,110,000 | | | | - | 600,000,000 |
| 4.02.02.01.03 | Pengawasan Penyelesaian Pemerintahan | 1,295,490,000 | 545,692,000 | | | | - | 1,295,490,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 4.02.02.2.03.08 | Pembentukan Laporan Keterangansabahan Kecuali Daerah | | | 1.205.479.000 | 545.690.000 | | | | | | | | | | | | | 1.205.479.000 | | | | | |
| 4.02.03.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD Otentisasi DPRD | | | 4.794.673.000 | 3.916.930.000 | 1.138.465.000 | | | | | | | | | | | 1.198.465.000 | 30.40 | 5.993.138.000 | | | | |
| 4.02.02.2.04.01 | | | | 525.360.000 | | | | | | | | | | | | | | 325.360.000 | | 2.379.000.000 | | | |
| 4.02.02.2.04.02 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 1.138.465.000 | 3.734.830.000 | 230.545.000 | | | | | | | | | | | 230.545.000 | | 24.43 | | | | |
| 4.02.02.2.04.03 | Penyelidikan Teraga Ahli Fraksi | | | 1.440.000.000 | 1.480.000.000 | 420.000.000 | | | | | | | | | | | 420.000.000 | | 25.00 | 1.860.000.000 | | | |
| 4.02.02.2.04.06 | Pembangunan Hubungan Masyarakat | | | 350.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | |
| 4.02.02.2.04.08 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | 380.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | 380.000.000 | | 300.000.000 | | |
| 4.02.03.2.05 | Penyrapatan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 3.042.230.000 | 5.504.175.000 | 1.279.725.000 | | | | | | | | | | | 1.279.725.000 | 36.52 | 4.321.955.000 | | | | |
| 4.02.02.2.05.02 | Penerapan Pola-Pola Pelayaran DPRD | | | 1.080.020.000 | 400.000.000 | 105.800.000 | | | | | | | | | | | 105.000.000 | | 26.23 | 1.185.020.000 | | | |
| 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Riset | | | 3.114.211.000 | 3.114.211.000 | 1.173.725.000 | | | | | | | | | | | 1.174.725.000 | 37.44 | 3.136.935.000 | | | | |
| 4.02.02.2.05.04 | Penyelesaian Sama Dasah | | | 5.543.344.000 | 1.850.000.000 | 66.360.000 | | | | | | | | | | | 66.360.000 | | 5.543.344.000 | | RDIV/01 | | |
| 4.02.02.2.05.07 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Perselejuran kejadian Dalam Negeri | | | 5.827.744.000 | 2.845.570.000 | 665.000.000 | | | | | | | | | | | 665.260.000 | | 23.23 | 6.488.904.000 | | | |
| 4.02.02.2.07.01 | Pengembangan DPRD | | | 1.359.364.000 | 495.880.000 | 115.700.000 | | | | | | | | | | | 115.700.000 | | 76.35 | 1.895.468.000 | | | |
| 4.02.03.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | 1.759.764.000 | 495.880.000 | 125.705.000 | | | | | | | | | | | 125.705.000 | | 25.35 | 1.885.469.000 | | | |
| 8.01.00.00.00.30.00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 12.141.730.250 | 8.727.797.250 | 1.994.168.000 | | | | | | | | | | | 1.994.168.000 | 22.85 | 14.135.898.250 | | | | |
| 8.01.01 | PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARISATPENITAH | | | 872.969.100 | 3.815.060.790 | 1.043.154.143 | | | | | | | | | | | 1.043.154.143 | | 27.34 | 1.916.123.243 | | | |
| 8.01.01.2.02.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 75.000.000 | 3.216.128.390 | 902.722.321 | | | | | | | | | | | 902.722.321 | | 27.34 | 983.722.321 | | | |
| 8.01.01.2.02.03 | Penerapan Gali dan Turangkan ASN | | | 75.000.000 | 3.215.220.390 | 907.722.321 | | | | | | | | | | | 907.722.321 | | 27.34 | 907.722.321 | | | |
| 8.01.01.2.02.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 336.560.000 | 180.941.000 | 66.455.000 | | | | | | | | | | | 66.455.000 | | 36.73 | 75.000.000 | | | |
| 8.01.01.2.06.01 | Penyampaikan Komplain Instansi/Layanan | | | 39.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.600.000 | | |
| 8.01.01.2.06.02 | Penyampaikan Perihalan dan Penyelesaikan Kontraktor | | | 42.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.000.000 | | |
| 8.01.01.2.06.04 | Penyampaikan Bahan/Lokasi Kantor | | | 49.960.000 | 47.995.000 | 30.000.000 | | | | | | | | | | | 30.000.000 | | 62.54 | 79.980.000 | RDIV/01 | | |
| 8.01.01.2.06.05 | Penyampaikan Barang/Catatan dan Penindangan | | | 37.790.000 | 47.944.000 | 5.555.000 | | | | | | | | | | | 5.555.000 | | 11.45 | 43.305.000 | | | |
| 8.01.01.2.06.06 | Penyampaikan Bahan/Bukti dan Penindangan/Hindangan | | | 40.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | 66.47 | 60.000.000 | | | |
| 8.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kuningan Tam | | | 15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 | | |
| 8.01.01.2.06.09 | Penerapan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 92.825.000 | 55.000.000 | 10.900.000 | | | | | | | | | | | 10.900.000 | | 19.82 | 103.525.000 | | | |
| 8.01.01.2.07 | Penerapan Bantuan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 54.511.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.511.000 | | |
| 8.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Tempat Kerja | | | 54.511.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.511.000 | | |
| 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 316.831.100 | 248.664.400 | 68.975.816 | | | | | | | | | | | 68.975.816 | | 27.74 | 385.806.916 | | | |
| 8.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi: Sumber Daya Air dan Listrik | | | 64.656.300 | 43.824.000 | 5.484.416 | | | | | | | | | | | 5.484.416 | | 12.51 | 70.170.716 | RDIV/01 | | |
| 8.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor | | | 47.180.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.100.000 | | |
| 8.01.01.2.08.04 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 89.667.000 | 70.225.000 | | | | | | | | | | | | 61.491.400 | | 31.00 | 89.667.000 | | | |
| 8.01.01.2.09 | Penerapan Peraturan Daerah, Sistem Penitiran dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 89.667.000 | 70.225.000 | 22.663.000 | | | | | | | | | | | 22.663.000 | | 32.27 | 112.330.000 | | | |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAKILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | 865.800.000 | 550.000.000 | 28.750.000 | | | | | | | | | | | 28.750.000 | | 5.23 | 894.550.000 | RDIV/01 | | |
| 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 865.800.000 | 550.000.000 | 28.750.000 | | | | | | | | | | | 28.750.000 | | 5.23 | 894.550.000 | RDIV/01 | | |
| 8.01.02.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: Binaan Tunggal Ika dan Sejarah Indonesia | | | 865.800.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 865.800.000 | | |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | 5.997.895.250 | 2.275.597.250 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.997.895.250 | | |
| 8.01.03.2.01 | Menyusun Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Perangkat Politik di Lingkungan serta memperbaiki peran organisasi berwenang | | | 364.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.03.2.01.01 | Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik, Penerapan Demokrasi, Fasilitasi Kolektivitas Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemanfaatan Situsi Politik | | | 5.997.895.250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.997.895.250 | |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA | | | 478.025.000 | 102.200.000 | 19.400.000 | | | | | | | | | | | 19.400.000 | | | | 497.435.000 | | |
| 8.01.05.2.01 | Meningkatkan etika dan budi politik di lingkungan berwenang dan mewujudkan peran organisasi berwenang | | | 8.548.686.606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01.01 | Meningkatkan etika dan budi politik di lingkungan berwenang dan mewujudkan peran organisasi berwenang | | | 2.317.087.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Bantuan dan Pendampingan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 478.035.000 | 102.200.000 | 19.400.000 | | | | | | | | | | | 19.400.000 | | 18.99 | 497.435.000 | | | |
| 8.01.05.2.01.03 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pengembangan Peran Organisasi Berwenang dan Mewujudkan Beragam dan Penuhnya Kepatuhan di Dinas | | | 478.035.000 | 102.200.000 | 19.400.000 | | | | | | | | | | | 19.400.000 | | 18.99 | 497.435.000 | | | |
| 8.01.05.2.01.05 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENINGKATAN KONFLIK SOSIAL | | | 4.380.000.000 | 5.800.000.000 | 1.946.018.000 | | | | | | | | | | | 1.946.018.000 | | 33.55 | 6.746.018.000 | | | |
| 8.01.05.2.01.06 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 15.275.156.250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01.07 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 4.800.000.000 | 5.800.000.000 | 1.946.018.000 | | | | | | | | | | | 1.946.018.000 | | 33.55 | 6.746.018.000 | | | |
| 8.01.05.2.01.08 | URUSAN KEWILAYAHAN | | | 86.479.089.648 | 22.229.416.902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01.09 | KECAMATAN | | | 86.479.089.648 | 22.229.416.902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH ANGGOTA DAN REALISASI | 2.694.348.692.377 | | 2.707.656.601.065 | 2.893.457.894.057 | 483.504.106.117 | | | | | | | | | | | 483.504.106.117 | | 16.71 | 3.376.361.910.174 | 1.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL RATA-RATA CAPOIAN KINERJA DAN ANGGOTA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025

| No | Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD | Pagu anggaran | Belanja Pegawai | Realisasi | % Fisik | Predikat |
|------------|--|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | URUSAN WAJIB | 675.787.463.318 | | 24.135.488.516 | 15,69 | Sangat Rendah |
| I | Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | 571.764.279.773 | | 13.221.461.459 | 13,67 | Sangat Rendah |
| 1 | Pendidikan | 213.633.995.775 | | 863.634.853 | 0,40 | Sangat Rendah |
| 2 | Kesehatan | 199.768.402.025 | | 5.131.673 | 0,00 | Sangat Rendah |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 95.095.317.323 | | 7.885.601.221 | 8,29 | Sangat Rendah |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 58.855.093.650 | | 2.460.633.712 | 4,18 | Sangat Rendah |
| 5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 4.051.471.000 | | 1.929.050.000 | 47,61 | Sangat Rendah |
| 6 | Sosial | 360.000.000 | | 77.410.000 | 21,50 | Sangat Rendah |
| II | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | 104.023.183.545 | | 10.914.027.057 | 17,72 | Sangat Rendah |
| 1 | Tenaga Kerja | 300.000.000 | | 33.850.000 | 11,28 | Sangat Rendah |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 553.160.000 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 3 | Pangan | 5.921.166.448 | | 378.690.075 | 6,40 | Sangat Rendah |
| 4 | Pertanahan | 50.000.000 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 5 | Lingkungan Hidup | 1.422.377.650 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 6 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 3.558.767.000 | | 1.678.859.072 | 47,18 | Sangat Rendah |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 18.375.580.368 | | 1.622.951.934 | 8,83 | Sangat Rendah |
| 8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 11.004.820.000 | | 261.510.000 | 2,38 | Sangat Rendah |
| 9 | Perhubungan | 19.981.154.526 | | 5.156.122.876 | 25,80 | Sangat Rendah |
| 10 | Komunikasi dan Informatika | 9.798.684.800 | | 423.137.100 | 4,32 | Sangat Rendah |
| 11 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 11.837.552.932 | | 325.000.000 | 2,73 | Sangat Rendah |
| 12 | Penanaman Modal | 956.521.000 | | 5.000.000 | 0,52 | Sangat Rendah |
| 13 | Kepemudaan dan Olahraga | 15.976.455.871 | | 750.000.000 | 4,69 | Sangat Rendah |
| 14 | Statistik | 175.000.000 | | 171.017.000 | 97,72 | Sangat Tinggi |
| 15 | Kebudayaan | 2.240.773.950 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 16 | Perpustakaan | 1.750.000.000 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 17 | Kearsipan | - | | - | - | - |
| 18 | Persandian | 120.775.000 | | 107.889.000 | 89,33 | Tinggi |
| III | URUSAN PILIHAN | 24.696.076.390 | | 536.614.500 | 8,77 | Sangat Rendah |
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 2.926.066.850 | | 291.514.500 | 9,96 | Sangat Rendah |
| 2 | Pariwisata | 252.111.000 | | 50.000.000 | 19,83 | Sangat Rendah |
| 3 | Pertanian | 19.628.438.540 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 4 | Kehutanan | | | | | |
| 5 | Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | |
| 6 | Perdagangan | 1.389.370.000 | | 195.100.000 | 14,04 | Sangat Rendah |
| 7 | Perindustrian | 500.090.000 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 8 | Transmigrasi | - | | - | - | - |
| IV | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 525.968.972.475 | | 50.258.505.646 | 8,04 | Sangat Rendah |
| 1 | Administrasi Pemerintahan | | | | 0,00 | Sangat Rendah |
| 2 | Pengawasan | | | | 0,00 | Sangat Rendah |
| 3 | Perencanaan | 1.480.837.200 | | 253.995.500 | 17,15 | Sangat Rendah |
| 4 | Keuangan | 514.801.777.675 | | 49.011.674.646 | 9,52 | Sangat Rendah |
| 5 | Kepegawaian | 2.029.861.600 | | 567.039.500 | 27,93 | Sangat Rendah |
| 6 | Penelitian dan Pengembangan | 110.000.000 | | - | 0,00 | Sangat Rendah |
| 7 | Pendidikan dan Pelatihan | 500.000.000 | | 46.885.000 | 9,38 | Sangat Rendah |
| 8 | Penanggulangan Bencana | 1.149.731.000 | | 27.650.000 | 2,40 | Sangat Rendah |
| 9 | Inspektorat | 5.896.765.000 | | 351.261.000 | 5,96 | Sangat Rendah |
| V | PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 88.802.114.860 | | 19.074.883.300 | 23,01 | Sangat Rendah |
| 1 | Sekretariat Daerah | 66.584.232.610 | | 13.607.010.300 | 20,44 | Sangat Rendah |
| 2 | Sekretariat DPRD | 13.490.085.000 | | 3.473.705.000 | 25,75 | Sangat Rendah |
| 3 | Urusan Bangsa dan Politik | 8.727.797.250 | | 1.994.168.000 | 22,85 | Sangat Rendah |
| VI | PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN | 80.479.089.648 | | 22.229.416.902 | 27,62 | Sangat Rendah |
| 1 | Kecamatan | 80.479.089.648 | | 22.229.416.902 | 27,62 | Sangat Rendah |
| VII | NON URUSAN | 1.497.724.087.366 | | 367.269.197.253 | 24,52 | Sangat Rendah |
| 1 | Non Urusan | 1.497.724.087.366 | | 367.269.197.253 | 24,52 | Sangat Rendah |
| | TOTAL | 2.893.457.804.057 | | 483.504.106.117 | 17,62 | Sangat Rendah |